BAMBANG SOESATYO AJAK RAWAT NILAI-NILAI PANCASILA

MEDIA INFORMASI DAN KOMUNIKASI KONSTITUSI

MAJELIS

MPR RUMAH KEBANGSAAN

EDISI NO.06/TH.XVI/JUNI 2022

TRANSISI PANDEMI KE ENDEMI COVID-19

MOMENTUM MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS

ISSN 0854-6371
9 770854 637158

06 Refleksi
Merawat Momentum Pertumbuhan

16 Nasional
Bamsoet Dorong Sistem Demokrasi Indonesia Dikaji Ulang

39 Selingan
Jalan Panjang Menuju JIS

56 Sosialisasi
Ahmad Basarah A-histori Jika Ada Ormas Anti Pancasila

MPR
RUMAH KEBANGSAAN
PENGAWAL IDEOLOGI PANCASILA
DAN KEDAULATAN RAKYAT

Peringatan

HARI LAHIR KE-77 PANCASILA, 1 JUNI 2022

INI BARU
INDONESIA
DARI MPR RI UNTUK NKRI

"Segera Unduh Aplikasinya!

DI PLAY STORE
http://bit.ly/bukudigitalmprri

Daftar Isi

08 BERITA UTAMA

Transisi Pandemi ke Endemi Covid-19

Kondisi transisi dari pandemi Covid-19 ke endemi membuat kehidupan masyarakat kembali "normal" seperti sediakala. Aktivitas masyarakat berangsur-angsur mulai bergulir seperti sebelum pandemi Covid-19. Ini bisa menjadi momentum untuk pemulihan ekonomi nasional.

24 Nasional

Bamsoet Ajak Rawat Nilai-Nilai Pancasila

56 Sosialisasi

Ahmad Basarah: A-histori Jika Ada Ormas Anti Pancasila

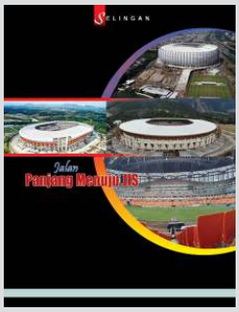

39 SELINGAN

Jalan Panjang menuju JIS

76 Profil

Anak Agung Bagus AMP

Pengantar Redaksi 04

Perspektif 06

Kolom 34

Aspirasi Masyarakat 47

Gema Pancasila 48

Varia MPR 69

Wawancara 70

Figur 72

Ragam 74

Dari Rumah Kebangsaan 80

Rehal 82

COVER

Edisi No.06/TH.XVI/Juni 2022

Kreatif: Jonni Yasrul - Foto: Istimewa

Budi Muliawan
Redaktur Pelaksana

Pengantar Redaksi

Transisi Pandemi Covid-19 ke Endemi

SITUASI pandemi Covid-19 di Indonesia sudah terkendali. Ini bisa dilihat dari jumlah kasus positif Covid-19 yang sudah berada di bawah 400 kasus per hari. Misalnya, pada tanggal 27 Mei 2022, Satuan Tugas Penanganan Covid-19 (Satgas Covid-19) mencatat penambahan kasus baru sebanyak 244 kasus konfirmasi positif Covid-19, 277 kasus sembuh, dan tambahan 9 orang meninggal. Kekhawatiran lonjakan kasus positif Covid-19 pasca lebaran Idul Fitri, setelah pemerintah mengizinkan mudik lebaran, pun tidak terjadi.

Tren penurunan kasus Covid-19 di Indonesia cukup menggembirakan. Selama beberapa pekan tidak terjadi lonjakan kasus yang signifikan. Tentu, upaya itu tidak lepas dari kerja keras semua pihak dan elemen bangsa, baik masyarakat, tokoh masyarakat, organisasi keagamaan, pemerintah, dan lainnya. Terutama, peran masyarakat yang selalu menerapkan protokol kesehatan dan aktif untuk mengikuti program vaksinasi nasional.

Melihat tren yang positif itu dan beberapa indikator (seperti penurunan kasus, penurunan rawat inap, menurunnya angka kematian), pemerintah pun memutuskan untuk memberikan kelonggaran-kelonggaran. Pada 17 Mei 2022, Presiden Joko Widodo mengumumkan masyarakat boleh tidak memakai masker di ruang terbuka yang lengang. Namun, pemakaian masker masih diwajibkan ketika berada di ruang tertutup dan di transportasi publik. Begitu juga wajib memakai masker bagi lansia, komorbid, dan orang yang sedang sakit flu atau batuk.

Pelonggaraan di Indonesia tentu mengikuti tren di negara-negara lain yang sudah melonggarkan pembatasan-pembatasan, bahkan ada beberapa negara yang membolehkan melepas masker. Juru Bicara Satgas Covid-19, Prof. Wiku Adisasmito, menyebut bahwa di Indonesia sudah terjadi masa transisi dari pandemi menuju endemi Covid-19. Artinya, Indonesia sebenarnya sudah tidak berada dalam kondisi darurat menghadapi pandemi Covid-19.

Masyarakat menyambut lega kebijakan pemerintah yang mulai mengurangi pembatasan-pembatasan. Warga masyarakat pun mulai melakukan berbagai aktivitas seperti sedia kala sebelum terjadi pandemi Covid-19. Anak-anak mulai belajar tatap muka di sekolah. Semua sektor kehidupan mulai menggeliat. Masyarakat seolah euforia seperti tampak pada kegiatan mudik lebaran lalu.

Namun, kita semua semestinya tetap waspada. Sebab, di beberapa negara masih terjadi lonjakan dan muncul varian baru Covid-19. Meskipun pemerintah memberi kelonggaran bukan berarti kita menjadi euforia dan tidak menjaga kewaspadaan. Masyarakat jangan bereuforia dan menganggap pandemi sudah berakhir. WHO menyatakan bahwa pandemi Covid-19 masih jauh dari selesai.

Kita tidak ingin kasus Covid-19 terulang kembali yang memberi dampak pada seluruh sendi masyarakat seperti dua tahun pandemi ini. Salah satu kuncinya adalah: kita harus menjaga kewaspadaan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan standar (mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak). Tak kalah penting, masyarakat tetap mengikuti imbauan untuk melakukan vaksinasi, terutama vaksinasi booster. Hanya cara seperti itulah kita bisa menghadapi virus Corona.

Dengan menerapkan protokol kesehatan standar dan vaksinasi, masyarakat bisa melewati masa transisi pandemi menuju endemi Covid-19 ini. Selama masa transisi ini—dengan kelonggaran pembatasan yang diberikan pemerintah—masyarakat bisa menjalankan aktivitas dan meningkatkan produktivitas dalam upaya pemulihan ekonomi nasional. Semoga situasi transisi pandemi saat ini bisa melakukan pemulihan semua sendi-sendi kehidupan masyarakat, termasuk ekonomi. ❑

MEDIA INFORMASI DAN KOMUNIKASI KONSTITUSI
MAJELIS

PENASEHAT
Pimpinan MPR-RI
PENANGGUNG JAWAB
Ma'ruf Cahyono
PEMIMPIN REDAKSI
Siti Fauziah
DEWAN REDAKSI
Yana Indrawan, Dyastasita, Heri Herawan, Maifrizal
REDAKTUR PELAKSANA
Budi Muliawan
KOORDINATOR REPORTASE
Ario Setiawan
REDAKTUR FOTO
Oni Arief Benyamin, Slamet Eko Suprayitno
REPORTER
Bayu Nugroho, Yenita Revi, Try Syilvani, Ikhwan Bimo F, Amelia Rubinta
FOTOGRAFER
Ahmad Suryana, Frinda, Restu, Suprianto, Faridz Rizky, Wira, Subhan
PENANGGUNG JAWAB/ KOORDINATOR DISTRIBUSI
Cucu Riwayati
STAF DISTRIBUSI
Ati Oktafia, Anggun Permana, Achmad Farobi, Widya Permataningrum
SEKRETARIS REDAKSI
Djarot Widiarto
TIM AHLI
Syahril Chili, Jonni Yasrul, Ardi Winangun, Budi Sucahyo, Derry Irawan, M. Budiono

ALAMAT REDAKSI
Biro Hubungan Masyarakat dan Sistem Informasi,
Sekretariat Jenderal MPR-RI
Gedung Nusantara III, Lt. 5
Jl. Jend. Gatot Subroto No. 6,
Senayan, Jakarta 10270.
Telp. (021) 57895237, 57895238, 57895251 Fax.: (021) 57895237
Email: pemberitaan@setjen.mpr.go.id

Buku Digital MPR RI

MUDAH DI AKSES
EFEKTIF & EFISIEN

MAJALAH MAJELIS, JURNAL, PROSIDING DAN HASIL KAJIAN MPR RI DALAM GADGET ANDA

MPR.GO.ID @MPRGOID

Buku Digital MPR RI
Rak Buku
Preview Buku
Tentang Kami

"Segera Unduh Aplikasinya!

DI PLAY STORE
http://bit.ly/bukudigitalmprri

ILUSTRASI: SUSTHANTO

Merawat Momentum Pertumbuhan di Tengah Lonjakan Pertumbuhan Harga Energi

PONDASI perekonomian nasional kembali menguat ketika daya rusak pandemi Covid-19 mulai melemah. Konsumsi rumah tangga, investasi dan ekspor sebagai motor penggerak ekonomi mulai menunjukkan pertumbuhan yang solid sepanjang kuartal pertama 2022. Penguatan itu terwujud berkat peran semua elemen masyarakat menjaga kondusifitas pada semua aspek kehidupan.

Proses awal dari pemulihan ekonomi nasional yang tergambar sepanjang kuartal-I 2022 itu patut menjadi faktor yang memperkuat optimisme masyarakat. Sebab, setahun lalu, atau pada kuartal-I 2021, perekonomian nasional masih mengalami kontraksi 0,74%.

Seperti juga pengalaman banyak negara lain, tekanan pada aspek perekonomian disebabkan oleh Pandemi Covid-19. Karena faktor pandemi, semua mesin perekonomian nyaris bekerja jauh di bawah kapasitas, yang pada gilirannya menyebabkan perekonomian global, termasuk Indonesia, masuk zona resesi. Tekanan yang luar biasa berat terjadi pada 2020 akibat meluasnya penularan virus Corona varian Delta. Tekanan berlanjut di tahun 2021 karena kegagalan mencegah penularan varian Omicron.

Tekanan teramat berat selama 2020-2021 itu nyatanya tidak menimbulkan gejolak sosial yang diakibatkan oleh faktor ekonomi. Kendati kehidupan bersama benar-benar tidak nyaman dan muncul kesulitan pada beberapa aspek, masyarakat masih mampu bertahan dan bersabar menghadapi semua ekses pandemi. Pemerintah merespons ragam kesulitan yang dihadapi masyarakat dengan sejumlah program jaring pengaman sosial.

Maka, proses pemulihan sekarang ini memberi gambaran kepada semua pihak bahwa perekonomian nasional dikelola dengan bijaksana dan penuh dengan kehati-hatian. Pandemi dengan segala eksesnya tidak membuat pemerintah dan masyarakat panik. Kebutuhan pokok masyarakat tetap terpenuhi.

Bahkan, apresiasi setinggi-tingginya layak diberikan kepada komunitas petani tanaman pangan. Berkat pengabdian mereka, aspek ketahanan pangan Indonesia tetap terjaga dengan baik sepanjang durasi pendemi Covid-19. Sebagaimana dilaporkan oleh Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso, Indonesia tidak impor beras dalam empat tahun terakhir berkat meningkatnya produksi beras di dalam negeri .

Sayangnya, upaya menjaga stabilitas perekonomian nasional di tengah pandemi itu dirongrong oleh ulah segelintir orang yang memanipulasi peruntukan atau alokasi minyak goreng produksi dalam negeri. Perilaku tak terpuji itu menyebabkan terjadinya kelangkaan dan lonjakan harga sejak awal 2022 hingga bulan April lalu.

Beruntung bahwa kasus kelangkaan minyak goreng itu tidak mereduksi proses pemulihan. Kendati masyarakat sangat kecewa dengan kasus itu, kekecewaan itu tidak menekan proses penguatan konsumsi rumah tangga.

Sebagaimana dilaporkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), Senin (9/5), perekonomian Indonesia tumbuh 5,01 pada kuartal I-2022. Produk domestik bruto (PDB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp 4.513 triliun dan berdasarkan harga konstan mencapai Rp 2.819 triliun.

Sangat menggembirakan karena BPS juga menggambarkan bahwa struktur pergerakan mesin-mesin pertumbuhan sudah kembali ke level sebelum pandemi Covid-19. Konsumsi rumah tangga, investasi dan ekspor menunjukkan pertumbuhan yang solid. Industri pengolahan menjadi penggerak utama pertumbuhan dengan porsi 65,74%, karena mencatatkan pertumbuhan 5,71%.

H. Bambang Soesatyo, SE., MBA.
Ketua MPR RI

Selain itu, pemulihan bertahap pada aktivitas masyarakat menjadi faktor pendorong menguatnya konsumsi rumah tangga yang tumbuh 4,34%. Masih menurut BPS, kinerja ekspor pada kuartal I-2022 meningkat. Nilai ekspor hingga Maret 2022 mencapai US$ 66,14 miliar. Sedangkan pertumbuhan investasi atau pembentukan modal tetap bruto (PMTB) tumbuh 4,06%.

Pertumbuhan pada kuartal 1-2022 ini bahkan mampu menyerap 4,55 juta tenaga kerja. Kecenderungan positif itu menjadi pertanda bahwa pondasi perekonomian nasional sudah kembali ke jalur proses pemulihan saat daya rusak pandemi Covid-19 mulai melemah. Namun, dinamika global mengingatkan Indonesia untuk selalu waspada.

Proses pemulihan sekarang ini ternyata harus berhadapan dengan tantangan riil. Tantangan bersamanya adalah menjaga dan merawat momentum pertumbuhan ekonomi sekarang ini agar dapat berlangsung konstan. Semua elemen masyarakat hendaknya aktif berkontribusi mewujudkan kondusifitas pada semua aspek kehidupan. Dengan iklim perekonomian yang kondusif, investasi akan terus bertumbuh dan menciptakan lapangan kerja baru.

Memang, menjaga momentum pertumbuhan sekarang ini menjadi tidak mudah karena adanya ketidakpastian global akibat invasi Rusia ke Ukraina. Salah satu dampak langsung dari invasi militer Rusia itu adalah naiknya harga energi. Hari-hari ini, komunitas global harus menerima fakta tentang tingginya harga energi. Di dalam negeri, masyarakat kebanyakan juga sudah merasakan dampak itu dalam wujud naiknya harga bahan bakar minyak (BBM).

Lonjakan harga energi menjadi persoalan sangat serius bagi banyak negara di Eropa. Rusia memanfaatkan cadangan minyaknya untuk memperkuat daya tawar atas sanksi yang diberlakukan sejumlah negara Eropa penentang invasi ke Ukraina. Tingginya harga energi memberi dampak signifikan pada proses pemulihan ekonomi Eropa.

Sebagaimana dipahami bersama, naiknya harga energi sekarang ini pun sudah pasti memberi dampak kepada sektor industri dalam negeri. Lazimnya, harga energi yang naik akan mendongkrak biaya produksi. Konsekuensinya, harga ragam produk kebutuhan masyarakat akan naik. Masyarakat sebagai konsumen kembali dibuat tidak nyaman. Dan, kenaikan harga produk pasti berdampak pada laju inflasi.

Inilah tantangan riil yang harus dihadapi Indonesia ketika pondasi perekonomian nasional mulai menjalani proses pemulihan. Tentu saja semua pihak berharap kenaikan harga energi sekarang ini tidak mengeliminasi momentum pertumbuhan terkini. Pemerintah pun diharapkan tetap bijak dan lebih berhati-hati. ❑

Transisi Pandemi ke Endemi Covid-19

Momentum Meningkatkan Produktivitas

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Kondisi transisi dari pandemi Covid-19 ke endemi membuat kehidupan masyarakat kembali "normal" seperti sediakala. Aktivitas masyarakat berangsur-angsur mulai bergulir seperti sebelum pandemi Covid-19. Ini bisa menjadi momentum untuk pemulihan ekonomi nasional.

MASYARAKAT Indonesia merasa lega setelah mendengar ucapan Presiden Joko Widodo yang membolehkan melepas masker di luar ruangan. Sudah hampir dua tahun lebih, sejak Maret 2020 saat Indonesia mendeteksi kasus pertama Covid-19, masyarakat diwajibkan mengenakan masker ketika beraktivitas di luar rumah untuk mencegah penularan virus Corona. Kita tidak bisa menghirup udara dengan leluasa karena terhalang masker.

Karena itu, masyarakat menyambut suka cita ketika pemerintah mengumumkan kebijakan baru tentang penggunaan masker. Dalam keterangan pers yang disiarkan secara virtual pada Selasa, 17 Mei 2022, Presiden mengatakan, pemerintah memutuskan untuk melonggarkan kebijakan pemakaian masker. Namun, melepas masker itu hanya dibolehkan jika berada di ruang terbuka (*outdoor*). "Jika masyarakat sedang beraktivitas di luar ruangan atau di area terbuka yang tidak padat orang maka diperbolehkan untuk tidak menggunakan masker," kata Presiden dalam video di akun Youtube Sekretariat Presiden.

Namun, Presiden menekankan, kebijakan melepas masker ini tidak berlaku bagi lansia dan penderita komorbid. Selain itu, saat berada dalam ruangan (*indoor*) dan transportasi umum, masyarakat harus tetap menggunakan masker. Sejalan dengan pelonggaran itu, lanjut Presiden, bagi pelaku perjalanan dalam negeri dan luar negeri yang sudah mendapatkan dosis vaksinasi lengkap maka tidak perlu lagi untuk tes antigen atau swab PCR.

"Untuk kegiatan di ruangan tertutup dan transportasi publik tetap harus menggunakan masker. Bagi masyarakat yang masuk kategori rentan, lansia, atau memiliki penyakit komorbid, maka saya tetap menyarankan untuk menggunakan masker saat beraktivitas. Demikian juga bagi masyarakat yang mengalami gejala batuk dan pilek maka tetap harus menggunakan masker ketika melakukan aktivitas," jelasnya.

Pemerintah memutuskan untuk melonggarkan kebijakan penggunaan masker setelah mempertimbangkan penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia. Beberapa waktu terakhir, penanganan pandemi Covid-19 semakin terkendali. Bahkan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebutkan, keputusan pelonggaran pemakaian masker dan syarat perjalanan terbaru merupakan langkah awal untuk transisi dari pandemi ke endemi.

Menurut dia, jumlah kasus konfirmasi Covid-19 baik global maupun nasional terus menurun dalam beberapa waktu terakhir. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, jumlah kasus Covid-19 di Indonesia masih di bawah kisaran 1000 kasus positif per hari. Untuk itu, pemerintah mulai melakukan pelonggaran aktivitas masyarakat sebagai transisi dari pandemi ke endemi. Salah satunya, masyarakat diperbolehkan tidak menggunakan masker saat beraktivitas di luar

ruangan.

Situasi Covid-19 di Indonesia belakangan ini memang makin terkendali. Satuan Tugas Penanganan Covid-19 (Satgas Covid-19) menyebutkan, pada Jumat, 27 Mei 2022, ada tambahan 224 kasus konfirmasi positif Covid-19, sebanyak 277 kasus sembuh, dan tambahan 9 orang meninggal. Total kasus Covid-19 di Indonesia mencapai 6.053.894. Sementara itu kasus sembuh mencapai 5.894.380. Adapun kasus meninggal yang tercatat sebanyak 156.565 orang.

Juru bicara Satgas Covid-19 Prof. Wiku Adisasmito juga menyebut, sudah terjadi transisi menuju fase endemi. “Bisa dikatakan bahwa saat ini Indonesia sudah tidak berada dalam kondisi kedaruratan dalam respons pandemi Covid-19, dan mulai bertransisi menuju fase endemi,” kata Wiku dalam konferensi pers seminggu sebelum presiden mengumumkan pemerintah membolehkan lepas masker di ruangan terbuka.

Beberapa indikator yang menunjukkan fase transisi itu antara lain adanya penurunan kasus (*positivity rate* nasional sebesar 0,7%), perawatan intensif di rumah sakit (rawat inap menurun hingga 97%), dan angka kematian (kasus kematian menurun hingga 98%). Selain itu, pertumbuhan ekonomi meningkat, angka pengangguran menurun, dan indeks belanja maupun mobilitas ke luar yang meningkat menunjukkan bahwa dampak Covid-19 terus menurun.

Tetap Waspada

Meski demikian, baik Menteri Kesehatan maupun Satgas Covid-19 tetap meminta semua pihak untuk tetap waspada kemungkinan terjadinya lonjakan kasus seperti dialami beberapa negara seperti Australia, Jepang, dan Taiwan. Selain itu, juga mewaspadai kemunculan varian baru, yakni BA.4 dan BA.5 di Afrika Selatan yang bisa memantik gelombang kasus yang baru.

Wakil Ketua MPR Prof. Dr. Sjarifuddin Hasan, SE., MBA., mengucapkan rasa syukur dengan kondisi pandemi Covid-19 yang sudah terkendali ditandai kasus positif Covid-19 semakin berkurang. “Setelah angka penularan dan penyebaran virus Corona ini melandai dan penurunannya stabil, pemerintah pun menetapkan Indonesia memasuki masa transisi dari pandemi ke endemi. Artinya, selangkah lagi Indonesia akan terbebas dari Covid-19,” katanya kepada *Majelis.*

Namun, Sjarifuddin Hasan mengingatkan agar masyarakat tetap waspada terhadap kemungkinan terjadinya lonjakan lagi. Karena itu, ia mengharapkan masyarakat tetap menjaga protokol kesehatan, terutama di ruang publik tertutup, dan menerapkan pola hidup sehat. ”Pemerintah mengeluarkan kebijakan memberi kelonggaran memakai masker bukan berarti kita menjadi euforia dan tidak menjaga kewaspadaan. Kita harus tetap waspada. Jangan sampai kasus Covid-19 ini meningkat lagi. Sebab, dampaknya sangat mahal dan masyarakat yang harus menderita,” kata Syarief Hasan, sapaan Sjarifuddin Hasan.

Tidak jauh berbeda, anggota MPR dari Fraksi PAN, Saleh Partaonan Daulay, juga mengatakan, masyarakat tetap harus waspada meskipun pemerintah telah memberikan kelonggaran-kelonggaran karena mempertimbangkan penurunan kasus positif Covid-19 di Indonesia. Menurut Saleh, kebijakan boleh tidak memakai masker di ruangan terbuka bisa mengurangi

Saleh Partaonan Daulay

kejenuhan dan kebosanan masyarakat yang diminta memakai masker lebih dua tahun terakhir.

Saleh memberikan catatan yaitu masyarakat harus tetap menerapkan protokol kesehatan seperti memakai masker di tempat keramaian, menjaga jarak, dan mencuci tangan. "Khususnya menerapkan perilaku bersih dan sehat. Ini harus tetap dilakukan. Masyarakat juga diimbau agar jangan merasa aman dan nyaman dengan kondisi yang ada. Artinya, tetap waspada. Sebab WHO sendiri belum berani mengubah status dari pandemi menjadi endemi. Karena itu masih diperlukan kewaspadaan dari masyarakat," katanya kepada *Majelis*.

Hal sama juga disampaikan anggota MPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Rahmad Handoyo. Dia juga mengingatkan bahwa pelonggaran yang diputuskan pemerintah perlu disambut positif. Namun, kebijakan tersebut hendaknya tidak membuat masyarakat eforia. Rahmat mengingatkan bahwa pandemi Covid-19 masih ada. "Kebijakan ini jangan disambut secara berlebihan, masyarakat jangan bereuforia. Apalagi kalau menganggap pandemi sudah berakhir. Itu salah besar," katanya.

Rahmad menilai, kebijakan boleh tidak memakai masker di luar ruangan merupakan bukti keberhasilan penanganan Covid-19 secara gotong royong. "Apa yang sudah pemerintah buat sebagai hasil kerjasama dan gotong royong. Setelah kita, Pemda, tokoh masyarakat dan semua pemangku kepentingan bergotong royong mengendalikan Covid-19," kata anggota Komisi IX yang membidangi masalah kesehatan ini.

Rahmad meyakini, pemerintah mengeluarkan kebijakan itu setelah mendapat masukan, kajian, dan diskusi dengan para ahli serta perbandingan dengan negara lain. Setidaknya, 40 negara sudah melonggarkan kebijakan pengunaan masker, bahkan beberapa negara sudah bebas masker. "Ini start kita untuk hidup berdampingan dengan Covid-19 dengan cara seperti itu," ujarnya.

Dia juga mengingatkan agar masyarakat berhati-hati dan tidak kebablasan. Dalam arti, ia minta seluruh masyarakat benar-benar bertanggunjgawab akan dirinya dan lingkungannya dengan menerapkan protokol kesehatan. Kemudian, ia juga mengimbau masyarakat agar segera mengikuti program vaksinasi, terutama vaksin booster. "Vaksinasi jadi senjata kita yang cukup efektif melawan Covid-19," tuturnya.

Sementara itu, anggota MPR dari Fraksi PKS, Netty Prasetiyani, mengkhawatirkan pernyataan pemerintah tentang status endemi akan diinterpretasikan masyarakat sebagai sudah bebas dari Covid-19. Apalagi pemerintah telah mengumumkan kebijakan melonggarkan pemakaian masker di ruang terbuka. Padahal status endemi tidak bisa dimaknai dengan kondisi telah terbebas dari virus Covid-19.

Rahmad Handoyo

"Wacana transisi dari pandemi ke endemi dengan beberapa pelonggaran, seperti boleh tidak menggunakan masker di ruang terbuka, tidak ada lagi test Covid-19 untuk pelaku perjalanan, atau boleh berkumpul, dikhawatirkan membuat masyarakat memiliki kesimpulan yang keliru, yaitu bahwa kita sudah bebas Covid-19," kata anggota Komisi IX DPR ini dalam keterangan tertulis.

Menurut Netty, masyarakat perlu diedukasi untuk meluruskan pengertian terkait istilah endemi Covid-19. Sebab, dikhawatirkan masyarakat menganggap endemi tidak berbahaya. Padahal tidak ada jaminan jika endemi tidak kembali menjadi pandemi lagi. Masyarakat juga harus diedukasi untuk tetap menjaga protokol kesehatan dan menanamkan kebiasaan baik yang selama ini sudah dilakukan seperti memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak atau tidak berkerumun.

"Kebiasaan baik itu jangan sampai hilang. Sebab, betapa sulitnya kita dulu menerapkannya di masyarakat. Kita harus selalu mengingatkan masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan serta menjalani hidup bersih," ujarnya.

Netty berpendapat, pemerintah sebaiknya melakukan evaluasi dan kajian komprehensif atas pengendalian kasus Covid-19 sebelum memutuskan adanya transisi dari status pandemi menuju endemi. Artinya, pemerintah harus memastikan tidak ada kemunculan kasus baru dan kasus aktif selama rentang waktu tertentu.

"Lebih penting melakukan evaluasi dan kajian menyeluruh dalam pengendalian kasus Covid-19, daripada berbicara perubahan status pandemi menjadi endemi. Pemerintah harus memastikan tidak adanya kasus baru dan kasus aktif. Ini yang harus menjadi target pemerintah dalam pengendalian kasus, bukan dengan mewajarkan penyakit ini dengan status endemi," katanya.

Netty meminta pemerintah memantau angka *positivity rate*, kasus aktif Covid-19, memastikan capaian vaksinasi 70% dan selalu memperbarui data *bed occupation rate* (BOR) atau ketersediaan tempat tidur di rumah sakit pada masa transisi ini. "Ini

harus menjadi momentum bagi pemerintah untuk memperbaiki sistem kesehatan kita secara menyeluruh untuk memastikan apakah kita dapat terbebas dari Covid-19 atau justru kembali mengalami kenaikan kasus," jelasnya.

Pemulihan Ekonomi

Pandemi Covid-19 di Indonesia yang mulai melandai dan terkendali—bahkan bisa dibilang transisi menuju endemic—ini memberikan angin segar. Sebab, selama dua tahun lebih Indonesia terpapar pandemi Covid-19 telah merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat, termasuk ekonomi. Dampak pandemi Covid-19 bukan hanya pada kesehatan, tetapi juga berimbas padas

Netty Prasetiyani

ekonomi rakyat.

Syarief Hasan menyebutkan, transisi dari pandemi ke endemi ini akan memberikan dampak positif buat masyarakat. Kondisi saat ini tidak lepas dari hasil kerja keras semua elemen bangsa, termasuk pemerintah dan masyarakat, yang menerapkan protokol kesehatan dan mengikuti vaksinasi sesuai kebijakan pemerintah. "Kondisi transisi ini membuat kehidupan masyarakat kembali normal seperti sediakala. Kita melihat masyarakat sudah mulai melakukan berbagai aktivitas seperti sebelum pandemi Covid-19," kata politisi Partai Demokrat ini.

Jika kondisi seperti sekarang ini bisa terjaga dan stabil, lanjut Syarief Hasan, bukan tidak mungkin pemulihan ekonomi bisa berlangsung lebih lancar. Ekonomi bangsa kita yang babak belur karena Covid-19 ini bisa bangkit kembali. "Harapan saya kita bisa segera memperbaiki semua dampak Covid-19. Karena itu kita harus secepatnya bangkit untuk melakukan pemulihan di semua bidang kehidupan masyarakat, terutama kesehatan dan perekonomian," ucapnya.

Saleh Partaonan Daulay juga mempunyai harapan yang sama. Kebijakan pemerintah di tengah menurunnya kasus positif Covid-19 diharapkan bisa meningkatkan produktivitas masyarakat dalam upaya pemulihan ekonomi nasional. "Saya yakin pemerintah sudah melakukan evaluasi dan pertimbangan matang. Selain penyebaran virus Covid-19 sudah menurun, pelaksanaan vaksinasi tahap pertama dan tahap kedua juga hampir merata. Ini menjadi pertimbangan, apalagi ditambah dengan vaksin booster. Ini bisa menjadi momentum untuk meningkatkan produktivitas masyarakat," ujarnya. ❑

DER/BSC

Pandemi, Epidemi, dan Endemi

WAKIL Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono meluruskan pandangan tentang transisi dari pandemi Covid-19 menuju endemi. Menurut Dante, status perkembangan Covid-19 di Indonesia belum memasuki fase endemic, melainkan baru pada fase terkendali. "Artinya, pandemi saat ini tak mengganggu aktivitas masyarakat. Beberapa tahap yang harus dilewati menuju endemi adalah deseralasi, terkendali, eliminasi, dan eradikasi," katanya dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi IX DPR pada akhir Mei 2022.

Apa perbedaan antara pandemi, epidemi, dan endemi? Status endemi berarti penyakit yang berkaitan dengan virus Corona tetap ada, tetapi sudah tidak mewabah. Endemi adalah kondisi di mana sebuah penyakit mewabah tetapi hanya pada area tertentu. Endemi merupakan penyakit yang biasa ada di area geografis tertentu, misalnya Indonesia ada penyakit endemi malaria, demam berdarah.

Tingkatan selanjutnya adalah epidemic, yaitu penyakit menular yang berjangkit dengan cepat di daerah yang luas dan menimbulkan banyak korban. Contohnya, di Afrika Barat ada virus ebola, kemudian di Indonesia yang terjadi epidemi flu burung tahun 2012.

Sedangkan status pandemi ditetapkan ketika terjadi wabah yang berjangkitnya sangat luas, hampir seluruh negara atau dunia. Terkait Covid-19, WHO sudah mendeklarasikan penyakit Covid-19 sebagai darurat kesehatan global atau *public health emergency of international concern*. Deklarasi tersebut mempertimbangkan risiko serius wabah yang mengancam berbagai negara dan diperlukan usaha antarnegara untuk mengendalikan wabah.

Perbedaan pandemi dengan epidemi dan endemi adalah luasnya wilayah yang terdampak. Berdasarkan sejarah umat manusia, seluruh pandemi pasti akan bertransisi menjadi endemi, tetapi tidak ada yang tahu kapan terjadinya endemi.

Merujuk WHO, indikator endemi antara lain jumlah kasus paling banyak 20 kasus per 100.000 penduduk, jumlah pasien dirawat di rumah sakit sebanyak 5% per 100.000 penduduk, dan jumlah kematian 1 kematian per 100.000 penduduk dalam satu pekan selama enam bulan berturut-turut. Jika memenuhi tiga kriteria ini sekaligus antara tiga sampai enam bulan berturut-turut, maka dari sisi keehatan itu adalah indikator masuk ke endemi.

Nah, jika sudah masuk endemi maka Covid-19 akan diperlakukan sebagai penyakit menular lainnya, seperti tuberculosis (TB), malaria atau demam berdarah. Pemerintah melakukan penyesuaian terkait perubahan itu, termasuk skema pembiayaan dan pengobatan pasien Covid-19. Pembiayaan perawatan pasien Covid-19 yang selama ini ditanggung langsung oleh pemerintah akan dialihkan ke BPJS Kesehatan. ❑

Pandemi Covid-19 Belum Sepenuhnya Berakhir

Di tengah tren global pandemi Covid-19 yang melandai, sejumlah negara telah melonggarkan aturan terkait penggunaan masker. Pencabutan aturan wajib masker ini menjadi langkah untuk hidup berdampingan dengan Covid-19.

KAPAN pandemi Covid-19 berakhir? Ini merupakan pertanyaan setiap orang. Sudah lebih dari dua tahun masyarakat dunia didera pandemi. Namun, dalam beberapa bulan terakhir, pandemi agak mereda di beberapa negara, termasuk Indonesia. Tetapi, ada beberapa negara lagi, justru terjadi kenaikan kasus pandemi Covid-19. Menjawab pertanyaan itu, WHO (World Health Organization atau Organisasi Kesehatan Dunia) menyebutkan bahwa pandemi Covid-19 belum berakhir.

"Masih lama," kata Margaret Harris, juru bicara WHO, dalam sebuah keterangan pers di Jenewa, pada Maret lalu. Dengan kata lain, pandemi masih jauh dari kata selesai.

Margaret Harris

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

WHO mencatat, masih terjadi lonjakan-lonjakan kasus positif Covid-19. Setelah sebulan mengalami penurunan, beberapa waktu lalu terjadi lagi kenaikan kasus Covid-19, di beberapa Negara, seperti Cina dan Korea Utara. Pada April 2022, di saat kasus Covid-19 di seluruh dunia mulai melandai, Cina justru kewalahan menghadapi kenaikan kasus Corona varian Omicron. Beberapa wilayah di Cina memberlakukan *lockdown*.

Pada Mei 2022, ketika sejumlah negara dunia mulai melonggarkan protokol kesehatan, Korea Utara malah baru melaporkan ledakan kasus Covid-19 setelah dua tahun pandemi. Menurut angka resmi, pada Selasa, 17 Mei 2022, Korut mencatat 269.510 kasus tambahan dan enam kematian. Jumlah korban meninggal akibat virus Corona di Korut sebanyak 56 sejak akhir April 2022.

Tren data global memang menunjukkan pandemi Covid-19 belum berakhir. Dari data yang dilansir DW (Deutsche Welle) pada 27 Mei 2022, beberapa negara melaporkan dalam dua pekan terakhir lebih banyak kasus dibanding dua pekan sebelumnya. Dari 188 negara di dunia, ada 37 negara dengan kasus baru yang meningkat dua kali lipat, 44 negara dengan lebih banyak kasus baru, 8 negara dengan jumlah kasus yang sama, 91 negara yang mengalami penurunan jumlah kasus, dan 8 negara yang tidak ada kasus (nol kasus) dalam empat pekan berturut-turut.

Di tengah tren global itu, sejumlah negara telah melonggarkan aturan terkait penggunaan masker. Pencabutan aturan wajib masker ini menjadi langkah untuk hidup berdampingan dengan Covid-19. Di negara-negara yang telah melonggarkan aturan penggunaan masker, kita bisa berkunjung dan bebas berjalan-jalan tanpa dikungkung masker.

Denmark adalah negara Uni Eropa pertama yang mencabut pembatasan selama Covid-19, termasuk kewajiban memakai masker. Di negara ini, virus tak lagi dianggap ancaman terhadap nyawa seseorang. Padahal kasus Covid-19 di Denmark sempat melonjak mencapai angka 50.000 kasus per hari pada tahun 2020. Namun, fasilitas kesehatan di Denmark yang begitu canggih bisa menekan angka lonjakan tersebut dengan cepat. Tak perlu waktu lama, pemerintah Denmark pun mengumumkan peraturan bebas masker setelah berhasil melewati masa kritis Covid-19.

Menurut Forbes, selain Denmark, sejumlah negara Uni Eropa juga telah mencabut aturan wajib masker, seperti negara Nordik (Islandia, Finlandia, Norwegia, dan Swedia), Eropa Timur (Bulgaria, Hungaria, Polandia, Rumania, dan Slovenia), Kroasia, Republik Ceko, Estonia, Irlandia, Belanda, dan Inggris.

Sementara Prancis, Portugal, dan Spanyol telah mencabut aturan wajib masker di ruang terbuka atau tempat umum lainnya, tetapi masih mewajibkan masker di transportasi umum dan layanan kesehatan. Sedangkan Austria dan Jerman masih mewajibkan masker saat ke supermarket dan transportasi umum. Dan, di Italia, masyarakat masih wajib mengenakan masker di fasilitas umum dalam ruangan dan area yang padat.

Italia sempat menjadi negara pertama yang menemukan kasus Covid-19 dan mengalami berbagai gelombang Covid-19 dengan lonjakan kasus yang tinggi. Tapi, Italia secara masif berhasil menekan angka penderita Covid-19 dengan berbagai metode. Salah satunya menutup semua

Khairy Jamaluddin

perbatasan antarnegara dan menerapkan *full lockdown* selama beberapa bulan. Akhirnya pada akhir Juni 2021, Italia mengumumkan untuk membebaskan pemakaian masker bagi warganya.

Di kawasan Asia, sejak akhir Maret 2022, Singapura tidak mewajibkan warganya mengenakan masker di luar ruangan. Meski demikian, sebagian besar warga tetap bermasker saat bepergian. Sedangkan Malaysia mencabut aturan wajib masker di luar ruangan sejak Mei 2022. Menurut laporan *Reuters*, Menteri Khairy Jamaluddin mengatakan, warga bisa masuk ke tempat umum terlepas dari status vaksinasi mereka.

Masih di negara Asia, ada tiga negara yang tidak mewajibkan masker tetapi warganya memakai masker secara sukarela. Ketiga negara itu adalah Jepang, India, dan Korea Selatan. Juga masuk dalam kategori ini adalah Taiwan dan Hong Kong. Namun, di Taiwan ada kewajiban memakai masker di transportasi umum.

Korea Selatan menjadi salah satu negara di Asia yang pertama membolehkan masyarakatnya untuk tidak menggunakan masker di ruang publik. Angka vaksinasi masyarakat Korea Selatan mencapai lebih dari 70% dengan penyebaran hampir seluruh wilayah Korea Selatan. Itulah mengapa negara asal K-Pop ini memberlakukan pembebasan masker.

Aturan melonggarkan pemakaian masker juga diterapkan Australia. Negara-negara bagian di Australia mewajibkan masker hanya di tempat-tempat yang berisiko tinggi, seperti rumah sakit, panti jompo, transportasi umum, bandara, dan penjara.

Amerika Serikat, salah satu negara yang sempat terpuruk secara ekonomi dan kesehatan ketika dilanda pandemi Covid-19, sejak Mei 2021 sudah mengumumkan pelonggaran penggunaan masker di ruang publik, di seluruh negara bagian. Tak hanya itu, Amerika Serikat bahkan memberikan fasilitas berbagai jenis vaksin kepada warga negaranya secara gratis beserta dengan tes PCR gratis yang tersebar di banyak destinasi wisata di AS.

Bagaimana dengan Indonesia? Seperti biasa, kawasan Bundaran Hotel Indonesia di jantung kota Jakarta, pada Ahad, 29 Mei 2022, ramai dengan lalu lalang orang, baik berjalan maupun bersepeda. Warga kota tumpah ruah di hari tanpa kendaraan bermotor (car free day) untuk berolahraga atau sekadar berekreasi. Yang agak berbeda dibanding sebelumnya adalah kali ini sebagian besar warga melenggang tanpa masker.

Seperti negara-negara lain yang melonggarkan kebijakan pemakaian masker, Pemerintah Indonesia baru saja (Selasa, 17 Mei 2022) mengeluarkan aturan relaksasi kebijakan Covid-19. Pemerintah tak lagi mewajibkan warganya mengenakan masker di luar ruangan. Saat ini kasus Covid-19 di Indonesia memang mengalami tren penurunan. Secara nasional, angka positif rate mencapai 1,63%. Angka positivity rate di Jakarta mencapai 1,3%.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi mengatakan, apabila kasus Covid-19 relatif masih terkendali, maka bukan tidak mungkin Indonesia bisa sepenuhnya bebas dari masker. Pemerintah masih akan melihat terlebih dahulu perkembangan kasus Covid-19 hingga pertengahan Juni 2022. “Kita masih menunggu sampai pertengahan Juni, karena biasanya kenaikan itu terjadi 30-35 hari sesudah pemberlakuan kebijakan (pelonggaran pemakaian masker di ruang terbuka) ini,” kata Budi dalam keterangannya Senin, 30 Mei 2022.

“Kalau memang kasusnya relative lebih baik (terkendali), kita juga akan melakukan sero survei sekali lagi di bulan Juni. Kalau hasilnya baik mudah-mudahan bisa secara bertahap kita lakukan relaksasi (hingga sepenuhnya bebas dari masker),” ujarnya.

BSC (dari berbagai sumber)

Budi Gunadi

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Prof. Dr. Sjarifuddin Hasan, SE., MBA. Wakil Ketua MPR RI

Saatnya Bangkit Percepat Pemulihan Akibat Dampak Covid-19

PANDEMI Covid-19 di Indonesia memasuki babak baru. Setelah selama dua tahun lebih pemerintah memperketat protokol kesehatan terutama pemakaian masker, maka pada 17 Mei 2022, pemerintah memutuskan untuk melonggarkan kebijakan pemakaian masker. "Jika masyarakat sedang beraktivitas di luar ruangan atau di area terbuka yang tidak padat orang, maka diperbolehkan untuk tidak memakai masker," kata Presiden dalam keterangan yang disiarkan secara virtual melalui akun Youtube Sekretariat Presiden.

Namun, kebijakan melonggarkan pemakaian masker ini tidak berlaku bagi lansia atau penderita komorbit. Selain itu, masyarakat harus tetap memakai masker saat berada dalam ruangan dan transportasi umum. Begitu juga bagi siapa saja yang sedang mengalami gejala batuk dan pilek maka tetap harus menggunakan masker. Kebijakan ini sudah berlangsung hampir dua minggu. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, tidak tertutup kemungkinan Indonesia bisa sepenuhnya bebas dari masker.

Menurut Menkes, jumlah kasus konfirmasi Covid-19 baik global maupun nasional terus menurun dalam beberapa waktu terakhir. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, jumlah kasus Covid-19 di Indonesia masih di bawah kisaran 1000 kasus positif per hari. Untuk itu, pemerintah mulai melakukan pelonggaran aktivitas masyarakat sebagai transisi dari pandemi ke endemi. Salah satunya, warga masyarakat diperbolehkan tidak memakai masker saat beraktivitas di luar ruangan.

"Kita masih melihat sampai pertengahan Juni ini, karena biasanya kenaikan itu terjadi 30-35 hari sesudah pemberlakukan kebijakan pelonggaran pemakaian masker. Kalau kasusnya relatif lebih baik, kita juga akan melakukan sero survei sekali lagi di bulan Juni. Kalau hasilnya baik mudah-mudahan bisa secara bertahap kita lakukan relaksasi (sama sekali tidak memakai masker)," katanya.

Setelah pemerintah membolehkan melepas masker khusus di ruangan terbuka, masyarakat seolah euforia. Masyarakat melakukan aktivitas sosial, ekonomi, budaya, dan lainnya seperti sedia kala. Seringkali pula tanpa memperhatikan lagi protokol kesehatan seperti sering mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan.

Melihat masyarakat yang sedang mengalami transisi dari pandemi menuju endemi, Majelis mewawancarai Wakil Ketua MPR Prof. Dr. Syarifuddin Hasan, SE., MBA., beberapa waktu lalu. Berikut perbincangan dengan Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai Demokrat. Petikannya.

Pemerintah telah menetapkan Indonesia memasuki masa transisi dari pandemi Covid-19 ke endemi. Salah satu dasar pertimbangannya adalah kasus positif Covid-19 yang menurun dan mulai terbentuknya antibodi masyarakat. Apa tanggapan Bapak mengenai transisi dari pandemi ke endemi di Indonesia ini?

Sudah dua tahun lebih Indonesia terpapar pandemi Covid-19 sejak kasus pertama pada Maret 2020 silam. Dampak pandemi ini bukan hanya pada menurunnya kesehatan masyarakat, tetapi juga berimbas pada ekonomi rakyat. Selama pandemi, kita semua termasuk pemerintah, berupaya keras agar bisa menangani pandemi bahkan bisa melewati masa krisis ini. Salah satunya, kita secara masif melakukan vaksinasi hingga tiga kali. Dengan vaksinasi itu kita berharap bisa terbentuk antibody di masyarakat atau herd immunity.

Kita mesti bersyukur saat ini karena tingkat penularan dan penyebaran virus Corona mulai menurun. Ini tentu sangat menggembirakan. Pemerintah pun mengeluarkan kebijakan menurunkan level PPKM ke level dua atau satu di berbagai daerah. Sebab, ada beberapa daerah yang memang sudah terkendali dengan kasus positif Covid-19 yang semakin berkurang.

Setelah angka penularan dan penyebaran virus Corona ini melandai dan penurunannya stabil, pemerintah pun menetapkan Indonesia memasuki masa transisi dari pandemi ke endemi. Artinya, selangkah lagi Indonesia akan terbebas dari Covid-19. Kondisi ini perlu kita syukuri. Namun, kita tetap waspada terhadap kemungkinan terjadinya lonjakan lagi. Karena itu kita harapkan masyarakat tetap menjaga protokol kesehatan terutama di ruang publik tertutup dan menerapkan pola hidup sehat.

Menurut Bapak, apa yang harus diperhatikan (menjadi perhatian masyarakat) karena pada masa transisi ini pemerintah memberikan kelonggaran di antaranya membolehkan tidak memakai masker di ruangan terbuka agar tidak terjadi lonjakan kasus Covid-19?

Pemerintah mengeluarkan kebijakan memberi kelonggaran memakai masker bukan berarti kita menjadi euforia dan tidak menjaga kewaspadaan. Kita harus tetap waspada. Lebih baik waspada daripada kita kecolongan lagi dengan kenaikan kasus Covid-19. Jangan sampai kasus Covid-19 ini meningkat lagi. Sebab, dampak negatifnya sangat mahal. Masyarakat yang harus menderita.

Apakah masa transisi ini bisa diartikan kehidupan masyarakat mulai normal dan bisa melakukan segala aktivitas baik sosial, kebudayaan, ekonomi, politik, dan sebagainya?

Iya. Kondisi transisi dari pandemi ke endemi ini secara bertahap pasti membuat kehidupan masyarakat kembali normal seperti sediakala. Kita melihat masyarakat sudah mulai melakukan berbagai aktivitas seperti sebelum pandemi Covid-19.

Apakah dengan demikian pemulihan ekonomi bisa lebih cepat?

Jika kondisi seperti sekarang ini bisa terjaga dan stabil, bukan tidak mungkin pemulihan ekonomi bisa berlangsung lebih lancar. Ekonomi bangsa kita yang babak belur karena Covid-19 ini bisa bangkit kembali. Mudah-mudahan lebih cepat ya.

Apa dampak pada masyarakat dari masa transisi pandemi ke endemi?

Transisi dari pandemi ke endemi ini tentu memberikan dampak yang positif buat masyarakat. Ini tentu kita harus bisa menjaga bersama-sama. Kondisi seperti saat ini tidak lepas dari hasil kerja keras semua elemen bangsa, termasuk pemerintah. Kita sangat berterima kasih kepada pemerintah yang tidak kenal lelah terus melakukan upaya pemulihan ekonomi. Juga apresiasi kepada masyarakat yang mendukung upaya pemerintah dengan cara menerapkan protokol kesehatan dan mengikuti vaksinasi sesuai kebijakan pemerintah.

Di tengah masa transisi dari pandemi ke endemi muncul kasus penyakit hepatitis akut yang juga sering dikaitkan dengan Covid-19. Apakah munculnya hepatitis misterius yang sudah menjangkiti puluhan orang, termasuk balita, menjadi ancaman pada masa transisi ini?

Ya, kita mendengar adanya kasus hepatitis akut yang telah meminta korban jiwa. Tapi, saya lihat kasus hepatitis ini masih terkendali. Saya rasa pemerintah pun pasti punya langkah-langkah dan strategi untuk menghadapi ancaman itu. Pemerintah tentu tidak ingin kecolongan lagi. Kita sebagai rakyat harus mendukung kebijakan pemerintah.

Cukuplah pandemi Covid-19 ini menjadi pelajaran pahit dan berharga untuk kita agar ke depan tidak terjadi lagi. Pelajaran dan hikmah penting dari pandemi ini adalah sinergitas antara rakyat dan pemerintah dalam menghadapi ancaman bangsa sangatlah mutlak. Kekuatan sinergitas pemerintah dan masyarakat akan berpengaruh pada daya tahan bangsa ini menghadapi pandemi Covid-19. Bersatunya seluruh elemen bangsa dalam menghadapi masalah yang mendera bangsa ini menjadi kunci sukses bangsa Indonesia keluar dari setiap kesulitan yang ada.

Apa harapan Bapak ke depan setelah Indonesia bisa melalui masa transisi dari pandemi menuju endemi ini?

Harapan saya adalah segeralah kita mulai memperbaiki semua dampak Covid mumpung kasus Covid-19 sedang turun dan melandai. Kita sudah mulai merasakan kehidupan normal. Karena itu kita harus secepatnya bangkit untuk melakukan pemulihan di semua bidang kehidupan masyarakat terutama kesehatan dan perekonomian. ❑

Konferensi Nasional APHTN-HAN (1)

Bamsoet Dorong Sistem Demokrasi Indonesia Dikaji Ulang

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Demokrasi hanya memanjakan para elit politik, sehingga rakyat belum merasakan dampak dari demokrasi secara signifikan. Terutama terhadap kesejahteraan dan kemakmurannya.

KETUA MPR RI Bambang Soesatyo mengingatkan, maraknya politik transaksional mengikis idealisme dan komitmen politik sebagai sarana perjuangan mewujudkan aspirasi rakyat. Model transisi demokrasi tidak menjanjikan melembaganya demokrasi substansial yang terkonsolidasi. Berkembangnya kecenderungan politik identitas dan sentimen primordial dalam kontestasi pemilu merupakan ancaman bagi masa depan demokrasi dan kebhinnekaan bangsa.

Di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota dilakukan pemilihan langsung kepala daerah. Hubungan bertingkat yang disiplin dari tingkat terbawah hingga tingkat tertinggi tidak kuat lagi. Masing masing kepala daerah lebih mengutamakan konstituen daripada hierarki di atasnya.

"Akibatnya hubungan hierarkis antarpemerintah daerah kabupaten dan kota dengan provinsi tidak efektif. Demikian pula antara daerah dan pusat. Berbagai kebijakan di tingkat pusat maupun provinsi, tidak efektif dijalankan di tingkat kabupaten dan kota," ujar Bamsoet saat memberikan sambutan secara virtual dalam Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara, di Jakarta, Jumat (20/5/22).

Turut hadir, antara lain Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman, Sekretaris Jenderal MPR Ma'ruf Cahyono dan Ketua Umum Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara M. Guntur Hamzah.

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, di tengah kenyataan tersebut, wajar apabila ada sebagian pihak menilai demokrasi Indonesia di era reformasi justru sedang mengalami stagnasi. Demokrasi hanya memanjakan para elit politik, sehingga rakyat belum merasakan dampak dari demokrasi secara signifikan. Terutama terhadap kesejahteraan dan kemakmurannya.

"Berdasarkan kenyataan tersebut, secara umum pasca reformasi, demokrasi tidak bertambah baik. Hal ini dikarenakan demokrasi yang berkembang cenderung liberal, karena tidak diikuti oleh penegakan hukum yang kuat. Kedaulatan rakyat berkembang tidak sejalan dengan kedaulatan hukum," kata Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini menuturkan, timbulnya problem demokrasi di Indonesia bukanlah disebabkan oleh kesalahan konseptual paradigmatik dan pengaturan

normatifnya. Melainkan lebih disebabkan melencengnya implementasi demokrasi dari sistem yang mendasarinya.

"Untuk menangani ketidakseimbangan antara demokrasi dan hukum tersebut, hanya dapat diselesaikan dengan upaya menjadikan hukum sebagai panglima yang harus didahului dengan penataan demokrasi. Agen utama dalam urusan tata kelola ini adalah para penyelenggara negara dan kepemimpinan politik," jelas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila dan Wakil Ketua Umum FKPPI ini menambahkan, sudah saatnya sistem serta berbagai desain institusi demokrasi dan pemerintahan harus ditinjau ulang. Politik tidak dibiarkan sekadar menjadi perjuangan kuasa demi kuasa. Namun harus mengemban substansi politik dalam rangka menghadirkan berbagai kebijakan yang andal demi memenuhi visi dan misi negara.

"Keberadaban bangsa dalam berdemokrasi menjadi salah satu kunci keberhasilan sebuah negara. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa berikhtiar untuk mencari yang terbaik bagi negara yang kita cintai, agar tata kelola dalam bernegara selain demokratis juga bisa menghadirkan sistem politik yang baik dengan lahirnya para pemimpin yang dikehendaki oleh rakyat," pungkas Bamsoet. ❑

Konferensi Nasional APHTN-HAN (2)

Ma'ruf Cahyono: Untuk Penguatan Demokrasi dan Nomokrasi

Menurut Sesjen MPR, Dr. Ma'ruf Cahyono, SH., MH., semua pembahasan dalam Kenferensi Nasional APHTN-HAN, untuk kepentingan pengembangan demokrasi dan memperkokoh nomokrasi yang menjadi fondasi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

SEKRETARIS Jenderal MPR, Dr. Ma'ruf Cahyono, SH., MH., menyebutkan, Konferensi Nasional APHTN-HAN (Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara) merupakan forum yang terbuka untuk mendiskusikan penataan sistem ketatanegaraan, secara khusus terkait dengan negara hukum dan demokrasi pasca perubahan UUD 1945.

"Ini forum yang sangat terbuka sehingga substansi yang dibahas bisa saling berkaitan. Termasuk juga isu terkini tentang perpanjangan masa jabatan presiden. Tetapi, semua pembahasan itu adalah untuk kepentingan pengembangan demokrasi dan memperkokoh nomokrasi yang menjadi fondasi dari kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara," katanya usai pembukaan Konferensi Nasional APHTN-HAN yang berlangsung di Denpasar, Bali, pada Kamis (19/5/2022).

Konferensi Nasional APHTN-HAN dengan tema "Dinamika Negara Hukum Demokratis Pasca Perubahan UUD 1945" merupakan kerjasama MPR RI dan APHTN-HAN. Konferensi nasional ini dihadiri secara virtual Ketua MPR Bambang Soesatyo dan sekaligus membuka konferensi serta menyampaikan *keynote speech.* Juga hadir Ketua Umum APHTN-HAN Prof. Dr.Guntur Hamzah, SH., MH., para pengurus APHTN-HAN, para Dekan Fakultas Hukum, serta pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara.

Ma'ruf Cahyono menjelaskan, peserta konferensi nasional APHTN-HAN ini sangat beragam, terutama datang dari disiplin ilmu hukum tata negara dan hukum administrasi

negara. Dalam konferensi ini, semua isu negara hukum demokrasi didiskusikan dan dibahas. Ada tema-tema khusus yang sudah ditentukan, seperti penataan di bidang legislasi dan peraturan kebijakan, Pokok-Pokok Haluan Negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah, perkembangan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, dan perizinan pasca UU Cipta Kerja.

"Semua isu, di antaranya tema-tema yang sudah ditentukan itu, akan saling berkaitan. Saya melihat tema-tema yang dibahas secara khusus di antaranya dalam rangka untuk penguatan demokrasi dan nomokrasi," ujar Ma'ruf Cahyono yang juga salah seorang Ketua APHTN-HAN.

Dalam konferensi nasional ini, lanjut Ma'ruf Cahyono, pembahasan dan diskusi beragam isu tersebut akan berlangsung dinamis. "Harapannya konferensi ini bisa melihat sejauh mana dinamika diskursus dan orientasi yang dibangun untuk memberikan kontribusi yang besar bagi penataan demokrasi dan nomokrasi. Orientasinya tentu saja adalah untuk membangun masyarakat dan bangsa sesuai Ideologi Pancasila," papar pengajar Magister Hukum di Universitas Jenderal Soedirman itu.

"Jadi, soal society, nation, dan state setidaknya menjadi titik orientasi dalam konferensi nasional ini, terutama dalam dua hal yaitu demokrasi dan nomokrasi," sambungnya.

Ma'ruf Cahyono menambahkan, dari konferensi nasional APHTN-HAN ini lahir simpulan-simpulan dan rekomendasi-rekomendasi atas tema-tema yang dibahas dan didiskusikan. Sebelum penyelenggaraan konferensi nasional ini telah diterima tulisan atau makalah terkait isu dan tema dari para staf pengajar maupun peneliti di kementerian/lembaga.

"Tulisan-tulisan itu sudah direview sehingga memiliki bobot, kualifikasi, dan substansi yang diharapkan menjadi simpulan dan rekomendasi yang tajam untuk sistem ketatanegaraan ke depan," ujar Ma'ruf yang saat ini sedang menambah gelar doktor di Program Kajian Stratejik Global Universitas Indonesia.

Konferensi nasional APHTN-HAN ini diikuti sekitar 100 peserta. Mereka adalah peserta yang telah berhasil lolos seleksi dari 250 tulisan atau makalah yang telah direview. Peserta ini tidak hanya dari akademisi, tetapi juga dari para peneliti kementerian/lembaga.

Para narasumber dalam konferensi ini antara lain Ketua MK Prof. Dr. Anwar Usman, SH., MH.; Prof. Dr. Arief Hidayat, SH., MS., (Hakim MK); Prof. Dr. Saldi Isra, SH., MPA., (Hakim MK); Dr. Inosentius Samsul, SH., M.Hum., (Kepala Badan Keahlian DPR RI); Prof. Dr. Ni'matul Huda, SH., MH., (Ketua Pengurus Daerah APHTN-HAN DIY); Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, SH., MM., (Dekan Fakultas Hukum UNS). ❑

Konferensi Nasional APHTN-HAN (3)

Ke Depan, PPHN Harus Menjadi Instrumen

Kita tidak ingin gagasan PPHN terhenti karena urgensi keberadaan haluan negara sudah menjadi arus besar aspirasi masyarakat.

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

SEKRETARIS Jenderal MPR Dr. Ma'ruf Cahyono, SH, MH, mengatakan, Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) harus menjadi instrumen kaidah penuntun ke depan. Gagasan adanya PPHN merupakan aspirasi masyarakat yang mewarnai dinamika negara hukum berdasarkan demokrasi dalam sistem ketatanegaraan pasca perubahan UUD 1945. Ma'ruf juga meminta konferensi nasional APHTN-HAN menghasilkan rekomendasi yang berkualitas terkait tema PPHN.

"Tentu kita tidak ingin gagasan PPHN ini terhenti karena urgensi keberadaan haluan negara sudah menjadi arus besar aspirasi masyarakat. Sejak 2014 hingga saat ini, terus menjadi kajian di MPR, terutama di Badan Pengkajian dan Komisi Kajian Ketatanegaraan. Ini juga saya kira pekerjaan rumah buat APHTN-HAN untuk ikut berkontribusi memberikan masukan," ujar Ma'ruf Cahyono selaku narasumber dalam Konferensi Nasional APHTN-HAN, di Denpasar, Bali, Jumat (20/5/2022).

"Saya berharap, hasil dari konferensi nasional APHTN-HAN ini terutama dalam pembahasan PPHN bisa melahirkan satu rekomendasi yang kuat, untuk kepentingan nasional (national interest)," lanjut Ma'ruf Cahyono yang membawakan makalah bertema: "Pokok-Pokok Haluan Negara dalam Dinamika Negara Hukum Demokratis Pasca Perubahan UUD 1945".

Turut berbicara pada sesi ini Ketua KPU Dr. Hasyim Asy'ari, Dr. Inosentius Samsul, SH., M.Hum., (Kepala Badan Keahlian DPR RI), Prof. Dr. Ni'matul Huda, SH., MH., (Ketua Pengurus Daerah APHTN-HAN DIY), dan Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, SH., MM., (Dekan Fakultas Hukum UNS).

Mengawali pemaparannya, Ma'ruf Cahyono menjelaskan, MPR dengan wewenang dan tugas yang ada saat ini bisa berperan untuk memperkaya, melengkapi, dan mewarnai demokrasi dan nomokrasi di Indonesia. Salah satunya, menerima dan menyerap aspirasi masyarakat maupun daerah, serta stakeholder lainnya, termasuk kalangan akademisi, tentang pentingnya Indonesia mempunyai haluan negara.

"PPHN merupakan sintesa pemikiran-pemikiran strategis masyarakat dan daerah yang masuk ke lembaga MPR dan pada

gilirannya melahirkan rekomendasi dari MPR. Artinya, pentingnya kajian tentang PPHN sudah menjadi public policy karena sudah menjadi putusan MPR. Dalam dua periode, yaitu MPR periode 2009-2014 dan periode 2014-2019, MPR merekomendasi hal yang sama, yaitu urgensi menghadirkan haluan negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia," jelas Ma'ruf Cahyono yang juga salah satu Ketua APHTN-HAN.

Ma'ruf menambahkan MPR adalah perwakilan yang paling representative. Rekomendasi PPHN diputuskan anggota MPR, yang terdiri dari anggota DPR dan DPD. Karena itu, perlunya kajian PPHN menjadi pandangan bersama para Anggota MPR.

"Intinya, MPR dengan PPHN diharapkan bisa mentransformasi tata nilai ke dalam pranata publik, tata kelola baik di bidang legislatif, eksekutif, yudikatif maupun dalam kehidupan masyarakat. Harapannya, PPHN yang dibuat secara demokratis mampu mewadahi, mendinamisasi, dan mempertegas kedaulatan di tangan rakyat," kata pengajar Magister Hukum di Universitas Jenderal Soedirman ini.

Dengan PPHN, lanjut Ma'ruf, diharapkan terdapat akuntabilitas sosial dan politik, serta hukum, sehingga mampu menjadi instrumen mewujudkan cita negara hukum sebagaimana diamanatkan Pasal 1 ayat 3 UUD NRI Tahun 1945. "Jadi, kalau tata nilai itu masuk ke dalam tatanan tata kelola, maka tujuan Indonesia merdeka dapat diwujudkan ,yakni terciptanya kesejahteraan bagi seluruh rakyat. PPHN harus menjadi instrumen ke depan mendinamisasi negara hukum yang demokratis," kata pria yang sedang menambah gelar doktor di Program Kajian Stratejik Global Universitas Indonesia ini.

Saat ini, pembahasan PPHN sudah memasuki tataran perumusan materi. Namun, sejalan dengan itu masih memerlukan kajian mengenai di mana status hukum PPHN akan diletakan, apakah di Ketetapan MPR (Tap MPR) atau Undang-Undang (UU). "Kalau diletakkan dalam UU maka ada problem filosofis karena kita mengharapkan PPHN adalah kaidah penuntun yang tidak bersifat teknokratis. PPHN sarat dengan tata nilai yang akan ditindaklanjuti dengan aturan di bawahnya. Karena itu, kaidah penuntun bersifat haluan dan memandu kebijakan di bawahnya," kata Ma'ruf yang masuk salah satu tokoh inspirasi Jawa Tengah ini.

Pandangan dari kelompok strategis termasuk akademisi, sambung Ma'ruf, ada yang berpendapat agar PPHN sebagai kaidah penuntun tidak diletakkan sama dengan UU. "Tetapi masalahnya, jika MPR mengeluarkan Ketetapan MPR (Tap) apakah memungkinkan secara yuridis? Jika memungkinkan MPR mengeluarkan Tap, maka mewujudkan PPHN berjalan lancar, dan menemukan landasan hukumnya," tuturnya.

Karena itu, Ma'ruf berpendapat, semestinya tidak ada yang rumit meletakkan PPHN dari aspek yuridis normatif. Sebab, pembentukan hukum pada dasarnya adalah kesepakatan dan kehendak bersama. Sebagai kehendak bersama tentu tidak bisa diukur benar atau salahnya secara akademik saja, atau baik buruknya secara etis, karena kehendak bersama itu adalah resultante pemikiran yang pada akhirnya diletakkan dalam rangka kepentingan bersama, apakah dalam bentuk konstitusi, Ketetapan MPR, atau Undang Undang. ❑

Kunjungan Wakil Ketua MPR RI, Arsul Sani, di AS

Apresiasi Atensi KBRI dan KJRI pada Mahasiswa Indonesia

Dalam kunjungan ke tiga kota di Amerika Serikat, Wakil Ketua MPR, Arsul Sani, mencatat hal paling menonjol disampaikan para mahasiswa Indonesia di sejumlah kota dan universitas di AS. Apa itu?

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

MENYERTAI kunjungan Presiden Joko Widodo ke Amerika Serikat dalam menghadiri KTT ASEAN-AS di Washington DC, Wakil Ketua MPR RI, Arsul Sani, meluangkan waktunya untuk menghadiri berbagai kegiatan di sana. Pada Ahad (8/5/2022), Arsul menghadiri halal bi halal Diaspora Indonesia yang tinggal di kawasan Washington DC, Virginia, dan Maryland.

Bersama Arsul Sani juga hadir Duta Besar Luar Biasa Berkuasa Penuh (LBBP) Indonesia untuk Amerika Serikat, Rosan Roeslani, beserta istri, dan jajaran KBRI di Washington DC. Acara halal bi halal ini diselenggarakan oleh IMAAM Centre dan berbagai perkumpulan diaspora Indonesia itu berlangsung di Auditorium University of Distric of Columbia.

Selain itu, Arsul Sani juga bertemu dengan WNI yang bekerja di kota Philadelphia, Pennsylvania. Di kota ini ribuan WNI dan diaspora Indonesia bekerja di berbagai sektor industri dan perdagangan. Kemudian, kunjungan dilanjutkan ke San Francisco di negara bagian California.

Dalam kunjungan ke tiga kota di AS ini, Arsul Sani mencatat hal yang paling menonjol yang disampaikan oleh para mahasiswa Indonesia yang sedang belajar di sejumlah kota dan universitas di AS adalah apresiasi mereka terhadap Kedutaan Besar RI di Washington DC dan Konsulat Jenderal RI di San Francisco.

Sejumlah mahasiswa memberikan apresiasi terhadap KBRI, dalam hal ini Dubes Rosan Roeslani, dan Atase Pendidikan dan Kebudayaan (Atdikbud) Prof. Popy Rufaidah atas atensinya yang tinggi terhadap para mahasiswa Indonesia, khususnya mahasiswa yang berasal dari Papua dan Papua Barat. Banyak kesulitan para mahasiswa Papua yang dibantu oleh Dubes dan Atdikbud KBRI Washington DC ini.

Apresiasi yang sama juga disampaikan oleh sejumlah mahasiswa Indonesia yang belajar di California, Washington, dan Oregon terhadap KJRI di San Francisco. Prasetyo Hadi, Konsul Jenderal RI di kota ini dan jajarannya dinilai memberikan perhatian luar biasa terhadap para mahasiwa Indonesia, termasuk mahasiswa yang berasal dari Papua dan Papua Barat yang sedang belajar di tiga negara bagian AS ini.

Arsul Sani mengaku, terharu mendengar misi diplomatik Indonesia yang memberikan perhatian besar terhadap putera-puteri Indonesia ini. Para diplomat ini tidak lupa mengingatkan para mahasiswa bahwa ilmu dan keahlian yang mereka dapatkan di AS harus dikontribusikan untuk pembangunan dan kemajuan Indonesia. Apalagi sebagian besar dari para mahaiswa itu belajar dengan beasiswa LPDP dan berbagai instansi pemerintah atau BUMN Indonesia.

Atensi dari KBRI dan KJRI terhadap para mahasiswa Indonesia Papua dan Papua Barat di AS, secara khusus Arsul Sani menyebutkan, sebagai satu cara yang bagus untuk mencegah mereka bergabung ke dalam gerakan separatisme di Papua. Dia berharap, sentuhan kebangsaan dan kemanusiaan yang diberikan akan menumbuhkan jiwa NKRI pada mereka.

Mengakhiri keterangannya, Wakil Ketua MPR RI ini berharap, seluruh misi diplomatik Indonesia di manapun bisa memberikan atensi dan sentuhan-sentuhan kebangsaan dan kemanusiaan kepada para mahasiwa . “MPR RI siap diundang dan membantu program-program KBRI atau KJRI di manapun untuk acara dialog kebangsaan,” katanya. ❑

Biker

Audiensi Biker Lilik Gunawan Menggunakan Sepeda Motor Bertekad Menunaikan Ibadah Haji

Seorang biker untuk menunaikan ibadah haji dengan menempuh perjalanan darat yang panjang, dari Jakarta ke Mekkah, menggunakan sepeda motor.

WAKIL Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid (HNW), mendukung dan mendoakan niat biker Lilik Gunawan bersama timnya yang bertekad menempuh perjalanan darat menggunakan sepeda motor dari Jakarta ke Mekkah untuk menunaikan ibadah haji tahun 2022.

Hal tersebut disampikan HNW saat menerima kunjungan Lilik Gunawan, seorang biker, di ruang kerjanya, di Gedung Nusantara III, Lantai 9, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (23/5/2022).

Dalam pertemuan tersebut, Lilik menceritakan bahwa kegiatannya berpetualang ke Arab Saudi pernah dilakukannya pada tahun 2019 bersama anaknya yang berusia 4 tahun. Perjalanan darat Arab Saudi menggunakan sepeda motor dari Jambi ke Arab Saudi memakan waktu delapan bulan. Perjalanan itu sukses, dan Mekkah dia menunaikan ibadah umroh.

"Dari keberhasilan itu, kami rencana akan

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

mengulanginya untuk beribadah haji. Kali ini, saya akan melakukan bersama tim sekitar 17 sepeda motor. Jika visa cepat selesai, kami langsung berangkat pekan depan dari Jakarta menuju Mekkah. Maka dari itulah, kami mendatangi Bapak HNW di gedung rakyat ini untuk minta dukungan dan doa," ungkap Lilik.

Pimpinan MPR dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini sangat mengagumi gairah beribadah Lilik sampai harus bertekad melakukan perjalanan darat, tentu akan menempuh berbagai medan berat, menemui banyak kesulitan dan kendala selama menempuh perjalanan yang akan melintasi banyak Negara itu.

Menurut HNW, perjalanan darat untuk berhaji memang banyak dilakukan umat Islam berbagai Negara, terutama di seputar Arab Saudi. Di Indonesia ada, namun masih sedikit jumlahnya mengingat jaraknya yang sangat jauh dan tingkat kesulitan tinggi.

"Kegiatan tersebut memiliki sisi positif untuk bangsa, yakni bisa memperkenalkan Indonesia kepada banyak warga dunia. Seperti dilakukan Lilik, pasti beliau banyak singgah, menginap sementara di kota-kota atau desa-desa sepanjang jalur. Dan, sudah pasti ada interaksi di situ, yang kemudian dijadikan kesempatan untuk memperkenalkan Indonesia," katanya.

Satu lagi yang diapresiasi HNW adalah, sebagai rakyat Lilik mendatangi gedung rakyat (MPR), berarti dia mempercayai MPR untuk menjadi bagian dari kegiatannya. "Ini membuktikan bahwa rakyat sudah tidak canggung lagi, sebab ini adalah rumah rakyat, rumah kebangsaan. Di sinilah tempat kita semua berbagi dan saling mengisi" tambahnya.

HNW berharap, perjalanan Lilik dan tim bisa terealisasi. "Dan, jika berhasil masuk Arab Saudi kemudian melakukan ibadah haji, saya titip doa untuk bangsa, Negara, dan rakyat Indonesia agar selalu dilindungi Allah SWT. Semoga bangsa ini bisa segera terbebas dari kesulitan, terutama dari pandemi Covid-19 dan Indonesia bisa bangkit kembali," tandasnya. ❑

DER

Pelantikan Anggota MPR RI PAW

Bamsoet Ajak Rawat Nilai-Nilai Pancasila

Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo, menegaskan, sabuk pengamanan ketahanan nasional bersumber dari kemampuan kita merawat nilai-nilai Pancasila di jantung masyarakat. Sedangkan titik kerawanan nasional ditimbulkan oleh tergerusnya nilai-nilai Pancasila dalam hampir seluruh ranah pembangunan.

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

KETUA MPR RI, Bambang Soesatyo, Selasa (17/5/2022), melantik Siti Nurizka Puteri Jaya dari Fraksi Partai Gerindra sebagai anggota MPR RI Pergantian Antar Waktu (PAW) di kompleks Parlemen, Senayan Jakarta. Sebelumnya, Siti Nurizka juga dilantik sebagai anggota DPR RI PAW dan ditempatkan oleh Fraksi Partai Gerindra sebagai anggota Koisi III DPR RI.

Bamsoet, sapaan Bambang Soesatyo, dalam sambutannya menuturkan, dana pemudik pada tahun ini diperkirakan mencapai Rp 258 triliun, tiga kali lipat dibanding sebelum pandemi Covid-19 tahun 2019. Daya ungkitnya dalam menggerakkan ekonomi daerah luar biasa. Mendongkrak penjualan makanan dan minuman, okupansi penginapan, kunjungan ke mal dan pusat perbelanjaan, serta menggairahkan pariwisata. Selain juga terdistribusi membantu sanak saudara. Sehingga perekonomian berputar lebih merata dan mendatangkan momentum pertumbuhan lebih berkualitas.

"Berkat kerja keras seluruh pihak, akhirnya penyebaran Covid-19 mulai melandai. Kita tengah bersiap memasuki masa transisi menuju endemi. Umat Islam juga dapat merayakan Idul Fitri dan mudik dengan penuh suka cita. Perekonomian pada saat mudik bisa menjadi inspirasi menata ulang perekonomian nasional yang sedang mengalami perputaran balik setelah mengalami resesi akibat pandemi Covid-19. Kekuatan ekonomi di pusat-pusat pertumbuhan ditransformasikan menjadi modal produktif untuk mengembangkan ekonomi pedesaan yang dapat memberdayakan rakyat," ujar Bamsoet

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini juga mengingatkan agar semua pihak tetap waspada menghadapi situasi dan kondisi perekonomian yang masih penuh tantangan. Data Badan Pusat Statistik menujukkan inflasi hingga April 2022 mencapai 2,15%, meningkat hampir empat

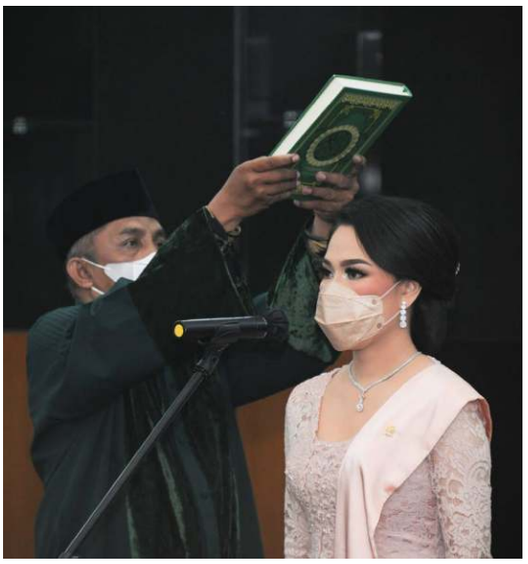

kali lipat dibanding inflasi periode yang sama pada tahun sebelumnya yang hanya mencapai 0,58%. Kenaikan inflasi tersebut salah satunya dipicu kenaikan komoditas energi dan bahan makanan yang masing-masing mencapai 3,91% dan 4,01%.

"Inflasi ibarat lubang hitam yang siap menelan kesejahteraan. Inflasi yang tinggi menjadikan nilai uang yang dihasilkan dengan susah payah oleh para pekerja tidak lagi berarti, karena ketika dibelanjakan nilainya merosot meskipun secara nominal bertambah. Sebagai negara yang ditopang kekuatan konsumsi yang berkontribusi pada 54,4% dalam PDB, Indonesia membutuhkan pengendalian inflasi yang baik untuk memastikan pertumbuhan ekonomi secara optimal," tandas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini menjelaskan, upaya mengendalikan inflasi akan terus dibayangi gejolak global. Belum meredanya konflik di Ukraina, serta diikuti gejolak komoditas energi, pangan dan mineral global memberikan tekanan lebih besar pada perekonomian global.

"Sebagai negara net importir migas, Indonesia perlu berhati-hati, terutama di triwulan keempat, ketika negara-negara utara menghadapi musim dingin sehingga terjadi peningkatan permintaan komoditas energi, khususnya minyak dan gas alam. Peningkatan harga migas, akan memicu kenaikan harga komoditas turunan seperti batubara, CPO, dan lain-lain," jelas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila dan Wakil Ketua Umum FKPPI/Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menekankan, semua pihak dapat memetik pelajaran yang sangat berharga dari pandemi Covid-19 dan krisis global lainnya, bahwa krisis senantiasa berwajah ganda. Di balik kegelapan dan penderitaan yang ditimbulkan, krisis juga menunjukkan cahaya kekuatan umat manusia. Krisis bisa membantu mengenali kesejatian dan pencapaian pembangunan. Seberapa kuat ketahanan nasional, seberapa tinggi mutu peradaban, serta seberapa dalam pembudayaan nilai Pacasila kita.

"Dengan kata lain, sabuk pengamanan ketahanan nasional bersumber dari kemampuan kita merawat nilai-nilai Pancasila di jantung masyarakat. Sedangkan titik kerawanan nasional ditimbulkan oleh tergerusnya nilai-nilai Pancasila dalam hampir seluruh ranah pembangunan," pungkas Bamsoet. ❑

Nobar Film 'Cinta Subuh'

Zulkifli Hasan Ajak Masyarakat Dukung Industri Kreatif Tanah Air

Sebagai orang beragama, film 'Cinta Subuh' menyampaikan pesan bagaimana menghadapi kehidupan yang semakin mengglobal yang penuh dengan berbagai tantangan," kata Wakil Ketua MPR Zulkifli Hasan.

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

TAYANG perdana di bioskop-bioskop di Jakarta, film 'Cinta Subuh' mendapat perhatian dari Wakil Ketua MPR Zulkifli Hasan. Didampingi penulis naskah, produser, artis pendukung, dan organisasi kaum perempuan, Zulkifli Hasan nonton bareng 'Cinta Subuh' di XXI, Senayan City, Jakarta, 23 Mei 2022.

Film yang dibintangi oleh Roger Danuarta dan Cut Meyriska itu, menurut Zulkifli Hasan tidak hanya sekedar hiburan, namun juga memiliki pesan religi yang dalam. "Misalnya, kalau kamu mencintaiku, bisa nggak kamu salat subuh", ujar pria yang saat ini menjabat Ketua Umum PAN itu.

Menurut Zulkifli Hasan, bangun tidur untuk melakukan salat subuh bagi orang yang tidak biasa merupakan hal yang sulit, berat, dan susah. Perlu usaha yang kuat untuk bisa melakukan itu, namun bagi orang yang sudah terbiasa bangun pagi untuk salat subuh adalah sesuatu yang tidak memberatkan.

Orang yang biasa bangun pagi, menurut pria asal Lampung, itu akan membuat dirinya menjadi sosok yang tangguh, memiliki daya juang, dan bisa mengendalikan diri. Bangun pagi, subuh, menurut Zulkifli Hasan, sebagai sarana yang baik untuk mendidik anak agar mereka menjadi disiplin. "Banyak kesempatan dan peluang yang kita dapat bila kita bangun lebih awal," tuturnya.

Tak hanya itu yang disampaikan dalam film produksi Falcon Pictures. Sebagai orang yang beragama, film ini menyampaikan pesan bagaimana kita menghadapi kehidupan yang semakin mengglobal yang penuh dengan berbagai tantangan.

Kehadiran Zulkiflli Hasan di sana sebagai bentuk dukungan kepada industri kreatif di tanah air. Di tengah semakin melonggarnya protokol kesehatan, industri kreatif di tanah air pun semakin menggeliat dan bangkit.

Industri kreatif di tanah air, menurut Zulkifli Hasan, cukup beragam. Selain film yang ditonton pada hari itu, juga ada sepatu, pakaian, tas, dan berbagai produk lainnya. "Ayo kita dukung bareng-bareng industri kreatif di tanah air agar bisa berkembang dengan baik", tegasnya. "Salah satu bentuk dukungan kepada industri kreatif, ya kita tonton Cinta Subuh ini", tambahnya.

Dia optimistis, industri kreatif di tanah air akan semakin berkembang. Ukurannya, menurut Zulkifli Hasan, adalah semakin banyak anak muda yang suka dengan produk lokal. "Sekarang banyak orang memakai sepatu, tas, pakaian, dan yang lainnya made in Indonesia", paparnya. ❑

Kebanggaan Terhadap Produk Lokal

Bagian dari Upaya Membangun Kemandirian Bangsa

Dukungan terhadap Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia harus konsisten dan meluas agar produk negeri sendiri mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Meningkatkan kecintaan terhadap produk dalam negeri merupakan bagian dari upaya membangun kemandirian bangsa.

GERAKAN Nasional Bangga Buatan Indonesia ini harus terus digaungkan dan menjadi fokus perhatian kita agar dorongan peningkatan kinerja perekonomian nasional terus terjadi," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, dalam keterangan tertulisnya, Selasa (24/5/2022).

Sejak diluncurkan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) pada 14 Mei 2020, tercatat sebanyak 17,2 juta usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) masuk market place dan memasarkan produknya secara daring pada 2021. Angka tersebut merupakan 57% dari 30 juta UMKM yang ditargetkan memanfaatkan market place pada tahun 2023.

Menurut Lestari, target menghubungkan sektor UMKM dengan market place agar bisa memasarkan produknya secara daring merupakan langkah yang strategis dari sisi pembukaan seluas-luasnya pasar bagi produk-produk UMKM lokal.

Namun, ujar Rerie, sapaan Lestari, jauh lebih penting mendorong agar jumlah transaksi produk-produk dalam negeri di market place itu konsisten meningkat.

Jadi, tegas Rerie, selain memperluas pasar, peningkatan kualitas produk dan keinginan untuk membeli produk dalam negeri merupakan langkah penting agar produk-produk lokal dari UMKM dicintai masyarakat.

Para pelaku UMKM, ujar Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, harus konsisten mendapat penguatan untuk peningkatan kualitas produk agar terus mampu bersaing di pasaran.

Sementara masyarakat sebagai konsumen, jelas Rerie, harus secara konsisten mendapatkan edukasi pentingnya menggunakan produk-produk lokal dalam aktivitas keseharian.

Secara nasional, tegas Rerie, Gerakan Bangga Buatan Indonesia merupakan langkah strategis dalam upaya mewujudkan kemandirian bangsa.

Di tengah banyaknya perubahan di sektor politik dan ekonomi yang terjadi di tingkat global, tambahnya, membangun kemandirian bangsa harus menjadi salah satu langkah yang dikedepankan dalam pembangunan negeri ini. ❏

Kunker Syarief Hasan Jawa Timur

Jadikan Tahun Politik 2024 Ajang Berjuang untuk Kepentingan Rakyat

Tahun politik 2024 semakin dekat. Syarief Hasan berharap semua berjuang untuk dan hanya kepentingan rakyat

WAKIL Ketua MPR, Prof. Dr. Sjarifuddin Hasan, MM., MBA., mengingatkan rakyat Indonesia bahwa tahun politik 2024 semakin dekat. Bahkan, sekarang ini nuansanya sudah sangat terasa dengan makin gencarnya seluruh partai politik mempersiapkan diri sebaik-baiknya.

Berbagai teknik, strategi, dan metode digunakan partai politik untuk mengikuti, berkompetisi dan meraih suara sebanyak-banyaknya dalam pesta demokrasi lima tahun sekali tersebut.

"Hal itu adalah wajar, yang saya harapkan adalah agar perjuangan yang dilakukan seluruh parpol memiliki satu tujuan bersama, yakni demi kepentingan rakyat Indonesia secara keseluruhan," katanya usai mengikuti acara Retreat Partai Demokrat di Aula Gedung Museum dan Galeri SBY ANI, Pacitan, Jawa Timur, Selasa (17/5/2022).

Pimpinan MPR dari Partai Demokrat ini menegaskan bahwa warna, logo, atribut parpol, boleh berbeda, namun perbedaan itu tidak lantas membuat bangsa ini menjadi terpecah belah, melainkan justru semakin memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.

"Satu lagi yang harus disyukuri adalah, Pemilu 2024 berjalan sesuai jadwal yang sudah disepakati bersama dan tertuang secara jelas dalam konstitusi kita. Saya rasa, itu adalah bentuk penghormatan seluruh elemen bangsa kepada konstitusi dan akan menjadi pembelajaran yang baik buat generasi mendatang," ujar Profesor Bidang Ilmu Strategi Manajemen Koperasi dan UMKM ini.

Syarief Hasan menekankan, pembelajaran politik yang baik untuk generasi muda adalah faktor penentu kedewasaan politik Indonesia di masa depan. Suksesnya penyelenggaraan dan sehatnya kompetisi pada Pemilu 2024, menurut Syarief, akan terekam secara kuat dan menjadi teladan bagi generasi milenials.

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

"Untuk itu, saya mengajak seluruh parpol dan penyelenggara pemilu untuk menjadikan tahun politik 2024 sebagai ajang kompetisi yang saling menghargai, menghormati, dan penuh toleransi," kata Syarief Hasan.

Kepada rakyat Indonesia, Syarief Hasan

berharap, agar berperan aktif mendukung penuh pesta demokrasi 2024. “Pilihlah parpol sesuai nurani masing-masing dengan tetap menjaga persatuan bangsa,” tandasnya.

Melihat Potensi Pantai Watu Bale Pacitan

Dalam rangkaian kunjungan kerjanya di Pacitan, Jawa Timur, Rabu (18/5/2022), Syarief Hasan didampingi istri, Inggrid Kansil, berkesempatan mengunjungi objek wisata kebanggaan masyarakat Pacitan, yakni Pantai Watu Bale di Desa Jetak, Kecamatan Tulakan, Kabupaten Pacitan.

Wakil Ketua MPR RI ini menikmati keindahan objek wisata Pantai Watu Bale sambil berjalan mengelilingi area wisata pantai seraya melepaskan pandangannya ke laut. Objek wisata ini dikelola oleh pemerintah desa setempat mulai tahun 2017.

“Objek wisata ini sangat bagus dan menarik. Akses masuk pun sudah tertata rapi sehingga memudahkan pengunjung datang ke sana. Laut, batu karang serta deburan ombak yang besar sangat memanjakan mata. Saya rasa dengan keindahan dan keunikan yang dimiliki pantai Watu Bale bisa mendunia dan banyak dikunjungi wisatawan,” katanya.

Pantai Watu Bale memang sangat indah dan memiliki keunikan tersendiri. Antara lain, pantai ini tidak berpasir tetapi merupakan tebing cukup tinggi, yang berbatasan langsung dengan laut selatan, atau dikenal dengan istilah tanjung berbukit.

Lalu, keberadaan batu karang raksasa yang mirip ‘bale’. Bale berasal dari bahasa Jawa yang artinya balai atau tempat untuk istirahat. Karena balai ini menjadi ikon dan ciri khas maka destinasi wisata ini dinamakan Pantai Watu Bale.

“Untuk menuju batu karang tersebut, pengunjung harus melewati jembatan gantung yang di bawahnya tampak deburan ombak besar datang tak ada henti-hentinya, bak ingin memecah batu karang. Saya pikir, penyuka adrenalin tinggi tentu akan sangat menikmati tantangan ini,” ujar Syarief Hasan.

Selama penelusurannya di area pantai, Syarief Hasan meninjau lapak-lapak dagangan UMKM milik masyarakat sekitar. Dagangannya sangat beragam, mulai dari berbagai macam kuliner, kerajinan batik, dan bermacam souvenir. Dengan dibantu istrinya, Menteri Negara Koperasi dan UMKM RI di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini membeli beberapa carik kain batik.

Melihat potensi besar yang dimiliki Pantai Watu Bale Pacitan sebagai salah satu tujuan wisata, baik domestik maupun mancanegara, Syarief Hasan meminta agar rakyat dan Pemerintah Daerah Pacitan menjaga serta mengelolanya dengan baik.

“Jika ini terjaga dan diurus secara profesional maka dampaknya akan sangat baik, yakni meningkatkan pendapatan daerah dan taraf hidup rakyat akan semakin naik,” pungkasnya. ❑

DER

Penyelenggaraan PTM 100%

Harus Kedepankan Faktor Kebersihan Lingkungan dan Kesehatan

Pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) 100% harus mempertimbangkan juga ancaman penularan penyakit selain Covid-19. Aspek kebersihan lingkungan sekolah dan kesehatan siswa secara luas harus menjadi perhatian dalam proses belajar mengajar.

DENGAN level PPKM di banyak daerah yang semakin rendah, penyelenggaraan PTM 100% di berbagai daerah pun sudah diterapkan. Munculnya indikasi kasus hepatitis akut yang menyerang anak-anak harus menjadi perhatian serius para pemangku kepentingan dalam penerapan PTM 100%," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, dalam keterangan tertulisnya, Jumat (13/5/22).

Surat Keputusan Bersama atau SKB 4 Menteri (Mendikbudristek, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri) tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19 turut mengatur pembelajaran tatap muka atau PTM 100%.

Dalam SKB 4 Menteri tentang PTM itu pada penyelenggaraan PTM dilaksanakan berdasarkan level pembatasan penyelenggaraan kegiatan masyarakat (PPKM) yang ditetapkan pemerintah pusat dan capaian vaksinasi Covid-19 pendidik dan tenaga kependidikan, serta warga masyarakat lanjut usia (lansia).

Menurut Lestari, dengan munculnya sejumlah indikasi kasus hepatitis akut yang menyerang anak-anak di sejumlah daerah, penyelenggaraan PTM 100% harus mempertimbangkan faktor kesehatan secara luas.

Rerie, sapaan akrab Lestari, menilai, sejumlah faktor pendukung untuk memastikan keamanan para pendidik dan peserta didik dari penularan sejumlah penyakit saat PTM 100% harus menjadi perhatian serius.

Menurut anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu, sosialisasi masif untuk membiasakan masyarakat, pendidik dan peserta didik hidup bersih dan sehat harus konsisten dilakukan.

Upaya pencegahan penularan sejumlah penyakit lewat membudayakan kebiasaan hidup sehat di tengah masyarakat, ujar Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, harus menjadi program nasional untuk mencegah berulangnya penyebaran sejumlah penyakit di tanah air.

Munculnya indikasi penyebaran penyakit pasca pandemi Covid-19, ujar Rerie, harus menjadi bahan evaluasi terhadap sejumlah upaya pemerintah dalam peningkatan kualitas kesehatan masyarakat selama ini.

Rerie sangat berharap berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat sejak dini harus dilakukan secara masif dan konsisten lewat sosialisasi kebiasaan hidup sehat dan program pemantauan kesehatan dan tambahan gizi sejak balita.

Menghidupkan kembali berbagai kegiatan pos layanan terpadu (Posyandu) di setiap RW dan desa untuk memantau kesehatan setiap balita, menurut Rerie, bisa menjadi salah satu cara untuk memperkuat kembali sejumlah faktor pendukung untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. ❑

Kunjungan DPP FUHAB

HNW Ingatkan Kaitan Antara Agama dan Negara

Dalam perjuangan menghadirkan Indonesia Merdeka bersama Bapak-Bapak Bangsa, juga ada peran Ulama dan Habaib di sana.

WAKIL Ketua MPR RI, Dr. H.M. Hidayat Nur Wahid, MA., menerima kunjungan Dewan Pengurus Pusat Forum Ulama dan Habaib (FUHAB) pimpinan K.H. M. Lutfi Zawawi dan Habib Abdullah bin Husin Al-Attas. Kunjungan dilakukan dalam rangka silaturahim, halal bi halal, dan menyampaikan aspirasi. HNW, sapaan akrab Hidayat Nur Wahid, mengapresiasi kunjungan tersebut sebagai bukti adanya pertalian erat antara unsur keumatan dengan unsur kebangsaan.

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

"Kedatangan para Ulama dan Habaib ke ruang kerja kami di MPRRI menegaskan kembali bahwa Indonesia sejak dulu merupakan kebersamaan antara pimpinan bangsa dan para Ulama dan Habaib, sehingga seharusnya selalu dijaga, dan tidak dipecah-belah. Misalnya, dengan narasi yang memisahkan antara identitas kebangsaan dengan identitas keagamaan," ujar Hidayat usai menerima kunjungan FUHAB di ruang kerja Wakil Ketua MPR-RI, Selasa (24/5/2022).

Karenanya, HNW juga menyambut baik dan siap hadir memenuhi undangan kegiatan Latihan Dasar Kepemimpinan yang akan diselenggarakan oleh FUHAB kepada para Ulama dan Habaib se-Indonesia. Apalagi yang diminta oleh Fuhab adalah agar dilakukan sosialisasi Empat Pilar MPR RI yang menandakan keinginan kuat dari FUHAB agar para kader dan pimpinan Ulama dan Habaib semakin memahami dan mencintai Empat Pilar MPR-RI yaitu ; Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.

"Dalam perjuangan hadirkan Indonesia Merdeka, bersama para Bapak Bangsa lainnya, di sana juga ada peran Ulama dan Habaib. Mereka berjihad, ijtihad, mujahadah, tadhiyyah(berkorban) dan berikan hadiah berupa kesepakatan Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara, UUD NRI Tahun 1945 sebagai konstitusi negara, NKRI sebagai bentuk Negara, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan Negara. Mereka menciptakan lagu perjuangan "Indonesia Merdeka" yang diciptakan oleh seorang Habaib, yakni Habib Husein Mutahar, mengeluarkan Fatwa dan Amanat Jihad untuk selamatkan Indonesia Merdeka, juga bersama TNI selamatkan Indonesia dari pemberontakan oleh PKI," lanjutnya.

Wakil Ketua Majelis Syura PKS ini mendukung para Ulama dan Habaib yang sudah berhimpun dalam wadah organisasi seperti FUHAB, untuk semakin aktif mengkaji dan menjelaskan fakta menyejarah soal keterkaitan antara keislaman dengan keindonesiaan tersebut kepada umat dan bangsa.

"Jangan sampai perjalanan sejarah bangsa dibelokkan sehingga terjadilah Indonesiaphobia, karena umat mengira bahwa Indonesia adalah negara pemberian penjajah yang sekuler dan di sana tidak ada peran Ulama dan Habaib, sehingga layaknya hanya dijauhi atau dimusuhi oleh umat," sambungnya.

Namun, ia juga mengingatkan agar tidak terjadi Islamophobia, salah paham tentang Islam dan umat Islam di Indonesia, karena mengira Ulama, Habaib dan umat Islam hanya layak dicurigai dan tidak diberi peran berarti. Ada anggapan Ulama, Habaib, dan Umat Islam tidak mempunyai peran penting dalam perjuangan hadirkan dan selamatkan negara Indonesia Merdeka. "Padahal bersama seluruh komponen pejuang bangsa, Ulama, Habaib, dan Umat sudah banyak berkontribusi dan berjasa untuk Indonesia," ungkapnya.

"Inilah pentingnya kita jalin bersama, baik yang berkecimpung di dunia politik seperti DPR,MPR, maupun di kemasyarakatan seperti FUHAB, agar terus mengingatkan umat dan bangsa, aparatur dan rakyat, agar bisa lanjutkan dan jaga warisan perjuangan kebersamaan dan para Ulama dan Habaib pendiri dan penyelamat bangsa dan NKRI. Agar NKRI dapat selamat dan maju sejahtera hingga dapat dibanggakan saat diwariskan kepada generasi-generasi berikutnya," pungkasnya. ❑

FGD Nilai-nilai Keindonesiaan

Nilai Keindonesiaan Harus Diimplementasikan sebagai Cara Hidup Keseharian

Nilai-nilai keindonesiaan harus diimplementasikan sebagai cara hidup. Karena melalui nilai-nilai itu, Indonesia mampu bangkit dari setiap krisis dan tantangan yang dihadapi.

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

BICARA tentang nilai-nilai baik dari bangsa ini, kita bisa gali kembali pikiran-pikiran besar para pendiri bangsa seperti yang tercetus pada peristiwa Kebangkitan Nasional 1908 dan Sumpah Pemuda 1928," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, saat membuka Focus Group Discussion (FGD) yang digelar bersama MPR RI, Forum Diskusi Denpasar 12, dan Nenilai secara hybrid

FGD bertema: 'Nilai-nilai Baik untuk Indonesia Bangkit; Sebuah Renungan Kebangkitan Nasional" berlansung di ruang Delegasi, gedung MPR/DPR Senayan, Jakarta, Rabu (18/5). Hadir dalam diskusi tersebut Dr. Richard Barrett (Founder/Managing Director, Barrett Academy for The Advancement of Human Values), Uli Silalahi (Chair Women20), dan Yudi Latif MA, Ph.D., (pakar Aliansi Kebangsaan) sebagai narasumber.

Selain itu juga hadir Yulio S. Bulo (Direktur Operasional Pertamina Foundation), Najeela Shihab (pendiri Sekolah Cikal dan Sekolah.mu), Tita Djumaryo (pendiri Ganara Art - Mari Berbagi Seni dan Pengurus Koalisi Seni Indonesia), Maria Kresentia (Direktur SPAK - Saya Perempuan Anti Korupsi), Endang Suraningsih (Srikandi BUMN dan Direktur SDM Food ID), Niko Chandra (Kepala Divisi Institutional Relations, Mind ID), Politisi Partai NasDem, Prof Bachtiar Aly, dan Dr. Muhammad Rahmat Yananda (Ketua Ikatan Alumni Universitas Indonesia) sebagai penanggap.

Menurut Lestari, bangsa ini harus memahami apa yang akan dilakukan dan didalami terhadap nilai-nilai yang dimiliki. Apalagi, ujar Rerie, sapaan akrab Lestari, Indonesia hari ini tidak hanya berhadapan dengan tantangan infiltrasi ideology, tetapi juga berhadapan dengan nilai yang mereduksi kekayaan nilai pada sikap skeptis dan pesimistis.

Sebagai sebuah entitas dengan keberagaman, Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu menilai, Indonesia memiliki filosofi kehidupan berbangsa yang bersumber dari Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, tata aturan lain yang menjamin keutuhan kehidupan berbangsa berbasis pada rasa kesatuan, nasionalisme yang utuh sejak digaungkan tahun 1908.

Founder/Managing Director, Barrett Academy for The Advancement of Human Values, Richard Barrett mengungkapkan, kesejahteraan personal akan membentuk kesejahteraan nasional. Indonesia, menurut Richard, mempunyai modal sosial yang baik untuk menuju kesejahteraan lewat nilai-nilai gotong-royong yang dimiliki.

Pakar Aliansi Kebangsaan, Yudi Latif, menilai, di tengah terjadinya banyak perubahan yang berdampak keterpurukan saat ini banyak alasan kita untuk bangkit. Dari mana kita mulai untuk bangkit, menurut Yudi, dimulai dari pembangunan nilai-nilai yang kita miliki, seperti budi pekerti.

Budi pekerti, tambahnya, adalah perpaduan dari budi yang mengandung nilai budaya dan pekerti yang merupakan daya dan tenaga. Lewat perpaduan pengembangan kedua nilai itu kita bisa menuju kesejahteraan.

Chair Women20, Uli Silalahi, berpendapat, peran perempuan menjadi kunci penanaman nilai-nilai baik kepada keluarga. Besarnya dampak yang dilakukan perempuan itu, tambah Uli, maka perempuan butuh pemberdayaan agar mampu menanamkan nilai-nilai secara baik terhadap lingkungannya.

Pemberdayaan perempuan, jelas Uli, kunci dalam keberhasilan pembangunan di masa datang.

Dunia digital, ujar Uli, bisa mendorong percepatan pemahaman nilai-nilai yang kita miliki.

Direktur Operasional Pertamina Foundation, Yulio S. Bulo, tertarik dengan pendapat Barret yang mengungkapkan, pembangunan kesejahteraan sosial satu negara harus dimulai dari keluarga. Menurut Yulio, kalau proses penanaman nilai-nilai dimulai dari rumah, orang tua harus memiliki tingkat intelektual yang baik atau dari kalangan terpelajar.

Yulio menilai, era digital berpotensi membuat generasi muda terkungkung dengan nilai-nilai yang disukainya saja akibat pengaturan algoritma sosial media yang dimilikinya. Sehingga, tambahnya, perlu upaya lebih intens untuk menanamkan nilai-nilai baru kepada generasi muda lewat cara-cara yang lebih terukur.

Pendiri Sekolah Cikal, Najeela Shihab, menilai, ada miskonsepsi dalam menetapkan satu cita-cita, sehingga perlu sikap kritis dalam prosesnya agar mendapatkan pemahaman yang sama terhadap tujuan atau nilai-nilai yang ditetapkan bersama.

Najeela berpendapat penting untuk menetapkan kesuksesan kolektif, sehingga penetapan nilai-nilai tidak untuk anak tertentu saja, sehingga harus ada keteladanan kolektif. "Transfer pengetahuan tentang nilai-nilai dalam konteks yang lebih luas menjadi bagian penting bagi sektor pendidikan," ujar Najeela.

Pendiri Ganara Art, Tita Djumaryo, berpendapat, melalui pendidikan seni bisa memberikan kemampuan kritis dan inklusi sosial kepada generasi muda. Sehingga, jelas Tita, terjadi penanaman nilai-nilai lewat budaya kepada para pemuda.

Dengan begitu, tambahnya, para pemuda memiliki kesempatan juga untuk menyebarkan nilai-nilai yang kita miliki, seperti keberagaman dan berpikir kritis. Diharapkan seni bisa menjadi media untuk penanaman nilai-nilai keindonesiaan di kalangan generasi muda.

Direktur SPAK, Maria Kresentia, mengungkapkan bahwa korupsi dekat sekali dengan keseharian kita. Karena itu, tambahnya, nilai-nilai antikorupsi harus ditanamkan sejak dini lewat permainan yang menyenangkan. Dengan permainan itu, ujar Maria, komunitasnya menyampaikan nilai-nilai antikorupsi kepada keluarga dan masyarakat. Karena, menurut Maria, tindak korupsi merupakan awal dari pelanggaran terhadap nilai-nilai. Sehingga penting untuk menanamkan nilai-nilai antikorupsi pada kelompok usia dini hingga orang dewasa.

Direktur SDM Food ID, Endang Suraningsih, menilai, keberagaman merupakan nilai-nilai yang kita miliki.

Menurut Endang, pelangi itu indah karena berwarna-warni. Perbedaan itu bukan untuk diperbandingkan, tapi untuk disandingkan agar memperlihatkan keindahan.

Keberagaman atau gender diversity di lingkungan BUMN, ujar Endang, memberi dampak positif terhadap perkembangan bisnis. Menurut Kepala Divisi Institutional Relations, Mind ID, Niko Chandra, membicarakan nilai-nilai sangat terkait dengan pengembangan entitas bisnis

Perusahaan dengan corporate value, jelas Niko, memiliki peluang tumbuh dua kali lebih besar dari yang tidak menerapkan nilai-nilai tertentu.

Politisi Partai NasDem, Prof Bachtiar Aly berpendapat modal sosial yang kita miliki harus terus digaungkan kembali bagaimana kita bicara lebih santun, membangun gotong-royong dan keberagaman.

Tingkat kemarahan masyarakat yang tinggi saat ini, ujar Bachtiar, harus dijawab dengan membuka ruang seluas-luasnya untuk menyampaikan pendapat di ruang publik.

Ketua Ikatan Alumni Universitas Indonesia, Muhammad Rahmat Yananda berpendapat, nilai-nilai kebhinekaan dapat diaktualisasikan dalam keseharian.

"Apakah keberagaman kita membawa suatu kebaruan atau kemajuan, itu yang menjadi tantangan sekarang," ujar Muhammad.

Jurnalis senior, Saur Hutabarat menegaskan soal besar yang kita hadapi saat ini adalah mengakhiri kontradiksi yang ada dari jerat nilai-nilai yang kita miliki.

"Bagaimana dengan modal sosial yang begitu besar bisa terjadi berbagai korupsi di negeri ini?" ujar Saur.

Untuk mengakhiri kondisi ini, Saur menegaskan, harus diwujudkan perluasan keteladanan kolektif terhadap nilai-nilai keindonesiaan yang kita miliki. ❑

H. Bambang Soesatyo, SE., MBA.
Ketua MPR RI

Upaya Berkelanjutan untuk Maksimalkan Nilai Tambah SDA

MEMAKSIMALKAN nilai tambah sumber daya alam (SDA) yang terkandung di perut bumi nusantara menuntut kerja keras berkelanjutan. Urgensi pemanfaatan energi terbarukan sebagai tuntutan terkini menjadi momentum mewujudkan kerja keras itu. Sebab, dengan SDA berlimpah, komunitas global mengandalkan Indonesia sebagai salah satu kontributor utama energi terbarukan.

Kerja keras itulah yang telah dilakukan Presiden Joko Widodo dan para menteri ketika melakukan kunjungan kerja ke Amerika Serikat (AS) baru-baru ini. Baik di forum konferensi tingkat tinggi (KTT) ASEAN- AS, maupun dalam pertemuan Presiden dengan CEO Tesla yang juga pendiri SpaceX, ELon Musk, presiden dan para menteri konsisten mempromosikan potensi SDA Indonesia yang menjadi sumber energi terbarukan. Patut untuk diakui bahwa kunjungan kerja presiden bersama para menteri ke AS pada 11-13 Mei 2022 itu terbilang produktif.

Di forum KTT ASEAN-AS, ada dua poin yang menggambarkan produktivitas Indonesia. Poin pertama yang sudah pasti digarisbawahi oleh komunitas global adalah pernyataan sikap dan seruan tentang perlunya upaya bersama mewujudkan stabilitas dunia dan mengakhiri ketidakpastian. Presiden Joko Widodo menyerukan agar perang di Ukraina segera dihentikan.

Tak hanya menyebabkan tragedi kemanusiaan, perang itu nyata-nyata telah memperburuk perekonomian dunia. Harga pangan dan harga energi naik yang menyebabkan inflasi terdongkrak. Pernyataan Presiden RI itu merefleksikan sekaligus menyuarakan hati nurani komunitas global yang menentang perang.

Poin kedua menunjukkan kerja pemerintah mempromosikan potensi investasi di Indonesia. Dalam forum yang juga dihadiri para pemimpin bisnis di AS, pemerintah mempresentasikan kekayaan alam nusantara yang berlimpah untuk bahan baku industri serta penyediaan energi hijau.

Indonesia kini tercatat sebagai penghasil besi baja stainless terbesar nomor dua di dunia. Tahap transformasi terkini akan diikuti dengan barang-barang tambang, seperti tembaga dan bauksit untuk aluminium. Seperti diketahui bersama, aluminium akan menjadi tulang punggung industri energi baru dan terbarukan, termasuk baterai litium dan mobil listrik.

Sudah barang tentu pemerintah mengajak pelaku bisnis di AS membangun kemitraan untuk berinvestasi di Indonesia. Ajakan itu ditindaklanjuti dengan terlaksananya pertemuan antara Presiden dengan Elon Musk. Dari pertemuan itu, Elon memberi komitmen investasi dan berencana mengunjungi Indonesia pada November 2022.

Menurut Menteri Investasi dan Kepala BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal), Bahlil Lahadalia, negosiasi dengan Elon Musk sudah mendekati tahap final, dan diproyeksikan mulai berinvestasi membangun pabrik mobil listrik di Indonesia tahun ini. Selain itu, Elon Musk juga tertarik

berinvestasi di ekosistem baterai mobil di tanah air. Rencananya, Tesla akan membangun pabriknya di Kawasan Industri Terpadu Batang di Jawa Tengah.

Apa yang sudah dilakukan pemerintah sejauh ini adalah upaya berkelanjutan untuk memaksimalkan nilai tambah SDA seperti nikel, bauksit, dan tembaga. Belum lagi potensi energi hijau. Potensi pembangkit listrik tenaga hidro sangat besar karena Indonesia memiliki 4.400 sungai. Begitu juga dengan potensi pembangkit listrik tenaga surya dan pembangkit listrik tenaga panas bumi (geothermal). Pembangkit geothermal sangat melimpah dengan potensi mencapai 29 ribu megawatt, namun baru bisa direalisasikan sekitar 2.000 Megawatt.

Selain itu, sudah menjadi pemahaman bersama bahwa barang tambang lain yang kini diincar modal asing adalah nikel dan bijih bauksit. Dua barang tambang ini tersedia dalam jumlah memadai. Cadangan nikel di perut bumi Indonesia mencapai 72 juta ton Ni (nikel). Jumlah ini mencakup 52% dari total cadangan nikel dunia yang volumenya mencapai 139,42 juta ton Ni.

Tentang potensi biji bauksit, Kementerian ESDM mencatat, jumlah sumber daya bijih terukur bauksit di Indonesia mencapai 1,7 miliar ton, dan logam bauksit 640 juta ton. Cadangan terbukti untuk biji bauksit 821 juta ton, dan logam bauksit 299 juta ton. Setelah diolah, biji bauksit menjadi alumina untuk membuat logam aluminium yang pemanfaatannya sangat beragam, seperti komponen atau bahan baku bangunan dan konstruksi, ragam komponen mesin, transportasi, kelistrikan, kemasan dan barang tahan lama lainnya.

Keragaman SDA Indonesia yang berlimpah ini belum digarap dengan maksimal akibat keterbatasan modal dan teknologi. Padahal, ketika nantinya komunitas global merealisasikan kesepakatan untuk tidak lagi menggunakan energi fosil yang polutif, keragaman SDA itu akan sangat dibutuhkan dunia. Itu sebabnya, kegiatan mempromosikan potensi SDA secara berkelanjutan menjadi sangat penting, termasuk mengundang atau mengajak calon-calon investor yang potensial.

Kendati butuh modal besar dan teknologi terkini untuk memaksimalkan nilai tambah semua SDA itu, tidak berarti Indonesia berada di posisi lemah atau mau ditekan oleh modal asing. Kekayaan dan keragaman SDA itu justru memperkuat daya tawar Indonesia. Dengan daya tawar yang kuat, pemerintah tetap mengedepankan kerja sama saling menguntungkan dengan semua calon investor.

Seperti sudah diungkap sebelumnya, pada forum KTT G-20 di Roma, Italia, November 2021, Presiden Joko Widodo menolak menandatangani rancangan dokumen perjanjian rantai pasok (supply chain agreement) atas kandungan SDA di Indonesia. Kandungan SDA yang begitu strategis di perut bumi nusantara itu mendorong sejumlah anggota G-20 ‘merayu’ dan ‘memaksa’ Indonesia menyepakati rancangan perjanjian rantai pasok itu.

Kalau dokumen perjanjian rantai pasok itu ditandatangani, sama artinya Indonesia menyatakan bersedia melepaskan sebagian hak mutlaknya dalam mengelola dan memanfaatkan SDA di bumi nusantara, dan selanjutnya perjanjian itulah yang akan mendikte Indonesia.

Menanggapi kebutuhan dunia akan energi baru dan terbarukan yang bahan bakunya berlimpah di dalam negeri, Presiden Jokowi bersama para menteri telah memulai kerja mempromosikan potensi SDA nusantara, serta mencari dan mengajak para calon investor dari manca negara. Ini adalah proses kerja keras dengan durasi yang sangat panjang.

Demi kesejahteraan seluruh rakyat, kerja keras yang berkelanjutan ini sudah pasti akan dan harus diteruskan oleh generasi muda Indonesia terkini. ❑

Diapresiasi Meski Pertemuan Dini

Dituduh akan mengganggu kinerja kabinet ketika para Ketua Umum Partai Politik yang sekaligus menjabat menteri sibuk menggalang koalisi untuk menuju Pemilu 2024. Harus diakui, mulai saat ini atau bahkan beberapa waktu sebelumnya, para Ketua Umum Partai Politik sudah masif melakukan pertemuan di antara mereka, ada yang empat mata, dan ada pula dengan banyak mata.

Mereka bertemu pastinya untuk menjajagi siapa yang akan diusung menjadi calon presiden yang akan datang. Nah, bagaimana langkah politis mereka, apakah terlalu dini, mengganggu kinerja kabinet, ataukah sah-sah saja dalam dunia demokrasi? Berikut pendapat dari para politisi.

Mardani Ali Sera, Anggota MPR Fraksi PKS

Sehat dalam Dunia Demokrasi

PERTEMUAN para ketua partai politik seperti yang dilakukan oleh Golkar, PPP, dan PAN, merupakan koalisi dini yang bagus dan sehat dalam demokrasi kita. Apalagi jika ada koalisi permanen. Ini lebih menjamin stabilitas demokrasi. Dua tahun bukan waktu yang lama untuk membangun kesamaan. Jadi monggo saja koalisi dibangun.

Meski demikian mereka yang sibuk mengurus koalisi akan mengganggu kinerja kabinet menteri bila pelaksana koalisi adalah para menteri. Untuk itu serahkan pada figur yang lain, sementara menteri biar fokus bekerja. Kalau kita lihat Ketua Umum Golkar dan PPP, yakni Airlangga Hartarto dan Suharso Monoarfa, masih tercatat sebagai menteri pada kabinet Presiden Joko Widodo.

Koalisi yang dibangun oleh partai politik adalah perekat ideal, yang menurut saya adalah ideologis. Ini penting agar visi dan misinya sama dan selaras. Meski demikian tarikan agar dalam Pilpres menang juga sangat kuat dan menjadi salah satu faktor perekat ideologi. Jadi, potensi calon presiden (capres), yang elektabilitas dan popularitasnya tinggi, juga bisa menjadi basis pembangun koalisi.

Meski sudah ada koalisi seperti yang dibangun oleh PPP, Golkar, dan PAN, namun hal demikian menurut saya masih cair, sebab mereka baru mulai bereksperimen. Itu merupakan hal yang wajar. Langkah mereka perlu kita apresiasi sebab menjadi budaya baru yang bagus, tepat, dan benar. Ke depannya jika terbangun koalisi permanen akan menjadi lebih baik.

Dari penjajagan koalisi yang ada kita berharap ada koalisi permanen yang lebih dari dua sehingga akan ada lebih dari dua pasangan capres dan cawapres. Banyaknya pasangan calon capres dan cawapres akan menjadikan demokrasi yang ada menjadi lebih sehat. ❑

AWG

Muhammad Sarmuji, Anggota MPR Fraksi Partai Golkar

Tidak Mengganggu Kinerja Kabinet

MENJELANG Pemilu Presiden (Pilpres) 2024, ketua umum atau petinggi partai politik secara bergelombang melakukan pertemuan di antara mereka. Ada pertemuan yang dilakukan hanya dua partai politik, ada pula yang dilakukan dengan melibatkan banyak partai, tiga partai. Pertemuan tersebut merupakan penjajagan di antara mereka untuk membangun koalisi, Meski demikian pertemuan ketua umum Partai Golkar, PAN, dan PPP, sudah mendeklarasikan membentuk Koalisi Indonesia Bersatu (KIB).

Meski ada yang mengatakan pertemuan para ketua partai politik tersebut dianggap terlalu dini namun mereka sudah satu langkah awal untuk berkomunikasi guna mempersiapkan pemilu yang akan datang. Mereka yang sudah bertemu dan membentuk koalisi, dianggap oleh pengamat politik, koalisi yang ada masih cair, bisa terurai, bisa pula semakin menguat dengan bertambahnya anggota koalisinya.

Menanggapi hal yang demikian, Politisi Partai Golkar Muhammad Sarmuji mengatakan pertemuan antar partai politik itu bagus-bagus saja untuk menyamakan persepsi terhadap arah pembangunan negara. Soal muatannya membangun koalisi dini itu juga bagian dari membangun kesepahaman politik. Koalisi yang kemarin diumumkan *toh* juga belum menentukan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres). Jadi tidak perlu juga disoal karena tujuannya baik.

Lebih lanjut dikatakan sosok yang menjadi Ketua Umum DPD Golkar Jawa Timur itu, secara teknis koalisi itu tidak mengganggu kinerja menteri atau koalisi penerintah yang ada sekarang. Pemimpin politik itu masih terikat komitmen untuk mengawal pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin hingga selesai dan sukses. ❑

AWG

Arah Kebijakan Fiskal Tahun 2023

HNW Memberikan Empat Catatan Kritis

"Kami mencatat ada beberapa kebijakan fiskal Pemerintah yang layak dikritisi, atau mestinya tidak terjadi," ujar Wakil Ketua MPR, Hidayat Nur Wahid.

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

WAKIL Ketua MPR RI dan Anggota Komisi VIII DPR-RI Komisi VIII, Dr. H. M. Hidayat Nur Wahid MA, memberikan catatan kritis terkait arah kebijakan fiskal Pemerintah tahun 2023, khususnya di bidang sosial, bencana, perempuan dan anak yang merupakan ruang lingkup urusan Komisi VIII DPR-RI, Komisi yang dirinya aktif di dalamnya.

"Kami mencatat ada beberapa kebijakan fiskal Pemerintah yang layak dikritisi, atau mestinya tidak terjadi. Di antaranya adalah soal anggaran bantuan sosial untuk anak yatim/piatu, pembangunan data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), belum terlihatnya komitmen anggaran pemerintah dalam hal pooling fund bencana, dan tidak adanya perubahan anggaran signifikan bagi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak," ungkap Hidayat sesudah mengikuti Rapat Paripurna DPR-RI secara daring, Selasa (24/5/2022).

HNWm sapaan akrab Hidayat Nur Wahid, mempertanyakan komitmen Pemerintah untuk membantu anak yatim dan piatu yang telah disepakati oleh Komisi VIII DPR-RI bersama Menteri Sosial pada tahun 2021, dan sudah dilaksanakan dengan baik, dengan sambutan meriah dari para yatim/piatu, termasuk yatim/piatu akibat Covid-19. Tetapi tahun anggaran 2022, yang dibutuhkan sebesar Rp 9,6 Triliun malah tidak masuk di dalam APBN tahun 2022, dan makin disayangkan karena kini juga belum terlihat di dalam pagu indikatif Kementerian Sosial 2023. Juga makin disayangkan menurunnya anggaran untuk program perlindungan sosial.

Di saat yang sama, Pemerintah justru terkesan bermaksud mengubah pendataan untuk program perlindungan sosial melalui pembangunan data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek). HNW mempertanyakan pemindahan data terpadu dari Kementerian Sosial yang tentu akan menimbulkan inefisiensi pelaksanaan program perlindungan sosial.

"Apalagi untuk pembangunan data Regsosek tersebut dibutuhkan anggaran hingga Rp 2 Triliun yang dikelola oleh Bappenas. Daripada menimbulkan kesimpangsiuran dengan sistem pendataan baru, seharusnya Pemerintah fokus memperbaiki DTKS dan anggaran tersebut digunakan untuk realisasi program bantuan yatim / piatu," ujarnya.

Ketua Majelis Syura PKS ini juga menyoroti belum terlihatnya komitmen konkret Pemerintah dalam hal dana bersama penanggulangan bencana. Apalagi bencana di Indonesia masih terus terjadi. Yang terbaru, misalnya, banjir rob di sejumlah kota/kabupaten di pesisir utara Jawa sejak hari Ahad (22/5/2022).

"Di saat yang sama pola penganggaran Dana Siap Pakai BNPB sudah ditetapkan di awal sebesar Rp 1,4 Triliun. Sehingga seharusnya ada sekitar Rp 3 Triliun dari DSP tahun-tahun, sebelumnya sekitar Rp 5 Triliun, yang bisa ditempatkan dalam dana bersama bencana untuk segera melakukan langkah-langkah mitigasi di berbagai tempat rawan bencana di Indonesia," katanya.

Komitmen tersebut juga belum terlihat dalam hal anggaran untuk perlindungan perempuan dan pemberdayaan anak yang diperuntukkan bagi Kementerian PPPA. Tahun 2023, pagu indikatif Kementerian PPPA sebesar Rp 263,4 Miliar hanya meningkat Rp 10 Miliar dari anggaran tahun 2022, dan bahkan berkurang Rp 16 Miliar dari anggaran tahun 2021.

"Kalau Pemerintah dan DPR serius melindungi Perempuan dengan membuat dan melaksanakan UU TPKS yang sudah disahkan, mestinya anggaran dan kewenangan KemenPPPA juga ditambah dengan signifikan. Sayangnya, hanya ditambah Rp 10 M dari tahun 2022 dan dalam posisi masih lebih rendah dari anggaran tahun 2021 di mana terjadi darurat Covid-19. Bahkan, anggaran Kementerian ini jauh di bawah anggaran dirjen di Kemensos misalnya.

Semestinya, dengan diundangkannya UU TPKS, Kementerian ini menjadi bagian yang sangat dipentingkan. Itu semua menunjukkan lemahnya komitmen Pemerintah dalam mendukung peran dan menyelesaikan permasalahan perempuan dan anak. "Saharusnya dengan disahkannya UUTPKS maka perhatian dan dukungan dengan anggaran dari Pemerintah, lebih kuat dan lebih banyak lagi," pungkasnya. ❏

Jalan Panjang Menuju JIS

Terwujudnya Jakarta International Stadium (JIS) dicapai melalui proses panjang. Rencana itu sudah dimulai sejak Gubernur Jakarta Fauzi Bowo. Legalitas dan klaim kepemilikan lahan selalu mengiringi setiap proses pembangunan. Di masa Anies Baswedan, rencana stadion berstandar internasional dan menjadi kebanggaan warga Jakarta terwujud. Stadion ini memiliki banyak kelebihan dibanding Stadion GBK.

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

SENIN, 2 Mei 2022, ribuan orang dari berbagai titik di Jakarta, bahkan luar Jakarta mengalir secara bergelombang menuju ke Jakarta International Stadium (JIS), Papanggo, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Selepas subuh, orang-orang yang menggunakan peci hitam, songkok putih, baju koko, mukena, sajadah, dan berbagai peralatan salat dengan berjalan kaki, naik sepeda motor, Transjakarta, commuter line, dan kendaraan pribadi, berbondong-bondong ke stadion yang letaknya bersebelahan dengan Taman Impian Jaya Ancol itu.

Mereka hadir di sana bukan untuk mengikuti tablig akbar yang dihadiri oleh ulama, dai, atau ustad yang kondang, namun untuk mengikuti salat Idul Fitri, 1 Syawal 1443 H. Salat ied di JIS baru kali pertama digelar pada pagi itu. Bagi masyarakat Jakarta dan jamaah luar kota, mereka juga kali pertama mengikuti Sala ied di sana.

Gubernur Anies Baswedan pada pagi itu memang menggelar secara resmi salat ied di JIS. Sebagai *landmark* baru Jakarta, tentu salat ied di sana sangat menarik, sebab berada di area terbuka, megah, dan bisa bertemu dengan Bapak Gubernur Jakarta. Tak heran ribuan orang bershaf-shaf atau berlapis-lapis membentuk barisan untuk melaksanakan salat ied.

Di media massa yang beredar pada hari itu, Anies Baswedan merasa bersyukur atas tertib dan lancarnya salat ied yang digelar di sana. “Syukur, pagi ini kita bersama-sama melaksanakan salat ied”, tuturnya. Ditambahkan, di JIS, kita berzikir dan mengagungkan takbir di mahakarya Kota Jakarta.

Salat ied yang digelar pada hari itu rupanya mendapat sorotan dari media asing. Berbagai televisi asing mengabarkan, kegiatan diikuti oleh ribuan jamaah. Pemberitaan yang ada pastinya akan mengangkat keberadaan JIS di dunia internasional.

Salat ied di JIS merupakan salah satu acara besar di sana dalam rangka mensyukuri selesainya pembangunan stadion itu. Sebelum salat id, atau beberapa minggu sebelumnya, di sana digelar Turnamen International Youth Championship (TIYC). Sesuai dengan temanya, pada gelaran itu bertanding Indonesia All Star U-20, Bali United U-18, Barcelona U-18, dan Atletico Madrid U-18. Turnamen yang digelar pada April 2022 itu, menurut Anies Baswedan, sebagai rangkaian *soft launching* JIS.

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Hadirnya klub-klub elit Eropa, Barcelona, dan Atletico Madrid, meski bukan yang senior, mengundang perhatian para penggemar sepakbola di tanah air, terutama fans Barcelona dan Atletico Madrid. Para pecinta pesepakbola mengikuti setiap laga yang digelar, baik lewat televisi maupun tayangan di media sosial.

Sebagai stadion baru dan berstandar internasional, FIFA, tentu fasilitas yang ada sangat lengkap dan modern sehingga hal demikian mengundang pujian bagi mereka. Pelatih Barcelona U-18, Iban Cuadrado, dalam *cnnindonesia.com*, 19 April 2022, mengatakan, JIS stadion megah. Secara umum, tempat ini sangat baik. Hal senada diungkapkan oleh pelatih tim U-18 Atletico Madrid, Daniel Perez. Menurutnya, JIS stadion berstandar internasional yang sudah seharusnya digunakan untuk menyelenggarakan

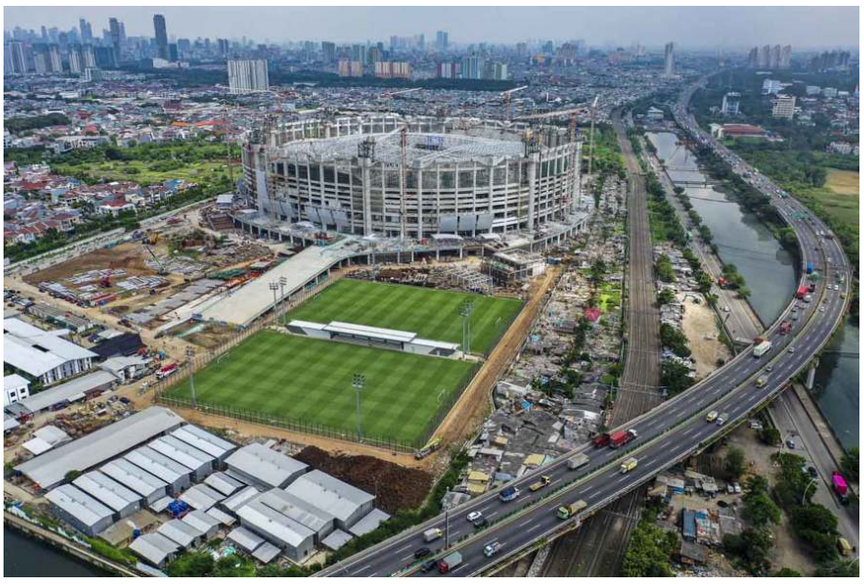

turnamen-turnamen besar.

JIS sebagai stadion megah dan mendapat pujian banyak pihak terwujud tidak terjadi satu semalam atau *abracadabra*. Jalan panjang mengiringi proses pembangunan stadion yang berada di pinggir jalur kereta itu. Menurut catatan-catatan yang ada, proses pembangunan stadion di sana sudah dirintis sejak Gubernur Jakarta Fauzi Bowo.

Untuk membangun stadion yang ada, di area yang disebut Taman BMW itu, Fauzi Bowo menggusur bangunan dan perumahan liar yang ada di sana. Hal demikian dilakukan untuk menciptakan ruang lapang dan persiapan pembangunan. Penggusuran yang dilakukan pada Agustus 2008 itu dilakukan kembali pada Oktober pada tahun yang sama. Tercatat pada penggusuran yang kedua kalinya ini ada sekitar 200 gubuk liar dibongkar. Bongkaran yang berupa kayu, bambu, dan material lainnya itu dibakar.

Setelah dirasa cukup, niatan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta yang berencana untuk membangun stadion dan kompleks olahraga di Taman BMW. Desember 2008 berbagai persiapan dimulai, seperti mengeruk tanah di lahan yang dipersiapkan. Pembangunan direncanakan mulai tahun 2009 dan selesai tahun 2011. Di sana akan dibangun stadion dengan kapasitas 40.000 penonton. Tidak hanya lapangan sepakbola, namun juga dibangun lapangan voli pasir, sepakbola pasir, jalur lari, sepeda, wisata air, seperti ski, serta ruang terbuka hijau. Bisa jadi seperti Kompleks Stadion Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta.

Di tengah keseriusan Fauzi Bowo membangun rencana itu, tiba-tiba ada pihak yang mengklaim tanah itu. Dari sinilah kemudian muncul sengketa. Meski disebut sengketa lahan terjadi, namun hal demikian tidak mengganggu proses pembangunan, sebab dana yang ada sudah dianggarkan dalam APBD. Sampai di situ rencana pembangunan stadion di Taman BMW semasa Fauzi Bowo.

Ketika ada pembangunan MRT (*Mass Rapid Transit*) dari Lebak Bulus hingga Bundaran HI, maka dibutuhkan depo untuk kereta MRT. Dipilihlah Lebak Bulus sebagai depo. Pada masa itu di sana masih ada stadion dan terminal. Sebab, pembangunan MRT sebagai prioritas pada masa Gubernur Joko Widodo maka stadion dibongkar untuk dijadikan depo.

Pemerintah Jakarta pun memikirkan pengganti Stadion Lebak Bulus. Entah meneruskan rencana Fauzi Bowo atau lahan yang ada hanya di Taman BMW maka di sanalah hendak dibangun stadion pengganti Lebak Bulus. Joko Widodo serius soal pembangunan stadion baru. Buktinya, pada 28 Mei 2014, dia melakukan peresmian rencana pembangunan stadion. Dalam catatan yang ada, langkah awal untuk membangun stadion itu dimulai dengan mematangkan tanah yang ada, karena tanah di lahan itu adalah rawa. Bila tanah yang ada sudah matang atau padat selanjutnya baru dibangun konstruksi.

Lahan yang ada pun disertifikasi. Sama seperti pada masa Fauzi Bowo, pada masa Joko Widodo pun juga ada pihak-pihak yang mengklaim kepemilikan tanah. Meski ada suara-suara yang mengklaim, namun pemprov pada masa itu juga berujar bahwa pembangunan terus berjalan. Dalam perjalanan waktu, Joko Widodo ikut dalam Pemilu Presiden 2014. Dirinya terpilih, dan rencana pembangunan stadion itu tidak terealisasi.

Rencana pembangunan stadion masih

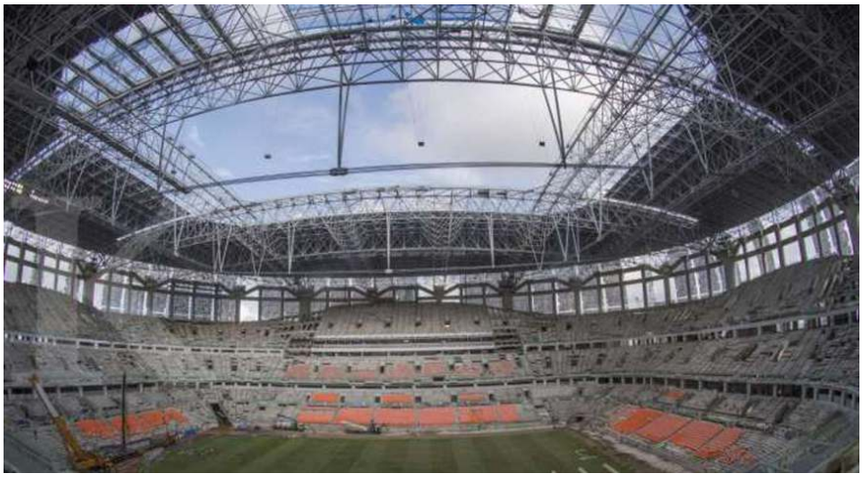

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

tetap ada pada masa Gubernur Djarot Hidayat. Mantan Walikota Blitar itu pada 9 September 2017 menandai pembangunan dengan membangun *club house* dan fasilitas olahraga air. Djarot yakin pembangunan terlaksana, sebab pemprov menang dalam gugatan sengketa lahan tingkat banding pada Juni 2015. Kekuatan hukum ini bertambah setelah dikantongi sertifikat hak pakai yang terbit pada 18 Agustus 2017. Dikatakan oleh politisi dari PDI Perjuangan itu, setelah dikeluarkan sertifikat HPL dari BPN, harus segera dibangun dengan tujuan ada aktivitas di Taman BMW. Meski lahan sudah sah dan legal milik Pemprov Jakarta, realisasi pembangunan stadion itu belum terwujud.

Pembangunan stadion rupanya menjadi prioritas setiap gubernur. Bagi Anies Baswedan, berdirinya stadion yang dimiliki oleh pemprov dan kebanggaan warganya juga menjadi impiannya. Ketika lahan sudah ada dan sah serta legal milik pemprov, maka di sinilah Anies Baswedan memulainya.

Pada 14 Maret 2019, dia mencanangankan kembali pembangunan stadion. Dalam kesempatan itu, ia mengungkapkan banyak melibatkan para gubernur, aparatur pemerintah, dan masyarakat yang memulai prosesi ini sejak bertahun-tahun lalu. Meski di masa Djarot soal sengketa lahan dirasa sudah selesai, namun pada masa Anies Baswedan hal demikian muncul kembali.

Pencanangan yang dimulai pada Maret 2019 itu pastinya juga tidak mulus. Pandemic Covid-19 yang terjadi pada awal 2020 atau akhir 2019 pastinya memengaruhi proses yang ada. Untungnya pemerintah masih memperkenankan aktivitas pembangunan infrastruktur di masa pandemic.

Di tengah berbagai tantangan yang ada, pembangunan stadion itu bisa terealisasi lebih cepat dari target yang dicanangkan. Diungkap dalam salah satu media online bahwa pengerjaan pembangunan lebih cepat dari target pengerjaan yang telah disusun sebelumnya, yakni 93,98% hingga awal Februari 2022.

Dalam *kontan.co.id*, 03 Februari 2022, Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan PT Jakarta Propertindo (Jakpro), Nadia Diposanjoyo, mengatakan, berbagai tantangan saat pembangunan selalu menjadi hal menarik untuk diceritakan, namun (karena ada) dukungan dari warga Jakarta, tantangan yang ada (bisa) menjadi salah satu semangat Jakpro dalam menyelesaikan pembangunan stadion. Hingga digelar TIYC dan Salat Ied di JIS, stadion itu bisa digunakan untuk berbagai aktivitas.

Lalu apa kelebihan stadion yang dibangun dengan anggaran sebesar Rp4,5 triliun itu? Di *metro.sindonews.com*, 12 Desember 2021, di sebut ada empat kelebihan JIS dibanding dengan Stadion GBK. Keempat kelebihan itu adalah: *pertama,* konsep stadion. Project Director PT. Jakarta Propertindo (Jakpro), Iwan Takwin, mengatakan, konsep Stadion JIS akan lebih baik dari Stadion GBK, karena spesifikasi desainnya yang lebih baik. Tidak hanya sesuai standar sepakbola, stadion ini juga memenuhi standar konser musik dan hiburan lain. Ada juga berbagai fasilitas yang dapat dinikmati pengunjung stadion, seperti *jogging track* hingga *bungee jumping*. Beberapa konsultan asing yang mendesain berbagai stadion di Liga Primer didatangkan untuk membantu merancang desain stadion ini.

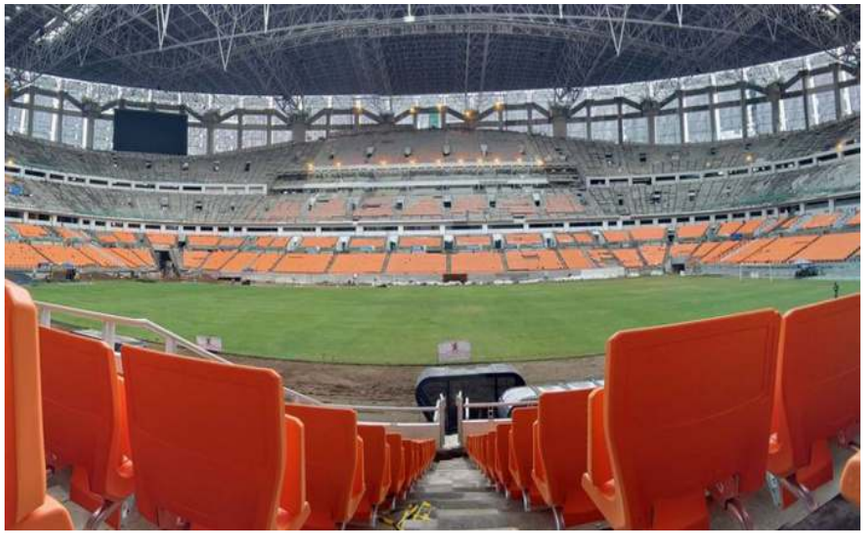

Kedua, Stadion Ramah Lingkungan. Hal lain yang membuat proyek pembangunan JIS mendapat perhatian adalah sistem *zero run-off* yang menjadi bagian dari konsep ramah lingkungan stadion. Sistem *zero run-off* memungkinkan air hujan yang jatuh ke tanah dialirkan kembali melalui saluran air Jakarta Utara. Hal ini meminimalisir genangan yang kerap terbentuk pasca hujan. Penggunaan rumput *hybrid* berjenis *Zoysia Matrella* dan rumput sintetis *Limonta Mixto* dikabarkan setara dengan rumput pada Stadion Allianz Arena yang telah memenuhi standar FIFA.

Ketiga, *Retractable Roof*. JIS akan menjadi stadion pertama di Indonesia yang menggunakan sistem *retractable roof* atau stadion yang atapnya dapat dibuka atau ditutup. Hal ini memungkinkan penggunaan stadion secara optimal, tanpa terhalang kondisi cuaca. Berat atap yang mencapai 3.900 ton diangkat menggunakan mesin *hydraulic jack* yang tersebar di 16 titik stadion. Proses kompleks ini diklaim merupakan satu-satunya di Asia saat ini.

Keempat, kualitas audio. Diklaim dapat digunakan untuk konser music. Direktur Utama PT Jakarta Propertindo, Widi Amanasto, menuturkan, JIS dilengkapi *sound system* berteknologi tinggi. Selain itu, penutup atap juga didesain dapat membuat audio dari sound system terdengar lebih jernih. Terlebih, *sound system* ini dirancang sepenuhnya oleh tangan-tangan terampil anak bangsa. ❑

AWG*/dari berbagai sumber*

BIS, Stadion Perpisahan

Tidak mau kalah dengan Jakarta, Banten juga membangun stadion. Stadion yang dinamakan Banten International Stadium (BIS) itu diresmikan di akhir masa jabatan Gubernur Banten, Wahidin Ismail. Dia berharap, masyarakat ikut menjaga kebersihan BIS.

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

PENANTIAN masyarakat Provinsi Banten untuk memiliki stadion kebanggaan akhirnya terkabul. Pada Senin, 9 Mei 2022, Gubernur Banten Wahidin Halim meresmikan Banten International Stadium (BIS). Stadion yang berada di Jl. Raya Pandeglang KM 6, Kelurahan Kemanisan, Kecamatan Curug, Kota Serang, Banten, itu selain megah juga berstandar FIFA.

Saat peresmian, ribuan orang berbondong-bondong ke BIS. Mereka ingin melihat megahnya stadion itu. Hadirnya ribuan orang membuat lalu lintas ke BIS dan Serang-Pandeglang menjadi macet. Pejabat provinsi itu yang ikut memeriahkan peresmian adalah Ketua DPRD Provinsi Banten Andra Soni, Sekretaris Daerah Al Muktabar, Forkopimda Provinsi Banten, Walikota Serang Syafrudin, Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah, Wakil Walikota Tangerang Selatan Pilar Saga Ichsan, dan Kepala OPD Pemprov Banten. Dalam penggalan sambutannya, Wahidin Halim mengatakan, “kalau di Jakarta ada JIS, kita harus ada BIS”, ujarnya.

Peresmian stadion itu juga sebagai tanda perpisahan Wahidin Halim dengan masyarakat. Pada 12 Mei 2022, masa jabatannya sebagai gubernur berakhir. Dia meminta maaf bila belum mampu mewujudkan harapan-harapan lainnya dari masyarakat Banten. “Kami sudah memberikan apa yang kami mampu”, pesannya.

Mereka yang ada di sana tidak hanya melihat kemegahan BIS, namun di malam itu banyak acara seperti hiburan dari sejumlah artis ibu kota, pesta kembang api, dan lampu sorot, pembacaan salawat 1.000 santri, atraksi budaya Banten, pameran produk UMKM, dan gowes. Puncak dari acara itu adalah digelarnya pertandingan sepakbola antara Banten All Star dengan Selebritis FC. Pertarungan persahabatan itu juga dihadiri mantan pemain Timnas Indonesia, yaitu M Nasuha. Ia bergabung dengan Banten All Star.

Menurut catatan, BIS memiliki luas bangunan 78.116 meter persegi. Stadion tersebut tersusun dari 5 lantai dengan kapasitas penonton sebanyak 38.000 orang. Dengan rincian, 19.124 kursi diperuntukkan bagi penonton umum, 532 kursi untuk VIP dan pendamping difabel, 231 kursi untuk VVIP, dan 151 kursi untuk media. Untuk menuju ke tempat-tempat itu tersedia 18 *gate*, pintu masuk. Sebagai stadion berstandar internasional, rumput yang terhampar di sana didatangkan dari Italia yang sudah berstandar FIFA.

Tak mau kalah dengan JIS, tata suara di BIS mengggunakan *toa sound system* dan tata pencahayaan arena stadion dengan *dmx system* sebanyak 172 lampu dengan kekuatan total 1500 *lux*. Tak hanya rumput yang diimpor dari Italia, *scoring board* juga ditangani oleh *eurodisplay* Italy.

BIS sebagai stadion yang dibangun

dengan biaya gede, peruntukan stadion multiguna, *sport center*. Di sana ada sarana-sarana penunjang untuk olahraga selain sepakbola, salah satu di antaranya lintasan lari yang berstandar IAAF (*International Association of Athletics Federations*). Ada 7 lintasan lari di sana.

Bila dilihat dari dalam, wajah BIS tidak beda dengan stadion-stadion yang ada, seperti Pakan Sari, Stadion Utama Riau, Stadion Papua Bangkit, dan Stadion Patriot Bekasi, namun dari luar ada penampakan yang lain dari stadion yang dibangun dengan biaya mencapai Rp874,317 miliar itu. Dari luar bangunan memancarkan aura kebantenan, yakni terdapat motif batik Banten dan gerbang dengan ornamen ciri khas Kesultanan Banten. Disebut juga ada unsur ornament Baduy di sana.

Megah, mewah, dan berstandar FIFA membuat BIS dilirik oleh klub-klub professional yang ada. Dari berita yang muncul, RANS Cilegon FC dan Dewa United tertarik untuk menjadikan BIS sebagai kendang atau *base camp*. RANS Cilegon FC merupakan klub sepakbola yang berasal dari Kota Cilegon, Banten, dan saat ini masih bermarkas di Cilegon. Pada tahun 2021, RANS FC merupakan *runner up* Liga 2 dan mendapat promosi ke Liga 1. Sedang Dewa United merupakan klub sepakbola Indonesia yang bermarkas di Stadion Sumpah Pemuda, Kota Bandar Lampung, Lampung.

BIS, menurut Wahidin Ismail, dibangun sebagai sebuah keinginan agar provinsi paling barat di Pulau Jawa itu memiliki lapangan sepakbola terbaik. Dikatakan, bila di negara-negara Eropa sudah memiliki stadion bertaraf internasional maka Banten juga harus punya stadion bertaraf internasional. "Kita bangun karena rindu akan stadion yang memadai, rindu kita punya ikon. Kita perkenalkan Banten bagian dari masyarakat internasional," ujarnya dalam *cnnindonesia.com*, 10 Mei 2022.

Dalam peresmian BIS, dirinya bersyukur atas hadirnya stadion yang dibangun sejak Juli 2020 itu. Ia berharap, stadion itu memberikan manfaat dan kebahagiaan bagi masyarakat Banten. Sebagai stadon

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

kebanggaan, Wahidin Ismail mengajak kepada warga untuk ikut merawat stadion agar kompleks yang ada tidak kumuh. "Masyarakat harus terlibat menjaga kebersihan. Masyarakat Banten dikenal sebagai masyarakat beradab, dikenal dunia intenasional sejak lama," ujarnya seperti yang tertulis dalam *republika.co.id*, 10 Mei 2022.

Dirinya menekankan pentingnya kebersihan, sebab berdasarkan dari pengalaman yang ada saat kompleks Kesultanan Banten kumuh dan kotor maka segera dibangun dan direhabilitasi dan selanjutnya banyak orang, bahkan dari negara lain, datang dan berkunjung ke Kesultanan Banten. Diungkapkan, kunjungan ke kesultanan di sana mencapai 5 juta orang per tahun. Mereka datang untuk untuk berziarah. Kesultanan Banten itu marak kembali sebagai pusat kebudayaan, peradaban, dan wisata religi.

Hadirnya BIS membawa kebahagian bagi semua warga Banten. Wahidin Ismail ingin stadion itu membawa kemaslahatan bagi masyarakat. Dengan stadion itulah dikatakan berbagi kebahagiaan. "Saya buka dan terbuka untuk siapa saja bermain sepakbola di BIS", tuturnya.

Seperti JIS, BIS pun mengalami permasalahan dalam soal penamaan stadion. Sehingga nama BIS bisa berubah. Sebelum nama BIS sendiri dinobatkan, ada banyak usulan nama pada stadion itu. Nama-nama yang pernah muncul untuk stadion itu, seperti Stadion Gelora Jawara, Stadion Gelora Banten Jawara, Maulana Hasanuddin, Stadion Sultang Ageng Tirtaya. Bahkan yang mengusulkan nama Wahidin Halim (WH) Andika. ❑

AWG*/dari berbagai sumber*

Ada PON, Ada Stadion (Baru)

Berkah dari penyelenggaraan PON yang digilir ke berbagai provinsi adalah dibangunnya infrastruktur olahraga berstandar nasional, bahkan internasional. Biasa bila PON digelar di suatu daerah, di sana berdiri stadion megah, tak kalah dengan stadion di Jakarta dan Eropa. Sayang dalam perjalanan waktu, stadion yang megah itu mengalami kerusakan dan seperti tak terurus.

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

GERAKAN reformasi yang digulirkan oleh mahasiswa dan kaum cendekiawan serta intelektual pada tahun 1998, tidak hanya menata ulang sendi-sendi hukum dan politik di Indonesia, namun juga meratakan pembangunan olahraga di tanah air. Selama Orde Baru berkuasa, kita lihat dari dokumen dan jejak sejarah, terlihat penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) terpusat di Jakarta. Mulai PON VIII hingga XIV, 1973 hingga 1996, semua kegiatan olahraga digelar di kompleks Stadion Senayan, Rawamangun, dan beberapa tempat di Jakarta lainnya.

Setelah kekuasaan Presiden Soeharto tumbang, selanjutnya penyelenggaraan PON digilir ke provinsi-provinsi yang siap menjadi tuan rumah. Kali pertama pekan olahraga antarprovinsi digelar di era reformasi itu diadakan di Surabaya, Jawa Timur, meski pertandingan yang dilombakan ada juga digelar di Sidoarjo, Gresik, Malang, dan kota-kota lainnya di Jawa Timur.

Berkah dari penyelenggaraan PON di berbagai daerah tersebut adalah dibangunnya infrastruktur-infrastruktur olahraga. Dari sinilah muncul stadion-stadion besar di kota-kota, selain Jakarta. Saat Jawa Timur menjadi tuan rumah PON XV, di Sidoarjo, wilayah yang berbatasan langsung dengan Surabaya, dibangun stadion baru. Dalam *Wikipedia* disebut, stadion yang bernama *Stadion Gelora Delta* itu merupakan stadion multi-guna meski lebih sering dipergunakan untuk menggelar pertandingan sepakbola. Stadion yang letaknya berada di tengah kota itu memiliki kapasitas penonton hingga 35.000 orang.

Selepas pembukaan dan pesta PON usai, di kompleks itu dibangun Museum PON Jawa Timur. Museum itu untuk menceritakan kepada semua orang bahwa di sana pernah digelar PON. Sampai saat ini keberadaan stadion itu pun masih terjaga dengan baik. Tercatat ada pertandingan-pertandingan besar di Stadion Gelora Delta, seperti final Piala Indonesia 2006, Pembukaan Piala Indonesia 2007, Perempat Final Divisi Utama Liga Indonesia 2007, AFF U-19 2013, dan final serta semifinal Divisi Utama Liga Indonesia 2014. Sebagai stadion yang terbilang besar, di tempat itu pernah dijadikan markas klub-klub elit, seperti Deltras FC.

Ketika Sumatera Selatan menjadi tuan rumah PON XVI, pemerintah provinsi di sana pun juga membangun stadion. Meski PON XVI digelar pada tahun 2004, September, namun pembangunan stadion sudah dilakukan pada tahun 2001. Stadion yang berada di Jl. Gubernur HA Bastari, Jakabaring, Palembang, Sumatera Selatan, itu dibangun memang diperuntukkan untuk PON. Stadion yang saat ini bernama *Stadion Gelora Sriwijaya* atau ada juga yang menyebutnya sebagai *Stadion Jakabaring* memiliki kapasitas 23.000 orang.

Stadion mutliguna itu menjadi benar-benar stadion internasional, sebab di sana pernah dijadikan tuan rumah dalam berbagai event olahraga dunia, seperti *Asian Games, SEA*

Games, Piala Asia, Islamic Solidarity Games, dan liga-liga sepakbola Indonesia. Stadion itu juga menjadi markas klub elit Sriwijaya FC.

Keberadaan *Stadion Gelora Sriwijaya* saat ini juga menjadi bagian dari Kota Palembang dan Sumatera Selatan. Maksudnya adalah kompleks olahraga itu sudah menjadi *landmark* atau ikon Palembang dan Sumatera Selatan. Kawasan yang ada pun menjadi sentra bisnis. Ada MRT yang melintas di kawasan itu sehingga orang mudah menjangkau *Stadion Gelora Sriwjaya*.

Saat Kalimantan Timur sudi menjadi tuan rumah PON XVII, pemerintah provinsi di sana juga membangun stadion. Stadion yang berada di Palaran, Samarinda, Kalimantan Timur, dengan kapasitas 67.075 orang itu diresmikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 18 Juni 2008. Dan, pada 5 Juli 2008 dijadikan tempat pembukaan PON XVII.

Stadion yang bernama *Stadion Utama Kaltim* itu berada di lokasi yang strategis. Berada di dekat jalan tol Samarinda-Balikpapan. Menurut catatan, di tempat ini PSSI pernah menjadikan sebagai tempat final dan 8 besar Divisi Utama Liga Indonesia 2008. Stadion itu juga pernah menjadi markas Putra Samarinda pada Putaran ke 2 *Indonesia Super League* 2014.

Riau sebagai tuan rumah PON XVIII 2012 juga melakukan hal yang sama untuk memeriahkan gelaran olahraga nasional empat tahunan itu. Demi kemegahan stadion, pemerintah Riau rela mengeluarkan anggaran sebesar Rp1,18 triliun. Hasilnya, memang sangat luar biasa. Dari luar stadion ini mirip stadion-stadion yang ada di Eropa. Dengan, kapasitas 44.000 orang stadion yang bernama *Stadion Utama Riau* dijadikan tempat pembukaan dan penutupan PON.

Tak hanya itu, stadion ini juga pernah menjadi tempat kualifikasi U-22 AFC 2013 dan pernah menjadi markas PSPS. Bila malam hari, di kawasan stadion ini ramai orang jalan-jalan, kuliner, dan bersosialita.

Tak jauh dari Jakarta, tepatnya di Pakansari, Cibinong, Bogor, Jawa Barat, berdirilah stadion yang memiliki kapasitas 30.000 orang. Stadion dibangun pada 16 Januari 2012 dan digunakan dua tahun kemudian atau tahun 2014. Biaya pembangunan yang dikeluarkan mencapai Rp 282 miliar lebih. Besarnya biaya yang dianggarkan, sebab untuk menyelenggarakan PON XIX 2016. Jawa Barat waktu itu ditunjuk sebagai tuan rumah.

Stadion yang bernama Pakansari itu sama seperti stadion untuk gelaran PON merupakan stadion multiguna. Di tempat ini juga bisa digunakan untuk lomba altetik. Sebagai stadion yang tak jauh dari Jakarta, *Stadion Pakansari* kerap dijadikan sebagai tempat untuk pertandingan sepakbola antarbangsa, seperti cabang sepakboa Asian Games 2018 dan Piala Asia. Sebagai stadion yang berada di Kabupaten Bogor, di tempat ini dijadikan markas Persikabo.

Tahun 2021 merupakan tahun yang bersejarah bagi masyarakat Provinsi Papua. Sebab, di sana pada 2 sampai 15 Oktober 2021 digelar PON XX. Sebagai *sport center arena*, maka dibangunlah stadion dengan kapasitas 40.263 orang. Stadion yang dibangun dengan biaya Rp1,3 Triliun itu awalnya dinamakan *Stadion Utama Papua Bangkit*, ada pula yang menyebut *Stadion Harapan*. Seiring perjalanan waktu, nama stadion diganti menjadi *Stadion Lukas Enembe*. Dinamakan demikian bisa jadi untuk mengingat jasa-jasa Gubernur Papua Lukas Enembe. Menarik dari masa jabatan Lukas Enembe adalah, ia kepala daerah di masa dua presiden, yakni Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo. Tercatat Lukas Enembe menjadi Gubernur Papua pada 9 April 2013 – 9 April 2018.

Terlepas dari soal nama, menurut *Wikipedia,* stadion itu memiliki pemandangan berlatar Pegunungan Cycloop di utara dan Danau Sentani di selatan. Agar mengandung nilai-nilai lokal, bangunan stadion yang ada dilengkapi ornamen khas Papua. Seperti stadion yang dibangun untuk PON, Stadion Lukas Enembe merupakan stadion multiguna, namun seringnya untuk sepakbola.

Dari semua stadion yang ada di atas, sayangnya di antara mereka ada yang tidak terawat sehingga bangunan yang ada banyak mengalami kerusakan. Ini bisa terjadi karena jarang atau bahkan tidak ada gelaran olahraga atau sepakbola setelah PON. Sepinya kegiatan membuat tidak ada pemasukan dan anggaran sehingga pemerintah daerah membiarkan stadion yang megah menjadi rusak. Sungguh memprihatinkan. ❑

AWG*/dari berbagai sumber*

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Suryati
Perajin Batik Desa Jetak Pacitan

UMKM Rakyat Harus Diperhatikan

SELAMA dua tahun ini Indonesia kena pandemi Covid-19 dan yang sangat terpukul adalah rakyat kecil di desa-desa. Saat ini alhamdulillah, berangsur baik, karena katanya saya terima kabar virus sudah mereda dan keadaan akan kembali normal lagi seperti dulu.

Saya sebagai rakyat biasa penjual batik di kawasan wisata berharap agar dalam rangka pemulihan ekonomi ini kami para UMKM diperhatikan. Saya bersyukur kawasan wisata sekarang sudah mulai marak, wisatawan sudah mulai datang, dan ini menandakan penjualan kami akan semakin membaik.

Para pejabat pusat atau daerah kami harap meramaikan wisata-wisata daerah, karena dengan datangnya para pejabat akan semakin meyakinkan wisatawan lain bahwa keadaan sudah baik-baik saja.

Dan, harapan besar kami lagi, kepada pemerintah daerah juga pusat agar menjaga supaya keadaan seperti pandemi tidak terjadi lagi, karena sangat menyusahkan rakyat. ❑

DER

Lilik Gunawan
Biker

Berhaji sekaligus promosikan Indonesia

SAYA adalah salah satu rakyat yang memiliki cita mulia untuk melakukan ibadah haji tahun 2022 ini, dengan cara yang saya anggap bermanfaat, yakni melakukan perjalanan ibadah haji melalui perjalanan darat dengan menggunakan sepeda motor dari Jakarta ke Mekkah.

Mengapa saya lakukan, karena pertama memang saya hobi berpetualang; kedua, saya ingin melaksanakan ibadah sesuai agama saya; ketiga, dengan berpetualang menggunakan sepeda motor, saya akan melalui banyak negara dan berkesempatan bertemu, bersosialisasi dengan masyarakat dunia dan memperkenalkan Indonesia .

Dari pengalaman perjalanan saya yang lalu, yakni dari Jambi ke Arab Saudi juga menggunakan sepada motor banyak sekali warga dunia di belahan sana belum mengenal Indonesia. Mereka hanya mengetahui melalui sedikit berita di televisi. Interaksi saya dengan mereka sedikit banyak membuka dan menambah wawasan mereka tentang negeri kita Indonesia.

Saya berharap, mendapat dukungan dari pemeritah dari upaya saya ini. Karena, memang perjalanan ini lumayan berat, terutama persoalan birokrasi di setiap masuk dan melewati perbatasan negara-negara sepanjang perjalanan.

Sebenarnya, masih banyak hal-hal kreatif yang dilakukan rakyat Indonesia demi mengangkat nama bangsanya dengan caranya masing-masing, dan itu harus dilihat diperhatikan dan didukung. ❑

DER

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

H. Agus Hadikarta Koswara

Ngontel Sepeda Mengajak Berdonor Darah

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

USIANYA sudah tidak muda lagi. Bulan Agustus nanti, umurnya akan genap menjadi 62 tahun. Ibarat matahari, kala senja datang sinarnya sudah kurang menyengat. Tetapi, bagi H Agus Hadikarta Koswara persoalan umur hanyalah deretan angka. Karena diusianya kini, bapak tiga anak itu masih sanggup mengayuh sepeda, mengelilingi berbagai kota di Jawa Barat, Jawa Tengah, hingga DI Yogyakarta.

Tercatat, sejak 2019 Pensiunan Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung ini telah melangsungkan enam perjalanan, melewati 23 kabupaten – kotamadia di tiga provinsi berbeda. Selama menempuh perjalanan menggoes sepeda, Agus Hadikarta Koswara selalu mengampanyekan aksi donor darah dengan tajuk "Jadilah Pendonor Darah Sukarela Sebagai Gaya Hidup Sehat".

"Saya semakin tua, dan tidak bisa mendonorkan darah untuk selamanya. Saya ingin, ada banyak lagi masyarakat yang mau menolong sesama, dengan cara mendonorkan darah bagi mereka yang membutuhkan. Apalagi, pada waktu tertentu kebutuhan akan darah bisa meningkat. Seperti pada saat pandemi Covid-19 lalu," kata Agus kepada Majalah *Majelis* MPR RI beberapa waktu lalu.

Menurut Agus, upayanya mengampanyekan donor darah sebagai gaya hidup sehat cukup berhasil. Banyak orang yang ditemuinya selama dalam perjalanan, menjadi sadar dan mau mendonorkan darahnya ke PMI. Bahkan, ia juga sempat mendapat kabar dari PMI di daerah yang disinggahi bahwa jumlah pendonor darah di tempat tersebut mengalami kenaikan. Banyak juga orang yang sebelumnya tidak mengetahui apap-apa soal donor darah menjadi lebih mengetahui setelah mendapat keterangan darinya.

"Saya sangat bersyukur kampanye gerakan donor darah itu ternyata cukup membuahkan hasil. Tetapi saya sadar, butuh gerakan yang lebih besar untuk menyadarkan masyarakat tentang arti penting donor darah, terlebih sebagai gaya hidup sehat," kata pria kelahiran Jakarta 21 Agustus 1960, ini.

Agus berharap, usahanya melakukan kampanye donor bisa lebih digalakkan oleh pemerintah. Terbukti dari aksinya yang kecil saja banyak yang makin sadar akan pentingnya donor. Apalagi, jika kampanye itu dilakukan secara masif. Selain baik bagi

pendonor, kegiatan itu juga bisa berimbas pada cadangan darah yang semakin banyak di PMI.

"Perlu ada sosialisasi yang lebih banyak lagi. Minimal menjadikan para pendonor sebagai duta PMI. Membekali mereka dengan pengetahuan yang layak, agar mereka bisa menyosialisasikan donor darah di tengah masyarakat luas," kat Agus lagi.

Menurut Agus, Ia cukup menikmati kampanye donor darah yang dilakukan selama tiga tahun terakhir. Apalagi tanggapan teman-temannya di daerah sangat baik. Mereka menghargai usahanya, dan selalu mendukung agar kampanye tersebut diteruskan hingga berbagai daerah lain di Indonesia.

"Keluarga dan anak-anak saya semua mendukung. Mereka ikut menjadi pendonor dan mendorong aksi kampanye donor darah yang saya lakukan. Bahkan anak saya ikut membuatkan kaos yang saya kenakan untuk melakukan kampanye," kata Agus menambahkan.

Bahkan keluarganya juga tak pernah meributkan masalah finansial dan waktu yang harus diluangkan untuk melaksanakan kampanye donor darah.

130 kali donor

Ayah dari Ayu Ratnajaya Hadikarta, Agni Siswaya Hadikarta, dan Agni Siswanto Hadikarta, ini adalah sosok yang patut diteladani. Ia merupakan pribadi yang bisa menjadi inspirasi bagi anak muda, khususnya bagi para pendonor. Agus tidak hanya mengampanyekan donor darah kepada orang lain. Ia juga mendonorkan darahnya, dan mau mencarikan serta mengantar orang yang mau donor.

Bahkan, kegiatan donor darah yang dilakukan suami dari Hj. Wahyuni RHS, ini sudah berlangsung sejak ia duduk di bangku SLTA. Atau sekitar tahun 1977/1978. Saat itu, Agus beserta teman-teman organisasi Pelajar Islam Indonesia ikut serta dalam aksi donor darah. Sejak itu kegiatan tersebut terus dilakukan. Ketika ia pindah tugas ke Papua tahun 1981 Agus tetap melanjutkan kegiatannya berdonor. Dan, saat kembali lagi ke Bandung pada 1988, kerelaannya donor darah tak pernah berhenti. Hingga kini Agus sudah menyumbangkan darahnya tak kurang dari 130 kali donor.

Selama menjadi pendonor, berbagai kisah menarik sudah pernah dia jumpai. Antara lain, Agus pernah dimintai tolong untuk mendonorkan darahnya pada pukul 24.00. Padahal, dua jam sebelumnya atau pukul 22.00 dia baru sampai di rumah setelah ada tuga di Jakarta.

"Pada saat yang lain, saya pernah dimintai tolong untuk mencarikan pendonor, menjemput dan mengantarnya ke PMI, padahal saat itu sudah malam, dan cuaca sedang tidak baik," cerita Agus.

Meski berulangkali menerima permintaan donor atau mencarikan pendonor, menurut Agus, ia selalu berusaha melaksanakannya dengan ikhlas. Tanpa embel-embel apalagi balas jasa. Karena kegiatannya, itu didasari rasa kemanusiaan dan keinginan menolong sesama yang sedang dalam kesulitan. ❑

MBO

Sarasehan Kehumasan MPR RI

MPR Ajak Sahabat Kebangsaan Ambil Peran Dalam Pembangunan

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

DI HADAPAN Civitas Akademika Universitas Negeri Semarang (Unnes) Pelaksana Tugas Deputi Administrasi Setjen MPR RI Siti Fauziah, S.E., M.M., mengingatkan kembali peran penting yang pernah dimainkan pemuda dan mahasiswa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Diawali pada 1908, pemuda dan mahasiswa mendobrak kungkungan penjajahan dengan mendirikan organisasi pergerakan Budi Utomo. Duapuluh tahun kemudian, pada 1928, para perwakilan pemuda dari seluruh wilayah Indonesia berikrar setia mengucapkan Sumpah Pemuda. Kemudian pada 1945, pemuda terlibat aktif membidani lahirnya Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus.

"Di era pembangunan, para pemuda dan mahasiswa juga terlibat aktif, sebagai motor lahirnya gerakan reformasi pada 1998. Gerakan ini menghadirkan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Sekaligus melakukan koreksi terhadap penyimpangan kekuasaan yang terjadi selama pemerintahan Orde Baru," ujar Siti Fauziah

Kenangan seperti itu, menurut Bu Titi, panggilan akrab Siti Fauziah, harus terus ditumbuh suburkan, agar menjadi inspirasi bagi para mahasiswa, baik saat ini maupun masa depan. Karena sepanjang keberadaannya, hubungan antara mahasiswa dan bangsa Indonesia selalu beriringan, seiya sekata, dan tidak bisa dipisahkan

Pernyataan itu disampaikan Siti Fauziah, saat membuka Sarasehan Kehumasan 'MPR RI-Menyapa Sahabat Kebangsaan,' diselenggarakan MPR bekerjasama dengan Unnes. Acara tersebut berlangsung di Gedung Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Prof. Ir. Retno Sriningsih Satmoko, Unnes, Selasa (31/5/2022). Ikut hadir pada acara tersebut, Kepala Biro Akademik, Kemahasiswaan dan Kerjasama Unnes Mulyo Widodo, S.Pd., M.M.

Turut menyampaikan makalah dalam sarasehan bertema: "Peran Mahasiswa dalam Memajukan Bangsa," itu adalah Budi Muliawan, S.H., M.H., (Kabag Pemberitaan dan Hubungan Antar Lembaga Setjen MPR RI, dan Muhammad Burhanudin, S.S., M.A., (Kepala UPT Pusat Humas Unnes).

'Menyapa Sahabat Kebangsaan' yang menjadi tagline acara sarasehan, menurut Bu Titi, memiliki makna bahwa semua adalah sahabat MPR. Dia berharap, semua yang hadir mengetahui tugas wewenang lembaga MPR, untuk mengukuhkan MPR sebagai Rumah Kebangsaan, Pengawal Ideologi Pancasila dan Kedaulatan Rakyat.

Jadi, lanjut Bu Titi, kehadiran MPR ke Unnes bukan untuk menggurui, melainkan untuk mengajak para mahasiswa mengambil peran dalam pembangunan bangsa. Serta merefresh memori kebangsaan bahwa dari zaman sebelum kemerdekaan, pemuda dan mahasiswa memiliki peran yang strategis dalam pembangunan bangsa dan negara Indonesia.

"Tahun 2021 acara ini dilaksanakan di 7 universitas di Indonesia, dan pada 2022, Universitas Negeri Semarang merupakan tempat pertama pelaksanaan kegiatan ini," kata Siti Fauziah. Setelah Unnes, MPR akan menggelar acara serupa di Jawa Timur, yaitu Kota Malang dan beberapa kota lain di Sumatera. Dengan begitu, MPR berharap, akan semakin banyak memiliki sahabat kebangsaan yang siap berkontribusi dalam pembangunan. Dan, menerima estafet pembangunan di masa akan datang.

Sementara itu, mewakili Rektor Unnes, Kepala Biro Akademik, Kemahasiswaan dan Kerjasama Unnes, Mulyo Widodo, S.Pd., M.M., menyambut baik kerjasama MPR dengan Universitas Negeri Semarang. Menurutnya, Sarasehan Kehumasan yang diikuti mahasiswa Unnes bisa memberikan pengalaman berharga, yang tidak didapat di bangku kuliah. Karena itu, Mulyo Widodo berharap, seluruh anak didiknya mengikuti acara tersebut dengan baik dari awal hingga akhir.

"Saya berterima kasih kepada rombongan dari MPR yang mau datang ke Unnes untuk memberikan pengetahuan dan pengalaman baru bagi mahasiswa. Semoga semua pengetahuan yang disampaikan di tempat ini bisa diserap dengan baik, dan memberi manfaat baik sekarang maupun masa depan," kata Mulyo Widodo. ❑

MBO

Sarasehan Kebangsaan

Budi Muliawan: Generasi Muda Harus Adaptif Terhadap Perubahan Zaman

GLOBALISASI dan kemajuan teknologi, terutama teknologi informasi, menyebabkan berbagai disrupsi informasi di berbagai bidang. Salah satunya di bidang pendidikan dan pengajaran. Akibat pandemi Covid-19, misalnya, pola pendidikan berubah dengan sistem daring. Guru dan juga siswa dituntut untuk melek teknologi informasi sebab sekolah tatap muka sempat dihentikan, diganti dengan sistem daring.

"Pola ini membuat guru harus bisa menggunakan teknologi informasi, salah satunya Zoom," ujar Kepala Bagian Pemberitaan dan Hubungan Antarlembaga Setjen MPR Budi Muliawan, SH., MH., yang menjadi pembicara dalam dialog bertajuk 'Peran Mahasiswa dalam Memajukan Bangsa' dan sarasehan bertajuk 'Menyapa Sahabat Kebangsaan' di Gedung Prof. Ir. Retno Sriningsih, Kampus Universitas Negeri Semarang (Unnes), Semarang, Jawa Tengah, Selasa (31/5/2022).

Sarasehan yang digelar hasil Kerjasama Biro Humas Sekretariat Jenderal (Setjen) MPR dan Unnes itu dihadiri Pelaksana Tugas Deputi Administrasi Setjen MPR Siti Fauziah, SE., MM; Kepala Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerjasama Unnes Mulyo Widodo, SPd., MM; dan Kepala UPT Pusat Humas Unnes Muhammad Burhanudin, SS., MA.; dan diikuti ratusan mahasiswa Unnes dari berbagai jurusan.

Menurut Wawan, sapaan akrab Budi Muliawan, disrupsi tidak hanya terjadi dalam pola pendidikan dan pengajaran. Dalam kehidupan masyarakat pun ada perubahan gaya hidup dan etika dalam pergaulan. Hadirnya teknologi informasi diakui memudahkan orang dalam berkomunikasi. "Waktu dan jarak sekarang bukan hambatan lagi berkat kemajuan teknologi informasi. Dulu untuk mengirim uang kiriman dari orangtua memerlukan waktu hingga tiga hari lewat Kantor Pos. Saat ini cukup satu menit dengan menggunakan transfer antarbank," ungkap alumni Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang itu.

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Di sisi lain, globalisasi dan kemajuan teknologi membawa dampak yang sangat mengkhawatirkan. Misalnya, membuat orang lebih suka menyendiri dengan perangkat komunikasinya daripada bersosialisasi dengan yang lain secara langsung.

Menghadapi globalisasi dan kemajuan teknologi, Budi Muliawan menegaskan bahwa perubahan ini tidak perlu dihindari, namun kita tidak bisa juga larut di dalamnya. "Nah, agar bisa bertahan maka kita harus mampu beradaptasi. Kalau dalam Ilmu Biologi, makhluk hidup yang bisa beradaptasi dengan lingkungan, dialah yang akan mampu bertahan hidup. Begitu juga sebaliknya," tuturnya.

Budi Muliawan mengatakan bahwa dalam menghadapi tantangan zaman, selain harus menguasai ilmu dan teknologi, penting juga memegang nilai-nilai etika dan norma yang ada. "Kita harus tetap memegang nilai dan norma yang ada dalam Pancasila. Nilai-nilai ini harus dijaga dalam menjalankan kehidupan sehari-hari karena akan membawa kita dalam suasana yang saling menghormati dan menghargai di tengah kemajuan zaman," paparnya.

Menurutnya, bangsa ini harus memegang erat nilai-nilai luhur bangsa yang bersumber dari Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Keempat nilai luhur bangsa itu merupakan pedoman hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. "Berkat Pancasila, bangsa Indonesia tetap utuh bersatu, tak terpecah belah," katanya.

Budi Muliawan merasa bangga bisa hadir di tengah generasi muda para calon guru yang mengikuti acara tersebut. Menurutnya, pendidikan merupakan dasar dan kunci kemajuan bangsa. Untuk itu, guru memiliki peran yang sangat mulia. Tugas guru tidak hanya menjadikan anak pintar, tetapi juga membuat anak paham pada kehidupan.

Dalam diskusi tersebut, Budi Muliawan juga menyampaikan peran strategis dan pentingnya generasi muda, mahasiswa. Berbagai peristiwa penting seperti tonggak kebangkitan nasional tahun 1908, Sumpah Pemuda 1928, Proklamasi 1945, dan perubahan tatanan politik yang terjadi pada tahun 1966 dan 1998, tak lepas dari peran besar mahasiswa.

Dari catatan perjalanan sejarah bangsa itulah, Budi Muliawan menyebut, bangsa ini selalu menunggu peran dan kiprah generasi muda. "Kepada pemuda dan mahasiswa-lah, estafet kepemimpinan bangsa akan diserahkan", tuturnya. Dalam menghadapi perubahan zaman, diharapkan generasi muda meningkatkan kemampuan, adaptif dengan alih teknologi, serta tidak berhenti

dalam berinovasi. "Juga tetap berpegang teguh pada nilai-nilai luhur kehidupan berbangsa dan bernegara. Hanya dengan cara itulah, generasi muda, mahasiswa, bisa terus berkontribusi dalam membangun bangsa dan negara," tambahnya.

Pembicara lainnya, Muhammad Burhanudin, mengatakan agar terus bisa berkontribusi dalam pembangunan, mahasiswa harus bisa meningkatkan kreativitas dan inovatif. Dua hal tersebut dapat memberikan peluang yang lebih besar, dibanding mereka yang hanya berdiam dan pasrah terhadap apa yang ada di hadapannya. ❑

Pemotongan Bantuan Pesantren

HNW Minta Kemenag Tindak Tegas

Kemenag harus serius melakukan reformasi birokrasi dan pendataan madrasah serta pesantren sehingga tidak lagi terjadi penyimpangan dalam penyaluran bantuan.

WAKIL Ketua MPR-RI sekaligus Anggota Komisi VIII DPR-RI membidangi urusan agama, Dr. H.M. Hidayat Nur Wahid, MA., minta Kementerian Agama menindak para pihak yang memotong bantuan Pesantren sesuai dengan rekomendasi laporan terbaru dari Indonesia Corruption Watch (18/4/2022). HNW, sapaan akrab Hidayat Nur Wahid, juga mendorong ICW melaporkan temuan mereka kepada aparatur penegak hukum sehingga bisa ditindaklanjuti.

"Saya menyayangkan bila benar ada potongan bantuan pesantren oleh oknum di berbagai daerah. Kemenag harus serius melakukan reformasi birokrasi dan pendataan madrasah serta pesantren sehingga tidak lagi terjadi penyimpangan dalam penyaluran bantuan. Dan, menindak tegas oknum internal yang terbukti memotong bansos," ujar HNW dalam keterangannya di Jakarta, Ahad (29/5/2022).

Wakil Ketua Majelis Syura PKS ini menjelaskan, madrasah dan pesantren mendapatkan bantuan di tengah pandemi Covid-19 dengan total anggaran sebesar Rp 2,599 Triliun. Bantuan tersebut didistribusikan pada periode Semester II 2020 hingga Semester I 2021. Pada IHPS Semester 1 2021 Badan Pemeriksa Keuangan menemukan permasalahan tersebut, di mana ditemukan penyaluran BOP lebih dari satu kali baik pada pesantren maupun madrasah setidaknya pada 1.072 lembaga. Kondisi itu menyebabkan potensi kerugian negara sebesar Rp 62,2 Miliar.

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

"Karena sudah jadi temuan BPK sejak tahun 2021, seharusnya Kemenag sudah melakukan langkah-langkah perbaikan dan koreksi yang memadai. Munculnya laporan terbaru dari ICW menjadi momentum bagi Kemenag untuk menyempurnakan koreksi tersebut dan menjelaskannya kepada publik. Jangan sampai nama baik pesantren justru tercemar karena komunikasi atau bahkan perbaikan tersebut tidak dilaksanakan," ujarnya.

HNW menilai, koreksi ICW atas bansos pesantren menjadi bukti perhatian publik atas pentingnya bantuan tersebut. Sayangnya, semenjak semester II 2021 tidak ada lagi bantuan pesantren, padahal dampak dari Covid-19 masih terjadi di banyak pesantren dan madrasah.

"Oleh karena itu, sejak awal kami mendorong agar bantuan pesantren dan madrasah tetap dilanjutkan, bukan justru dipangkas dan dipotong oleh oknum, apalagi sampai dihapuskan oleh pemerintah. Adapun temuan BPK dan masyarakat agar menjadi perbaikan bagi Kemenag untuk lebih amanah dalam penyaluran bantuan," pungkasnya. ❑

Menerima Bupati Gunung Kidul, Sunaryanta

Bamsoet Ajak Lestarikan Seni dan Budaya Bangsa

Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo, mengapresiasi Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul yang telah menggelar Pawai Budaya pada rangkaian peringatan HUT ke-191 Kabupaten Gunungkidul, DI Yogyakarta.

KETUA MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Bambang Soesatyo, menuturkan, seiring perkembangan zaman dan derasnya arus globalisasi, upaya untuk melestarikan seni dan budaya akan dihadapkan pada makin kompleks tantangan serta persaingan global. Agar seni dan budaya bangsa tidak menguap dan tergilas oleh laju peradaban harus menjadi legasi yang diwariskan, khususnya kepada generasi muda bangsa.

"Tidak dapat kita pungkiri bahwa globalisasi mempunyai andil pada tergerusnya budaya bangsa. Tetapi di sisi lain, kita juga harus mawas diri dan mengakui bahwa sepinya diskursus kebudayaan dari ruang publik juga disebabkan oleh kurangnya kepedulian dan kepekaan kita untuk menjaga dan melestarikan budaya bangsa," ujar Bamsoet usai menerima Sunaryanta, Bupati Gunungkidul, DI Yogyakarta, di Yogyakarta, Ahad (29/5/22).

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan, ini mengapresiasi Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul yang telah menggelar Pawai Budaya pada rangkaian peringatan HUT ke-191 Kabupaten Gunungkidul. Pawai Kebudayaan yang diselenggarakan membuktikan keberpihakan untuk memajukan kebudayaan selaras dengan amanat konstitusi.

"Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 32 Ayat (1) mengamanatkan bahwa negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Ketentuan tersebut mencerminkan pengakuan adanya dua peran penting kebudayaan, yaitu dalam membentuk jati diri bangsa serta dalam menyikapi modernitas dan laju peradaban zaman," kata Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia, ini menyakini dengan berbagai potensi sumberdaya yang dimiliki, utamanya karakter masyarakat Gunungkidul yang giat bekerja dan gigih berusaha, Kabupaten Gunungkidul akan menjadi daerah yang cepat melakukan recovery pasca pandemi. Optimisme ini misalnya tergambar dari target pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pariwisata pada tahun 2022 sebesar Rp 27 miliar, atau naik Rp 15 miliar dibanding tahun 2021.

"Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul harus terus menggenjot sektor pariwisata yang saat ini sedang 'naik daun' agar mampu mencapai PAD yang ditargetkan. Capaian PAD dari retribusi pariwisata di Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, pada libur Natal 2021 dan Tahun Baru 2022, mencapai Rp1,26 miliar. Sebanyak 177.890 orang mengunjungi Gunungkidul selama libur Natal 2021 dan Tahun Baru 2022. Diharapkan wisatawan yang berkunjung ke berbagai destinasi wisata di Gunungkidul terus meningkat, menyusul kebijakan pemerintah yang memberikan kelonggaran persyaratan dalam berpergian," pungkas Bamsoet. ❑

H. Bambang Soesatyo, SE., MBA.
Ketua MPR RI

Beradaptasi dengan Perubahan Iklim untuk Mengantisipasi Ekses

PERUBAHAN iklim dengan segala dampaknya menuntut negara-bangsa dan semua elemen masyarakat untuk segera beradaptasi. Urgensi beradaptasi dengan perubahan iklim akan memampukan semua orang memahami ekses dan meminimalisir kerugian serta mencegah korban jiwa.

Banjir rob yang menyergap kawasan pantai utara (Pantura) Jawa Tengah (Jateng) dan pesisir Jawa Timur baru-baru ini menjadi fakta yang relevan untuk mendorong dan membangkitkan kesadaran semua pihak tentang ragam dampak perubahan iklim. Utamanya, karena dampak itu tak jarang menghadirkan ekses yang ekstrim, seperti kerusakan properti akibat diterjang angin kencang maupun banjir bandang. Ekses lainnya meliputi penurunan kualitas lingkungan hidup dan serta dampak buruk terhadap kesehatan masyarakat.

Banjir rob di pesisir utara Jawa Tengah bukanlah peristiwa baru. Kejadian ini sering berulang sehingga sudah diantisipasi dengan membangun tanggul. Namun, peristiwa baru-baru ini seperti menghadirkan penjelasan tentang eskalasi dampak perubahan iklim. Mulai terjadi sejak Senin (23/5), genangan air meluas ke beberapa wilayah selama beberapa hari.

Menurut data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), hingga hari keempat atau Jumat (27/5), hampir seluruh wilayah kabupaten dan kota di sepanjang pesisir pantura Jawa Tengah dilanda banjir rob. Wilayah yang terdampak meliputi Kabupaten Brebes, Kabupaten Tegal, Kota Tegal, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, Kabupaten Batang, Kabupaten Kendal, Kota Semarang, Kabupaten Demak, Kabupaten Jepara, Kabupaten Pati, dan Kabupaten Rembang. Di Rembang, banjir rob merusak banyak rumah warga dengan nilai kerugian miliaran rupiah.

Banjir rob di hampir seluruh pesisir Jawa Timur juga menyebabkan kerugian masyarakat. Di Kabupaten Tuban, rumah warga di Desa Gadon, Desa Sugihwaras, Kelurahan Karangsari, dan Kelurahan Kingking terendam. Selain itu, ratusan petambak di Gresik harus menanggung rugi ratusan juta rupiah. Di Kecamatan Ujungpangkah, lima hari banjir rob merendam ribuan hektar tambak ikan bandeng dan udang windu milik petani.

Dampak banjir rob terhadap warga di Kota Semarang mengajarkan beberapa aspek. Langkah antisipasi untuk meminimalisir dampak rob di Semarang sudah dilakukan tahun-tahun sebelumnya dengan membangun tanggul di pelabuhan Tanjung Emas. Namun, kenaikan muka air laut akibat perubahan iklim merusak tanggul itu pada Senin (23/5). Tanggul Tanjung Emas yang jebol menyebabkan air rob masuk ke permukiman warga dan menggenangi sejumlah wilayah di kawasan itu.

Para ahli telah mengingatkan bahwa kenaikan muka air tanah akan terus terjadi. Di beberapa wilayah,

muka air tanah bahkan sudah di atas permukaan tanah. Sebagai contoh kasus, beberapa portal media pada akhir tahun lalu melaporkan sebuah rumah ibadah di kawasan Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara, menjadi saksi tentang naiknya level muka air laut dan turunnya permukaan tanah. Dalam laporan itu, diperlihatkan gambar tenggelamnya sebagian bangunan rumah ibadah yang berlokasi tepat di balik tanggul besar penahan air laut di Pelabuhan Sunda Kelapa.

Jika kecenderungan naiknya muka air laut tidak ditanggapi dengan perencanaan pembangunan yang relevan, proses tenggelamnya bangunan di pesisir pantai Jakarta ini bisa terjadi juga di pesisir pantai daerah lain. Oleh karena naiknya muka air laut disebabkan oleh perubahan iklim, secara tidak langsung muncul dorongan bagi semua orang untuk segera beradaptasi dengan beragam dampak perubahan iklim itu.

Para ahli sudah mengingatkan bahwa perubahan iklim juga menghadirkan ancaman yang harus diwaspadai. Dalam The Global Risk Report 2019, World Economic Forum telah mengingatkan bahwa perubahan iklim menjadi faktor utama penyebab musibah. Wujud musibahnya beragam; mulai dari bencana alam, cuaca ekstrem, krisis pangan dan krisis air bersih, hilangnya keanekaragaman hayati serta rusaknya ekosistem. Dalam konteks Indonesia, kasus tenggelamnya bangunan di pesisir Jakarta, ekses banjir rob di Pantura Jateng dan pesisir Jatim, layak dijadikan contoh tentang ancaman dari perubahan iklim itu.

Dalam tahun-tahun terakhir ini, muncul kesadaran dan ambisi global untuk menurunkan suhu bumi tidak lebih dari 1,5 derajat celcius dibandingkan masa pra-industri. Salah satu pendekatannya adalah mengakhiri penggunaan energi fosil yang polutif dengan beralih ke energi hijau. Sayangnya, belum ada yang tahu kapan upaya pemulihan suhu bumi itu bisa diwujudkan, kendati target waktu sering ditetapkan. Target ini akan kembali dibahas dalam forum G-20 di Bali Oktober-November 2022 mendatang.

Dari kecenderungan itu, bisa ditarik kesimpulan bahwa ancaman dari perubahan iklim masih membayangi kehidupan bersama hingga beberapa tahun ke depan. Maka, tantangan bersamanya adalah mengkreasi langkah dan upaya untuk meminimalisir dampak buruk perubahan iklim. Pengalaman sudah mengajarkan dan menunjukkan apa saja wujud dari dampak dan ekses perubahan iklim.

Berkait dengan ekses itu, layak untuk disimak kajian Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) tentang potensi kerugian yang ditimbulkan oleh dampak perubahan iklim. Menurut Bappenas, jika tidak ada intervensi kebijakan, dampak perubahan iklim berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi nasional hingga Rp 544 triliun sepanjang periode 2020-2024.

Memang, mengeliminasi dampak perubahan iklim dalam konteks sekarang mungkin tidak mudah. Paling relevan adalah meminimalisir dampak dan eksesnya. Maka, langkah paling utama adalah mendorong semua orang, termasuk pemerintah dan semua pemerintah daerah, untuk beradaptasi dengan perubahan iklim. Dengan beradaptasi, akan muncul pemahaman tentang dampak dan ekses perubahan iklim.

Dengan memahami dampak dan ekses perubahan iklim, perencanaaan pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah idealnya mengacu pada ancaman itu, sehingga ekses bencana seperti banjir rob di Jateng dan Jatim dapat diminimalisir. ❑

Ahmad Basarah

A-historis Jika Ada Ormas Anti Pancasila

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

WAKIL Ketua MPR RI, Ahmad Basarah, menjadi narasumber dalam kegiatan Pendidikan dan Pelatihan bagi Organisasi Massa (Ormas) yang diinisiasi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu 25 Mei 2022.

Mengawali ceramah kebangsaannya, Basarah menegaskan bahwa forum semacam ini demikian penting bagi bangsa Indonesia. Tidak hanya untuk memperkokoh dan memantapkan ideologi Pancasila, melainkan juga sebagai sarana refleksi bahwa ormas, organisasi sosial, organisasi partai politik memiliki andil penting dalam mendirikan NKRI dengan Pancasila sebagai dasar negaranya.

"Bahwa berdirinya NKRI bukan jatuh dari langit. Berdirinya NKRI merupakan jasa para pejuang, syuhada bangsa, dan tokoh-tokoh bangsa lainnya yang multi etnis dan menyepakati Pancasila sebagai dasar negara. Maka kalau hari ini ada ormas, orsospol yang anti Pancasila maka hal tersebut a-historis," kata Basarah mengawali ceramahnya.

Di hadapan peserta seminar, Basarah memberikan contoh ormas-ormas yang telah dibubarkan pemerintah, karena terbukti menganut, mengembangkan serta menyebarkan ajaran yang bertentangan dengan Pancasila.

Padahal, Undang Undang Ormas No. 16 tahun 2017 menegaskan, salah satu tujuan pembentukan ormas adalah untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Dalam undang-undang ini juga diatur ormas dilarang menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila. Satu tarikan nafas dengan ormas, UU Partai Politik juga demikian. Dalam Pasal 13 UU Partai Politik juga menegaskan bahwa partai politik berkewajiban mengamalkan Pancasila.

Terhadap realitas otentik yang dihadapi bangsa Indonesia, Basarah mengajak kepada seluruh peserta untuk masuk dan menyelami alam pikiran pandiri bangsa yang telah sepakat menjadikan Pancasila sebagai dasar negara.

Sejarah perjalanan bangsa merekam jelas, bagaimana peran penting organisasi-organisasi pergerakan. Sebut saja ormas, Boedi Oetomo, Sarekat Islam, Jong Java, Jong Celebes, hingga PNI berperan penting merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Jejaknya terlihat jelas dari Kongres Pemuda II atau Sumpah Pemuda 1928, hingga Proklamasi Kemerdekaan tahun 1945.

Lebih lanjut Basarah menyatakan, sebelum kemerdekaan diproklamasikan, para pendiri bangsa, syuhada bangsa, dan tokoh

tokoh bangsa telah sepakat menjadikan Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila inilah yang merupakan Maha Karya para pendiri bangsa.

Pancasila disepakati sebagai dasar negara merupakan kesepakatan para pendiri bangsa. Ada peran penting Bung Karno, Bung Hatta, KH. Wahid Hasyim, Ki Bagus Hadikusumo, A.A. Maramis, Latuharhary dan para pendiri bangsa lainnya.

"Inilah pelajaran bernegara penting yang bisa kita ambil hikmahnya. Jas Merah (jangan sekali-kali meninggalkan sejarah) dan Jas Hijau (jangan sekali-kali hilangkan jasa Ulama) saling melengkapi. Keduanya merupakan slogan kebersamaan. Para pendiri bangsa telah mewariskan Pancasila sebagai dasar negara.

Terakhir, Basarah mengajak segenap aktivis ormas yang hadir untuk memegang teguh dan mengamalkan Pancasila. "Pancasila adalah ideologi yang mengikat bagi seluruh komponen bangsa, begitu juga dengan ormas, orsospol dan partai politik terikat dengan ideologi Pancasila. Mari kita warisi api perjuangan para pendiri bangsa. Mari kita yakini dan amalkan Pancasila," tandas Basarah. ❑

Jawa Tengah

Muhammadiyah Menyebut Indonesia adalah Darul Ahdi Wa Syahadah

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

DI HADAPAN Keluarga Besar Pimpinan Wilayah (PW) Pemuda Muhammadiyah Jawa Tengah, Wakil Ketua MPR RI Dr. H.M. Hidayat Nur Wahid, MA., kembali mengoreksi istilah Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan yang kerap disebut masyarakat. Istilah itu, menurut Hidayat, tidak boleh digunakan lagi, karena sudah dilarang oleh Mahkamah Konstitusi. Sebagai gantinya digunakanlah istilah Sosialisasi Empat Pilar MPR RI (Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi negara, NKRI sebagai Bentuk Negara, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara).

"Sosialisasi Empat Pilar MPR dengan masyarakat, khususnya warga Muhammadiyah, tidak dimaksudkan untuk menggurui, maupun seperti mengasini air laut. Tetapi mengingatkan kembali hasil kesepakatan para pendiri bangsa agar selalu dilaksanakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena saat ini, banyak orang yang sudah melupakan kesepakatan para pendiri bangsa. Bahkan, ada kelompok masyarakat yang mencoba memisahkan bangsa Indonesia dari dasar dan ideologi serta konstitusi negaranya. Ada juga yang berniat menganti Pancasila dengan dasar dan ideologi yang lain," kata HNW, sapaan Hidayat Nur Wahid.

Hal itu disampaikan HNW pada acara Sosialisasi Empat Pilar MPR RI, yang diselenggarakan MPR bekerjasama dengan PW Pemuda Muhammadiyah Provinsi Jawa Tengah. Acara tersebut berlangsung di Hotel Le Beringin Kota Salatiga, Sabtu salam (21/5/2022). Ikut hadir pada acara tersebut Wakil Walikota Salatiga Dr. H. Muh. Haris, M.Si.; Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Salatiga Dr. H. Imam Sutomo; Bendahara Umum PP Pemuda Muhammadiyah Zaedi Basiturrazaq; Ketua PW Pemuda Muhammadiyah Jawa Tengah Eko Pujiatmoko, S.E., M.Ak.; Direktur LBH PP Muhammadiyah Taufik Nugroho, S.H., M.H., serta Direktur LBH PWM Jawa Tengah Ponxi Yoga Wiguna, S.H., M.H.

Salah satu contoh banyaknya orang yang lupa terhadap UUD NRI Tahun 1945, kata Hidayat, bisa ditemukan pada saat terjadi serangan Israel terhadap warga Palestina tahun 2021. Saat itu, ada sekelompok orang yang mencemooh dan meributkan bantuan masyarakat Indonesia kepada warga Palestina. Tak hanya mencemooh, mereka juga mencoba mengusik aksi kemanusiaan tersebut.

"Mereka lupa bahwa alinea pertama Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 tegas mengatakan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Oleh karena itu bangsa Indonesia menolak penjajahan di atas dunia. Sikap seperti itu sudah dijaga dan dipertahankan oleh semua Presiden Indonesia, dari Ir. Soekarno hingga Joko Widodo. Inilah buktinya bahwa kesepakatan para pendiri bangsa Indonesia seperti yang ada pada Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 itu harus selalu disosialisasikan agar senantiasa diingat dan terus dijalankan," kata HNW.

Bukti terbaru, banyak orang Indonesia melupakan kesepakatan para pendiri bangsa bisa ditemukan pada kasus maraknya aksi lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT). Kasus ini mulai viral karena unggahan Deddy Corbuzier, meski kemudian sang pemilik account meminta maaf dan menurunkan contennya. Tetapi kasus LGBT kembali menghangat karena pengibaran bendera LGBT di Kedutaan Besar Inggris di Jakarta.

"Sila pertama dasar dan ideologi negara adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Inilah kesepakatan para pendiri bangsa. Pertanyaannya, agama mana yang mentolerir LGBT, pasangan yang mencintai sesama jenis. Mereka ini harus diingatkan bahwa LGBT bertentangan dengan Pancasila. Dan inilah buktinya bahwa Pancasila masih sangat perlu disosialisasikan," kata HNW.

Sementara upaya untuk mengganti Pancasila dengan dasar dan ideologi yang lain, kata Hidayat, pernah dilakukan oleh PKI. Melalui pemberontakan yang terjadi pada September 1948 dan 1965, PKI berusaha mengganti

Pancasila dengan ideologi komunisme. Di masa kini, upaya untuk mengubah kesepakatan para pendiri bangsa masih terus dilakukan. Buktinya adalah munculnya RUU Haluan Ideologi Pancasila. Karena dalam RUU itu masih menyebut soal Trisila dan Ekasila. Itu berarti menurunkan derajat Pancasila. Dan, tidak mengakui kesepakatan para pendiri bangsa tentang dasar dan Ideologi negara pada 18 Agustus 1945.

"Kesepakatan para pendiri bangsa tentang Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 sudah final. Bahkan, saat UUD diamandemen pada era reformasi, dinyatakan bahwa Pembukaan UUD yang di dalamnya ada teks Pancasila tidak boleh diubah. Selain Pembukaan, bentuk negara NKRI juga sudah final tidak boleh mengalami perubahan," kata Hidayat lagi.

Kesepakatan para pendiri bangsa tentang dasar dan ideologi Negara, menurut HNW sapaan Hidayat Nur Wahid, harus senantiasa dijaga dan dilestarikan. Karena proses keputusannya melibatkan seluruh wakil bangsa Indonesia. Lintas agama dan kaum nasionalis, juga seluruh perwakilan ras dan suku bangsa.

"Muhammadiyah termasuk yang selalu ikut aktif bersama NU dan ormas Islam lain, juga ormas non Islam, serta tokoh nasionalis. Mulai dari KH. Ahmad Dahlan yang ikut mendirikan Budi Utomo dan Jamiatul Khair. Kemudian pada masa persiapan kemerdekaan muncul tokoh Muhammadiyah lainnya, seperti KH. Mas Mansyur, Kahar Muzakir, Ki Bagus Hadikusumo, hingga Mr. Kasman Singodimedjo. Karena itu munculnya kasus Islamophobia maupun Indonesia-phobia juga upaya memisahkan antara Islam dari Indonesia adalah bukti penguasaan sejarah yang masih dangkal. Mereka harus mau memperdalam pelajaran sejarah bangsanya," kata HNW.

Sejak dulu, kata HNW, para tokoh Islam bersama non-Islam dan nasionalis sudah saling mengikat satu sama lain. Karena itu, Muhammadiyah menyebut bangunan permusyawaratan yang membentuk Indonesia sebagai Darul Ahdi Wa Syahadah, artinya negara kesepakatan dari perjanjian yang disepakati. ❑

MBO

Desa Niha One, Flotim

Haerul Amri, Anggota Fraksi Partai Nasdem, Sosialisasi Empat Pilar MPR RI

ANGGOTA MPR RI dari Fraksi Nasdem, Moh. Haerul Amri, Rabu (25/5/2022), melaksanakan sosialisasi Empat Pilar MPR di Desa Niha One, Kecamatan Ile Boleng, Flores Timur (Flotim) pada Rabu (25/5/2022). Sosialisasi ini bertema "Pemuda Menjawab Nilai Bhinneka Tunggal Ika kepada Masyarakat."

Menurut Moh. Haerul Amri, sosialisasi ini bertujuan untuk mengingatkan kembali agar masyarakat memahami lebih dalam mengenai nilai-nilai luhur yang terkandung di dalam Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhineka Tunggal Ika.

Anggota Fraksi Partai Nasdem dari daerah pemilihan 10 Nusa Tenggara Timur (NTT) ini berharap, adanya kegiatan sosialisai Empat Pilar MPR RI ini dapat berdampak pada meningkatnya kesadaran masyarakat tentang kehidupan berbangsa dan bernegara.

Empat Pilar MPR RI itu terdiri dari Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, kemudian Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi Negara dan Ketetapan MPR. Lalu Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai bentuk Negara, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara," ungkap Haerul Amri.

Haerul menambahkan, Indonesia sebagai bangsa yang majemuk masih perlu penguatan dalam penghayatan dan pengamalan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, mengingat masih munculnya pemahaman yang keliru dan sempit.

"Seperti pemahaman agama yang sempit dan selalu menganggap kelompoknya yang paling benar dapat menimbulkan fanatisme kedaerahan sehingga dapat merobohkan persatuan dan kesatuan yang sudah dibangun," sebut anggota MPR RI Fraksi Nasdem ini.

Selanjutnya, Haerul menegaskan, saat ini terkesan kurang berkembangnya penghargaan atas kemajemukan dan kebhinnekaan, keteladanan dalam bersikap, dan prilaku serta kurang maksimalnya penegakan hukum.

Oleh sebab itu, Moh Haerul Amri berpesan kepada masyarakat agar memperkuat ketahanan keluarga dengan kebersamaan dan kesolidan, serta kerukunan. Perlu diketahui, Indonesia memiliki kekayaan dan keberagaman bangsa dengan banyak suku bangsa, bahasa, adat istiadat dan budaya, tetapi tetap satu yakni bangsa Indonesia.

"Jadi kita harus bangga menjadi warga Negara Indonesia, bukan malah terpecah belah," tegasnya.

Hadir dalam acara sosialisasi ini, antara lain Muhammad Husen DB sebagai tokoh muda NTT.; Tenaga Ahli Badan Sosialisasi MPR RI, H. Syarief Abdulah Alkadrie; Sekertaris Fraksi Nasdem MPR RI; Kk Julie Sutrisno Laiskodat, Anggota MPR RI, melalui zoom meeting. ❑

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Gedung MPR/DPR Senayan

MPR RI dan ICMI Selenggarakan Silaturahim Kebangsaan Akhir Mei 2022

KETUA MPR RI sekaligus Wakil Ketua Penasihat Pusat Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), Bambang Soesatyo, mengungkapkan, ICMI bersama MPR RI akan menyelenggarakan Silaturahim Kebangsaan sekaligus Sosialisasi Empat Pilar MPR RI pada Senin, 30 Mei 2022, di Gedung MPR/DPR Senayan, Jakarta. Sebagai upaya para cendekiawan muslim dalam memperkuat solidaritas kebangsaan, khususnya dalam menghadapi pemulihan ekonomi dan peningkatan kualitas pendidikan yang menjadi tantangan terbesar pasca pandemi Covid-19.

"Sebagaimana laporan jajak pendapat Litbang Kompas yang dilakukan pada pertengahan Mei 2022, sebanyak 30,2% responden menilai sektor ekonomi sebagai sendi kehidupan yang paling membutuhkan perhatian pasca pandemi Covid-19. Disusul 21,7% responden yang menilai sektor pendidikan juga harus mendapat perhatian serius," ujar Bamsoet usai menerima Pengurus Pusat ICMI, di Jakarta, Senin (23/5/22).

Pengurus ICMI yang hadir, antara lain Wakil Ketua Umum Priyo Budi Santoso,

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Bendahara Asri Das, Sekretaris Juliana Wahid, dan Ketua Panitia Silaturahim Kebangsaan sekaligus Sosialisasi Empat Pilar MPR RI Muhammad Syukur Mandar.

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, di bidang pendidikan, merujuk data tahun 2018 sebelum pandemi, rata-rata kemampuan membaca, sains, dan matematika pelajar nasional menempati urutan 74 dari 79 negara dunia yang disurvei. Karenanya, perlu diwaspadai agar pembatasan aktivitas pembelajaran secara langsung tidak menyebabkan generasi pembelajar tumbuh sebagai 'lost generation', generasi yang terpaksa kehilangan fasilitasi dan referensi akademis yang memadai.

"Himpitan kebutuhan ekonomi dan keterbatasan akses pembelajaran jarak jauh menjadi faktor utama meningkatnya angka putus sekolah anak SD (sebanyak 10 kali lipat dibandingkan tahun 2019 sebelum pandemi Covid-19). Merujuk perspektif global, laporan dari 3 entitas internasional, yaitu UNESCO, UNICEF, dan Bank Dunia, diperkirakan generasi pembelajar yang terdampak pandemi berpotensi kehilangan US$ 17 triliun pendapatan seumur hidup, atau setara dengan 14% dari PDB global saat ini," jelas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini menerangkan, dampak pandemi juga telah menggerus sektor perekonomian dengan menyebabkan disrupsi ketenagakerjaan yang berdampak terhadap sekitar 21,32 juta tenaga kerja hingga pertengahan tahun 2021. Sekaligus menggoyahkan salah satu pilar perekonomian nasional, yaitu UMKM. Sekitar 40% UMKM terpaksa berhibernasi atau bahkan gulung tikar.

"Sementara di bidang sosial, sangat miris dengan tingginya kasus kejahatan seksual di tanah air. Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2021, dalam kurun waktu lima tahun dari 2016 hingga 2020, kejahatan seksual telah meningkat 31%, dari 5.237 menjadi 6.872 kasus. Lebih memprihatinkan, menurut catatan KOMNAS Perempuan, korban pelecehan dan kekerasan seksual terbanyak justru terjadi di kampus 27%, dan pesantren 19%," pungkas Bamsoet. ❑

Boyolali

Dirosah Kebangsaan di Pesantren Daarul Fath

Umat Islam Harus Memahami Keberagaman dan Bekerjasama dengan Kelompok Manapun

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

KAMIS, 26 Mei 2022, ratusan santri dan santriwati Pondok Pesantren Tahfizhul Quran (PPTQ) Daarul Fath, Pengging, Kecamatan Teras, Boyolali, Jawa Tengah, berkumpul di bawah tenda yang mereka didirikan di halaman pesantren. Mereka berkumpul di sana untuk mengikuti 'Dirosah Kebangsaan'.

Dirosah Kebangsaan dengan tema 'Pesantren Sebagai Salah Satu Pilar Penguatan Nilai-Nilai Kebangsaan' itu sangat istimewa. Dalam kegiatan yang mendapat perhatian dari Forum Pimpinan Daerah Kabupaten Boyolali itu, para santri dan santriwati mendapat pemaparan tentang nilai-nilai kebangsaan dari Wakil Ketua MPR, Dr. Hidayat Nur Wahid, MA.; Kasatbimas Polres Boyolali, AKP Maryanto; dan Danramil Teras Kapten Dwi Supriyanto.

Kepada wartawan, HNW mengatakan, peserta Dirosah Kebangsaan bukan generasi muda biasa. Mereka adalah generasi muda calon penghafal Alquran. Sebagai generasi muda yang didik di lembaga pendidikan agama Islam, para santri itu akan menjadi pelanjut, penerus, dan pengganti ulama, kiai, dan ustad yang ada. "Mereka juga akan menjadi generasi penerus bangsa", ujar alumni Pondok Pesantren Gontor itu.

Dalam pemaparan materi, HNW menyampaikan sejarah peran-peran yang telah dilakukan oleh pesantren, ulama, kiai, dan santri, dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan bangsa di tengah keberagaman. Teladan yang diwariskan oleh mereka diharap oleh politisi dari Partai Keadilan Sejahtera itu tetap dirawat, dijaga, dan diteruskan oleh para santri dan santriwati.

Untuk itu, HNW menegaskan, generasi muda yang menempuh pendidikan di pesantren selain fokus untuk belajar dan menghafal Alquran, juga mengamalkan ajaran Alquran tentang menghormati keberagaman umat manusia. Keberagaman suku, agama, bahasa, dan perbedaan lainnya di Indonesia, menurut pria asal Klaten, Jawa Tengah, itu juga perlu dipahami dan dimengerti oleh para santri dan santriwati. "Sebagai umat Islam kita wajib bekerjasama dengan kelompok manapun", paparnya. "Kita perlu bekerjasama dalam kebaikan dan kebajikan yang tidak melanggar hukum," tambahnya.

Keberagaman yang ada, menurut HNW, untuk diharmonisasikan bukan malah dijadikan sarana untuk memecah belah, adu domba, atau saling menegasi. "Para santri

dan santriwati pasti menghafal ayat-ayat tentang keberagaman," tuturnya. Ayat-ayat seperti itu harus diamalkan atau diaplikasikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. "Dari sinilah, pesantren akan menjadi pilar yang kuat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara", ujarnya.

Alumni program magister dan doktor Universitas Madinah, Arab Saudi, itu mengakui, keberadaan pondok pesantren di Indonesia dari waktu ke waktu semakin mendapat posisi yang semakin baik dalam dunia pendidikan di Indonesia. Banyak alumni pesantren diterima di berbagai perguruan tinggi favorit di dalam dan di luar negeri. "Saya mendengar alumni PPTQ Daarul Fath ada yang diterima di fakultas kedokteran", ujarnya.

Pria yang juga pernah nyantri di Pondok Pesantren Wali Songo, Ngabar, Ponorogo, itu mengatakan, Sosialisasi Empat Pilar MPR dilakukan dengan berbagai kelompok dan segmen masyarakat. Pondok pesantren yang memiliki peran strategis di masyarakat sering dan banyak dilibatkan dalam sosialisasi.

"Sosialisasi yang dilakukan oleh MPR direspon baik oleh pesantren," tuturnya. Pondok pesantren ingin agar acara seperti itu terus dilanjutkan di sana. "Nah, hari ini kita bekerjasama dengan PPTQ Daarul Fath untuk sosialisasi nilai-nilai kebangsaan," katanya. ❑

Pengukuhan ILUNI UIN Imam Bonjol Padang

Bamsoet Ajak Terapkan Nilai-Nilai Pancasila dalam Segala Aspek Kehidupan

KETUA MPR RI Bambang Soesatyo mengukuhkan Pengurus Pusat Ikatan Alumni Universitas Islam Negeri (ILUNI UIN) Imam Bonjol Padang periode 2021-2026 yang dipimpin Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Maneger Nasution. Sekaligus melakukan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI kepada segenap jajaran pengurus ILUNI dan mahasiswa serta sivitas akademika UIN Imam Bonjol, Padang.

Bamsoet, sapaan Bambang Soesatyo, menekankan, demi mewujudkan hadirnya Generasi Emas 2045 diperlukan kolaborasi dari seluruh lapisan masyarakat. Utamanya kalangan lembaga pendidikan yang menjadi pilar utama pengembangan sumber daya manusia.

UIN Imam Bonjol sebagai salah satu perguruan tinggi Islam terbesar di wilayah Sumatera Barat menjadi barometer penting bagaimana menjadikan Sumatera Barat sebagai basis lahirnya generasi yang membanggakan. Tidak hanya di pentas nasional, tetapi juga di kancah global.

"Sesuai nama besar yang disandang, kita dapat meneladani Tuanku Iman Bonjol yang gigih berjuang membela kebenaran, berani melawan musuh yang jauh lebih kuat, sosok pemimpin yang bertanggungjawab dan tangguh, mempunyai rasa persatuan yang tinggi, dan selalu memberikan contoh tindakan nyata," ujar Bamsoet dalam pengukuhan Pengurus Pusat ILUNI UIN Imam Bonjol 2021-2026 di Padang, Sumatera Barat, serta Sosialisasi Empat Pilar MPR RI, secara virtual dari Jakarta, Sabtu (21/5/22).

Terlebih dalam sejarahnya, lanjut Bamsoet, banyak founding fathers yang lahir dari Tanah Minang, misalnya Bung Hatta, Bung Sjahrir, Tan Malaka, Muhammad Yamin, H. Agus Salim, dan masih banyak lainnya. "Karenanya, besar harapan kita bahwa dari Tanah Minang ini pula lah nantinya akan menjadi tonggak kejayaan peradaban Indonesia," tambah Bamsoet.

Turut hadir dalam acara itu, antara lain Rektor UIN Imam Bonjol Padang, Martin Kustanti; Ketua DPRD Sumatera Barat, Supardi; serta Sekjen Majelis Ulama Indonesia, Amirsyah Tambunan.

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, semua pihak patut bersyukur bahwa setelah lebih dari dua tahun bergelut dengan pandemi Covid-19, saat ini kondisi bangsa sudah semakin membaik. Banyak pelajaran yang dapat dipetik dari pandemi Covid-19. Antara lain mengajarkan tentang pentingnya kebersamaan, kedisiplinan, saling mengingatkan, saling tenggang rasa, saling tolong-menolong. Sikap tersebut juga menjadi intisari dari nilai-nilai Empat Pilar MPR RI yang terdiri dari Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

"Pancasila dirumuskan para pendiri bangsa sebagai dasar dan tuntunan bernegara dengan mempertimbangkan aspek-aspek itu, melalui usaha penggalian, penyerapan, kontekstualisasi, rasionalisasi, dan aktualisasinya dalam rangka menopang keberlangsungan dan kejayaan bangsa. Untuk itu, Pancasila harus sungguh-sungguh didalami dan dikembangkan ke dalam kerangka konseptual, kerangka normatif, dan kerangka operatif. Pancasila tidak boleh hanya diekspresikan sebatas klaim kehebatan dalam ritual pernyataan dan pidato pejabat, atau diajarkan sebatas hafalan sejumlah butir moralitas. Tetapi harus diterapkan dalam segala aspek kehidupan," jelas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan ini menerangkan, sejalan dengan tuntutan reformasi dan perkembangan kebutuhan bangsa, MPR dengan semangat kenegarawanan, sejak tahun 1999 sampai tahun 2002 telah melakukan perubahan terhadap pasal-pasal UUD 1945 dalam satu rangkaian melalui empat tahapan perubahan. Perubahan tersebut mewujudkan konstitusi Indonesia yang memungkinkan terlaksananya penyelenggaraan negara yang modern dan demokratis.

"Semangat yang diemban dalam perubahan konstitusi tersebut adalah supremasi konstitusi; keharusan dan pentingnya pembatasan masa jabatan

Presiden dan Wakil Presiden; pemilihan umum yang dilaksanakan secara periodik setiap lima tahun sekali; pengaturan hubungan dan kekuasaan antarcabang kekuasaan negara secara lebih tegas, penguatan sistem check and balances antarcabang kekuasaan, penguatan perlindungan dan penjaminan hak asasi manusia, dan pengaturan hal-hal mendasar di berbagai bidang kehidupan," terang Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila dan Wakil Ketua Umum FKPPI ini menambahkan, meskipun memilih bentuk negara kesatuan, para pendiri bangsa sepakat bahwa untuk mengelola negara sebesar, seluas, dan semajemuk Indonesia, tidak bisa tersentralisasi. Negara dengan karakteristik seperti ini sepatutnya dikelola dengan melibatkan peran serta daerah dalam pemberdayaan ekonomi, politik dan sosial-budaya, sesuai dengan keragaman potensi daerah masing-masing, dengan mengedepankan prinsip dekonsentrasi dan desentralisasi.

"Sejalan dengan itu, konsepsi tentang semboyan negara dirumuskan dalam kalimat sakti Bhinneka Tunggal Ika, meskipun berbeda-beda, tetap satu jua. Di satu sisi, ada wawasan 'ke-eka-an' yang berusaha mencari titik-temu dari segala ke-bhinnekaan (keberagaman), yang terkristalisasi dalam dasar negara (Pancasila), Undang-Undang Dasar dan segala turunan perundang-undangannya, negara persatuan, bahasa persatuan, dan simbol-simbol kenegaraan lainnya. Di sisi lain, ada wawasan kebhinnekaan yang menerima dan memberi ruang hidup bagi aneka perbedaan, seperti aneka agama dan keyakinan, ragam budaya dan bahasa daerah, serta unit-unit politik tertentu sebagai warisan tradisi budaya," pungkas Bamsoet. ❑

Halal Bihalal dan Pelepasan Pegawai Purnabakti Setjen

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

SETJEN MPR RI menggelar acara halal bihalal Idul Fitri 1443 H sekaligus dibarengi dengan acara Pelepasan 14 Pegawai Purnabakti atau pegawai di lingkungan Setjen MPR yang sudah memasuki masa pensiun.

Acara yang dilaksanakan secara offline dan online di Ruang Delegasi, Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/5/2022) ini dihadiri Sesjen MPR Ma'ruf Cahyono, para pejabat eselon I-IV, para pegawai dan pegawai yang baru memasuki masa purnabakti.

Yang lebih istimewa lagi, acara ini juga dihadiri mantan Sekretaris Jenderal MPR yakni Bapak Rahimullah dan Eddie Siregar serta beberapa pensiunan Setjen MPR.

Mengawali kata sambutan, Rahimullah mengatakan bahwa momen kumpul bersama seperti halal bihalal ini adalah yang paling ditunggu semua terutama pegawai purnabakti untuk saling bertemu dan melepas kangen satu sama lain.

"Pertemuan ini menjadi momen yang baik buat kita semua untuk mengetahui keadaan kawan-kawan kita, apalagi kemarin selama dua tahun kita terhalang bertatap muka karena pandemi Covid-19. Momen ini juga untuk mengetahui sudah sejauh mana perkembangan Lembaga kita tercinta MPR ini," ujarnya.

Berikutnya, Sesjen MPR Ma'ruf Cahyono dalam kata sambutannya mengungkapkan bahwa momen halal bihalal ini adalah momen untuk lebih menguatkan lagi tali silaturahmi di lingkungan Setjen MPR.

"Momen halal bihalal ini juga sekaligus sebagai wadah informasi kepada terutama para mantan Sesjen MPR dan para pensiunan tentang sudah sejauh mana perkembangan yang dialami lembaga kit aini. Alhamdulillah sampai saat ini lembaga kita ini memiliki kemajuan dan prestasi yang bisa dibanggakan," katanya.

Ma'ruf Cahyono juga berterima kasih kepada pegawai yang baru memasuki masa purnabakti. "Terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya untuk bapak dan ibu yang karya dan baktinya sudah teruji selama mengabdi di Setjen MPR. Semoga, tetap sehat dalam menjalani masa pensiun dan tetap terjalin hubungan yang dekat dan erat dengan kami di Setjen MPR ini," tandasnya.

Di sesi terakhir, dilaksanakan acara ramah tamah. Satu persatu saling bersalaman, berfoto bersama. ❑

DER

Pembukaan Pelatihan Dasar (Latsar) CPNS Setjen MPR, DPR dan DPD

BERTEMPAT di Ruang Pustaloka, Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/5/2022) di gelar acara Pembukaan Pelatihan dasar (Latsar) CPNS yang diikuti sekitar 150 CPNS angkatan VII, VIII, IX, X di lingkungan MPR, DPR dan DPD.

Hadir dalam acara Sekretaris Jenderal MPR RI Ma'ruf Cahyono, Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar dan para pejabat teras Setjen MPR, DPR dan DPD.

Latsar ini dilaksanakan untuk menginternalisasikan nilai dasar ASN berAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif).

ASN agar bisa beradaptasi dengan perubahan di tengah era *triple disruption* dan kondisi VUCA *(Volatility, Uncertainty, Complexity and Ambiguity)*. Karena itu, pelatihan ini diharap mampu mengasah kompetensi sehingga bisa meningkatkan daya saing baik secara regional, nasional maupun global. ❑ **DER**

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Upacara Peringatan Bersama Harkitnas ke-114 Tahun 2022

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

PADA Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) ke-114 yang jatuh pada hari Jumat (20/5/2022), jajaran pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal MPR, DPR, dan DPD RI memperingatinya dengan melakukan Upacara bersama yang dihadiri secara offline dan online.

Tema Harkitnas yang diangkat pemerintah kali ini adalah 'Ayo Bangkit Bersama'. Hal ini bertujuan sebagai bentuk seruan untuk masyarakat Indonesia agar bisa bersama-sama bangkit dari keterpurukan akibat dampak pandemi Covid-19 yang telah melanda selama dua tahun terakhir ini.

Upacara yang digelar di Ruang Pustaloka, Gedung Nusantara IV, Kompleks Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta ini dihadiri para pejabat eselon I sampai IV Setjen MPR, DPR dan DPD.

Dalam kesempatan itu, Deputi Dewan Persidangan DPD RI Sefty Ramsiaty sebagai Pembina Upacara menyampaikan sambutan Menteri Komunikasi dan Informatika seputar Kebangkitan Bangsa. ❑ **DER**

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Yanuar Prihatin, MSi, Anggota MPR Fraksi PKB

Ini Menjadi "Warning" Bagi Pemerintah

PEMERINTAH dan masyarakat dikejutkan dengan kabar ratusan orang yang bakal diangkat menjadi abdi negara malah justru mengundurkan diri. Data dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) menyebutkan, sebanyak 105 orang Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2021 mundur setelah lolos seleksi dan mau diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) per Jumat 20 Mei 2022. Selain CPNS, ada ratusan pegawai lainnya yang mengundurkan diri setelah dinyatakan lolos tes Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Jumlah PPPK yang mengundurkan diri jauh melebihi CPNS yang mundur. Tercatat sebanyak lebih dari 400 orang, tepatnya 442 orang. PPPK yang mengundurkan diri setelah lolos menjalani tes. Dari 442 orang PPPK yang mengudurkan diri terdiri dari PPPK Guru dan PPPK Non Guru. Masing-masing sebanyak 384 PPPK Guru dan 58 PPPK Non Guru mengundurkan diri.

Ada beberapa alasan CPNS dan PPPK mengundurkan diri. Menurut Kepala Biro Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Kerja Sama BKN, Satya Pratama, alasan yang membuat ratusan CPNS dan PPPK mengundurkan diri adalah karena gaji dan tunjangan serta lokasi pekerjaan tidak sesuai ekspektasi, kehilangan motivasi, mendapatkan kesempatan lain, dan lain-lain.

Banyak pihak menyesalkan CPNS dan PPPK mengundurkan diri sebagai abdi negara. Lalu, bagaimana tanggapan anggota Dewan mengenai pengunduran diri CPNS dan PPPK tersebut? Majelis mewawancarai anggota MPR dari Fraksi PKB, Yanuar Prihatin, M.Si. Berikut wawancara dengan Yanuar Prihatin yang juga Wakil Ketua Komisi II DPR membidangi aparatur negara. Petikannya.

Sejumlah Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tepatnya sebanyak 105 orang dan sebanyak 442 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) mengundurkan diri setelah lolos mengikuti seleksi penerimaan pegawai. Apa pendapat Bapak?

Sebenarnya pengunduran diri merupakan hak asasi setiap orang. Kita menghormati jika memang pengunduran diri tersebut merupakan keputusan pribadi seseorang. Kita harus melihat apa yang menjadi penyebab atau alasan mereka menundurkan diri. Sebab, kejadian ini unik. Ketika banyak orang berlomba-lomba menjadi PNS, justru mereka yang sudah lulus seleksi malah memilih mundur. Sebenarya apa yang sedang terjadi?

Tentu banyak kemungkinan mengapa mereka mengundurkan diri. Pertama, bisa soal honor, gaji, atau pendapatan. Kedua, lingkungan kerja. Ketiga, ketidaksesuaian dengan jenis pekerjaan, dan lainnya. Dari banyak kemungkinan itu, kita bisa mengambil langkah-langkah perbaikan. Dengan mundurnya para pegawai itu, pejabat pusat dan di daerah perlu melakukan antisipasi terhadap pelayanan kepada masyarakat. Ini merupakan "warning" kepada pemerintah.

Kalau dilihat dari alasan pengunduran diri adalah karena gaji dan lokasi kerja yang tidak sesuai ekspektasi. Bagaimana menurut Bapak?

Ini sudah menjadi problem dari dulu. Ambil contoh, ketika seseorang ditempatkan di daerah yang jauh tetapi mendapat gaji yang sama. Seharusnya mereka yang ditempatkan di lokasi terluar, terpencil, mendapat

honor yang berbeda. Ini membuat banyak pegawai yang tidak berminat ditempatkan di lokasi yang jauh. Sudah ditempatkan di daerah yang jauh, pendapatan yang diperoleh tidak memadai. Ini harus dibalik, yaitu mereka yang ditempatkan di daerah terpencil mendapatkan reward yang lebih. Jadi, pegawai justru berlomba-lomba ditempatkan di daerah yang jauh dan tidak menjadi masalah.

Masih terkait dengan lokasi, selain CPNS yang mengundurkan diri karena alasan lokasi, dengan alasan yang sama ada juga kecenderungan PNS yang menolak pindah ke Ibu Kota baru di Penajam Paser Utara. Bagaimana menurut Bapak?

Kalau PNS menolak pindah ke ibu kota negara baru agak berbeda kasusnya dengan alasan CPNS mengundurkan diri. Ada kewajiban pemerintah akan merelokasi ASN atau PNS ke ibu kota negara. Pemerintah perlu mengindentifikasi kebutuhan ASN, pekerjaan, dan level tingkatan ASN yang menjadi prioritas untuk pindah ke ibu kota negara baru, serta kapan waktu untuk mulai berada di ibu kota negara. Ini sudah menjadi perintah undang-undang. Jadi, ASN tidak bisa menolak. ASN sifatnya sudah menasional. Jadi bisa ditempatkan dimana saja.

Kembali kepada persoalan CPNS yang mengundurkan diri, apakah perlu ada sanksi atau tindakan administratif terhadap CPNS yang bersangkutan?

Sudah ada aturannya tentang mereka yang mengundurkan diri dari CPNS. Kita harus merujuk pada aturan yang sudah berlaku, seperti Peraturan Menteri PANRB Nomor 27 tahun 2021. CPNS yang mengundurkan diri dapat dikenai sanksi. Aturan di setiap lembaga atau kementerian masing-masing juga memberikan sanksi kepada CPNS yang mengundurkan diri. Aturan ini saja yang dijalankan bukan karena berdasarkan *like* atau *dislike*.

Ada lembaga yang memberikan sanksi administratif puluhan juta kepada CPNS yang mengundurkan diri. Karena itu, setiap CPNS seharusnya sudah mengetahui adanya aturan tersebut. Jika sudah mengetahui adanya sanksi karena mengundurkan diri, maka CPNS itu sendiri yang akan menanggung risikonya. Saya hanya bisa katakan jika seseorang sudah masuk dalam satu instansi atau dunia kerja, tentu dia mengetahui dunia kerja di instansi atau lembaga itu. Kalau akhirnya mengundurkan diri, maka CPNS itu salah mengambil keputusan.

Kalau melihat kasus pengunduran diri abdi negara ini, menurut Bapak apa yang perlu diperbaiki? Apakah pola rekrutmennya, penataan penempatan, atau renumerasinya?

Dari sisi rekrutmen abdi negara, kita sudah melakukan banyak perbaikan dan perubahan. Kalau dulu dilakukan secara manual, pola rekrutmen saat ini dilakukan lebih modern dengan teknologi informasi. Dari substansi tes-tes untuk ASN kita juga sudah melakukan perbaikan, misalnya dengan adanya wawasan kebangsaan, TPA dan lain sebagainya.

Dalam seleksi perlu adanya kejujuran. Seseorang calon jika dinyatakan lulus memang karena usahanya berhasil melewati seleksi bukan karena kecurangan atau bantuan pihak lain. Karena itu dalam seleksi rekrutmen CPNS harus dihindari adanya praktik-praktik kecurangan, termasuk "masuk angin" karena adanya surat sakti dan sebagainya. Sehingga seseorang yang seharusnya tidak lulus, ternyata "lulus" karena praktik-praktik seperti itu.

Apakah perlu juga adanya perbaikan gaji PNS, karena salah satu alasan CPNS mengundurkan diri adalah karena gaji yang kecil?

Otomatis, soal gaji PNS ini menjadi perhatian. Kami, di Komisi II DPR, juga memerhatikan persoalan gaji aparatur sipil negara (ASN) ini. Kita menyadari bahwa kebijakan renumerasi secara nasional ini belum berimbang. Perlu kajian terhadap standarisasi renumerasi secara nasional. Contoh, ada pendapatan pegawai paling bawah dengan pegawai paling tinggi sangat timpang. Ada yang masih mendapat penghasilan kurang dari satu juta rupiah, tetapi ada orang yang mendapat penghasilan puluhan, ratusan juta rupiah bahkan miliaran. Artinya, ketimpangan penghasilan ini harus juga menjadi perhatian secara nasional, bukan hanya di lingkungan antar instansi, tetapi juga swasta.

Terakhir, apa yang bisa dilakukan Komisi II DPR terkait persoalan adanya ratusan CPNS dan PPPK yang mengundurkan diri ini?

Tentu kita akan memanggil dari pihak Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Badan Kepegawaian Nasional (BKN). Kita akan tanyakan duduk perkara mengapa banyak CPNS dan PPPK yang mengundurkan diri. Kita ingin mengetahui pokok persoalannya dan apa yang telah dilakukan kementerian dan lembaga terkait dengan masalah ini. Kita menginginkan adanya antisipasi ke depan agar masalah ini tidak terjadi lagi. ❑

Buku ‘Building a Legacy’

Kisah Hidup Fadel Muhammad Menjadi Inspirasi Berbagai Kalangan

Fadel Muhammad merupakan sosok yang komplit, sebagai politisi, pejabat pemerintah, pengusaha, dan juga akademisi.

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

KETUA MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo menilai, kehadiran buku ‘Building a Legacy’ yang menceritakan kisah hidup Fadel Muhammad bisa menjadi inspirasi bagi berbagai kalangan. Khususnya, generasi muda bangsa yang sedang belajar memaknai kehidupan. Buku ini menegaskan kebenaran adagium universal bahwa kesuksesan tidak datang tiba-tiba. Kesuksesan harus diraih dengan usaha, kerja keras, dan perjuangan.

“Pak Fadel merupakan sosok komplit, baik sebagai politisi, pejabat pemerintahan, pengusaha, maupun akademisi. Perjalanan kehidupannya banyak menghadirkan kisah berkesan dan sangat menginspirasi. Saat masih berkarir sebagai wartawan, media massa harian Prioritas, tempat saya bekerja, dibredel. Saya lantas berinisiatif mendirikan majalah Info Bisnis. Di zaman itu mendirikan media massa sangat sulit, karena salah satu syaratnya harus memiliki deposito Rp 1 miliar. Berkat hubungan baik dengan para pengusaha yang pernah menjadi narasumber, salah satunya Pak Fadel, kesulitan tersebut bisa diatasi. Sehingga berbagai capaian yang saya raih pada saat ini tidak lepas dari campur tangan Pak Fadel,” ujar Bamsoet usai menghadiri syukuran HUT ke-70 Fadel Muhammad sekaligus peluncuran buku ‘Building a Legacy’, di Jakarta, Jumat malam (20/5/22).

Acara yang digelar atas inisiatif istri, anak, dan menantu itu, selain dihadiri oleh para pimpinan MPR RI seperti Ahmad Basarah (PDI Perjuangan), Lestari Moerdijat (Nasdem), Jazilul Fawaid (PKB), Syarief Hasan (Demokrat), Hidayat Nurwahid (PKS), dan juga dihadiri mantan Ketua DPD RI Ginanjar Kartasasmita, serta para tokoh lainnya.

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, sebagai politisi, puncak pengabdian Fadel Muhammad bermuara pada jabatan Wakil Ketua Umum Partai Golkar. Sikap politiknya tegas. Dalam menyikapi dinamika politik, Fadel selalu berpikiran terbuka, bersikap kolaboratif,

berpandangan visioner, dan selalu mengedepankan semangat musyawarah untuk mufakat. Di sisi lain, ia bisa bersikap determinan dan gigih, ketika memperjuangkan nilai-nilai yang diyakini kebenarannya.

"Dalam bidang pemerintahan, Pak Fadel sukses memimpin Gorontalo selama dua periode berturut-turut (12 September 2001 - 21 Oktober 2009). Bahkan, pada periode keduanya, ia berhasil meraih 81% suara masyarakat Gorontalo, sebagai wujud pengakuan atas keberhasilannya membangun Provinsi Gorontalo, sekaligus pembuktian bahwa beliau sangat dekat dan dicintai oleh masyarakat Gorontalo. Tidak heran jika beliau juga dipercaya oleh Presiden SBY untuk menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan (22 Oktober 2009 - 19 Oktober 2011) dan berhasil menaikkan taraf hidup petani garam dan nelayan, serta memperbaiki laporan keuangan kementerian dari disclaimer menjadi wajar tanpa pengecualian," jelas Bamsoet.

Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia serta Wakil Ketua Umum SOKSI ini menerangkan, sebagai pengusaha, kegigihan semangat juang dan jiwa kewirausahaan yang pantang menyerah, telah mengantarkan sosok Fadel Muhammad pada berbagai kesuksesan. Kepribadian yang bersahaja dan mudah bergaul, serta kemampuan membangun networking menjadi faktor fundamental dalam keberhasilan membangun dan mengembangkan bisnis.

"Sebagai akademisi, jejak prestasi akademis yang diraih pada berbagai jenjang pendidikan, adalah gambaran pribadi yang selalu 'haus' akan pengetahuan, meskipun di saat bersamaan Pak Fadel juga disibukkan dengan urusan bisnis dan politik. Pengukuhan sebagai Guru Besar, dan penganugerahan gelar Profesor pada bidang Kewirausahaan Sektor Publik pada Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, adalah pengakuan akademis atas komitmen Pak Fadel, untuk tidak pernah berhenti belajar, dan mengamalkan ilmu untuk pengabdian," pungkas Bamsoet. ❑

Pulang Kampung, Bertemu Teman Masa SMA

Susilo Bambang Yudhoyono

SUSILO Bambang Yudhoyono biasa disapa SBY ternyata pada masa mudanya punya grup band. Bersama rekan-rekan sesama siswa SMA Negeri 1 Pacitan, Jawa Timur, SBY membentuk sebuah grup band. Di grup band itu SBY bermain pada bass gitar.

Dalam kesempatan pulang ke tanah kelahirannya di Pacitan, Mei lalu, SBY mengundang teman-teman bandnya semasa SMA itu. Mereka berjumpa di halaman Gedung Museum dan Galeri SBY-ANI. Mereka pun bernostalgia tentang masa mudanya itu. Sejenak mereka larut menyanyikan lagu-lagu lawas, di era 1960-an, seperti beberapa lagu Koes Bersaudara.

"Saya teringat, dulu band kami kerap dipanggil manggung di acara pernikahan," kenang SBY. "Ada momen lucu dan indah," cerita SBY. Selesai manggung, katanya, mereka sering mendapat oleh-oleh dari tuan rumah. "Karena gitar bass saya besar maka sering digunakan untuk tempat oleh-oleh berupa makanan kecil, seperti rengginang dan lainnya," katanya.

SBY berencana akan mendokumentasikan perjalanan hidupnya di Pacitan, termasuk momen bersama teman-teman bandnya. Juga di Gedung Museum dan Galeri SBY-Ani akan banyak sejarah dan budaya Pacitan terdokumentasi di sana.

"Saya ingin anak-anak generasi sekarang jangan melupakan sejarah dan budaya daerahnya ini," ujar Presiden ke-6 Republik Indonesia ini. ❑

DER

Dinobatkan Menjadi Puteri Indonesia 2022

SETELAH menyisihkan 44 kontestan dari berbagai daerah di Indonesia, akhirnya **Laksmi Shari De Neefe Suardana** dinobatkan menjadi Puteri Indonesia 2022. Gadis kelahiran Ubud, Bali, 26 Januari 1996, ini menyabet gelar bergengsi itu pada babak final pemilihan Puteri Indonesia 2022 di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta, Jum'at malam (27/5/2022)

Laksmi mengaku, bisa lolos 6 besar dan bahkan berhasil menyabet gelar Puteri Indonesia 2022 merupakan suatu kebanggaan. "Saya bukan model, lho. Saya hanya sempat latihan pada sebuah beauty camp, Ratu Sejagad, sejak 2020. Mostly online, because of pandemic, terus saya juga sempat latihan langsung sama mereka di Jakarta," ungkap Laksmi.

Katanya, dia ikut kontes Puteri Indonesia 2022 atas saran teman-temannya. "Teman-teman saya kebanyakan memberi saran ikut ajang ini," ujar gadis blasteran Indonesia – Australia ini.

Selanjutnya, bersama Yayasan Puteri Indonesia (YPI) dan Mustika Ratu, Laksmi yang alumnus jurusan fashion business sekolah mode, Polimoda, Italia, ini akan mulai menjalankan tugasnya sebagai Puteri Indonesia 2022. ❑

DER

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Laksmi Sari

Olivia Aten

Siap Menuju Top 10 Wild Cards Ajang Miss Global 2022

OLIVIA **Aten**, gadis kelahiran Maluku, berhasil menempatkan dirinya pada Top 20 Wild Cards ajang Miss Global 2022. Dengan demikian, Olivia mewakili Indonesia dalam ajang Miss Global 2022 yang diselenggarakan di Bali pada 31 Mei hingga 11 Juni 2022.

Dalam ajang Miss Global 2022 yang diikuti wakil dari 85 negara itu, selanjutnya Olivia siap-siap mengikuti vote untuk menuju Top 10 Wild Cards pada 10 Juni 2022. Berbagai persiapan dilakukan oleh Olivia. Dan, timnya bekerja di belakang layar, mulai dari pelatihan catwalk, makeup, kegiatan sosial, virtual competition, hingga public speaking training.

Gaun-gaun terbaik dan kostum nasional yang mewakili beragaman Indonesia dari desainer lokal juga akan dikenakan Olivia dalam ajang Miss Global 2022. "Saya berharap mampu mempersembahkan yang terbaik untuk Indonesia. Saya juga mengharapkan dukungan warga Indonesia dengan memberikan vote kepada saya," katanya. ❑

DER

Tebet Eco Park

Keindahan Ekosistem Alam di Kota Jakarta

SEBENTAR lagi, libur kenaikan kelas segara tiba. Sebagian anak sudah merancang kegiatan yang akan dilakukan selama masa libur tahun ajaran baru kali ini. Seperti sebelumnya, tahun ini Jakarta diperkirakan masih menjadi primadona bagi sebagian pelajar untuk berwisata sekaligus mengisi waktu libur mereka. Apalagi, Pandemi Covid-19 sudah bisa diatasi. Bahkan berbagai persyaratan yang pernah diterapkan untuk melakukan perjalanan telah dilonggarkan.

Entah disengaja atau tidak, Jakarta sendiri seolah bersiap menyambut datangnya masa libur tahun ajaran baru kali ini. Beberapa fasilitas yang baru diresmikan diperkirakan akan menjadi tempat tujuan wisata pada musim libur. Antara lain Jakarta International Stadium (JIS) dan Tebet Eco Park.

Tebet Eco Park merupakan sebuah taman yang terletak di bilangan Tebet, Jakarta Selatan. Tebet Eco Park adalah taman hasil revitalisasi yang dulunya bernama Taman Honda Tebet. Awalnya, taman merupakan dua kawasan taman terpisah, Taman Tebet Utara dan Taman Tebet Selatan. Saat ini keduanya disatukan melalui sebuah jembatan yang diberi nama Infinity Link Bridge.

Tebet Eco Park diresmikan Sabtu sore (23/04/2022) oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bersama Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Suzi Marsitawati. Taman ini bisa Anda kunjungi mulai pukul 06.00-19.00 satu pekan penuh, Senin hingga Ahad. Pengunjung bisa menikmati kesegaran udara, berolahraga dan berbagai fasilitas yang disediakan secara cuma-cuma, alias gratis.

Pada Jumat pagi (20/5/2022) Majalah *Majelis* berkesempatan mendatangi kawasan yang memiliki luas hingga 7 Ha itu. Saat itu mendung menutupi sebagian langit ibu kota. Akibatnya, sinar matahari yang lazimnya mulai menyengat, pagi itu tidak terasa panasnya. Hanya semburatnya saja yang bisa disaksikan di atas Jakarta.

Saat itu ratusan sepeda motor sudah terparkir di salah satu sudut Tebet Eco Park. Para pemiliknya bertebaran untuk mendapatkan kesenangannya masing-masing. Ada yang berjalan sembari berolahraga mengelilingi taman, ada yang hanya duduk-duduk, beristirahat setelah berolahraga, dan sebagian lain ada yang berswafoto dan ngobrol bersama keluarga.

Tetapi, para pengunjung Tebet Eco Park paling banyak memilih untuk berjalan mengelilingi taman melewati lintasan Infinity Link Bridge. Yaitu, jembatan penghubung Taman Tebet Utara dengan Taman Tebet Selatan. Jembatan ini berwarna merah-

oranye yang melingkar dan membentuk simbol menyerupai angka delapan atau infinity (tak terbatas).

Dari atas Infinity Link Bridge pengunjung bisa menyaksikan pemandangan Tebet Eco Park dan sekitarnya. Termasuk rumah dan jalanan yang ada di sekitar taman. Dan, dari ketinggian Infinity Link Bridge inilah keindahan Tebet Eco Park tampak semakin sempurna.

Children Playground

Tetapi mengunjungi Tebet Eco Park, para pengunjung tidak semata menikmati kecantikan taman dari atas Infinity Link Bridge. Ada berbagai fasilitas yang disediakan Pemprov Jakarta di Tebet Eco Park. Antara lain, Forest Buffer, fasilitas ini berada di sebelah jalan raya, sehingga dapat membantu meredam suara bising kendaraan yang masuk ke taman Tebet Eco Park. Forest Buffer memungkinkan pengunjung berjalan-jalan dengan santai di bawah rindangnya pohon sambil menikmati alam sekitar.

Kemudian Community lawn, bisa digunakan pengunjung untuk berkumpul dan bersantai, setelah berjalan-jalan menikmati wisata Tebet Eco Park. Ada juga Wetland Boardwalk. Fasilitas ini merupakan lahan

genangan air atau lahan basah (rawa) yang menjadi aset ekologis di Tebet Eco Park. Wetland Boardwalk adalah sistem natural yang didesain untuk pengendalian banjir dan meningkatkan kualitas air dengan

menggunakan tanaman-tanaman yang dapat mendukung pemurnian air.

Ada juga Plaza, tempat yang menjual berbagai berbagai tanaman, Community Garden, Thematic Garden dan Children Playground. Children Playground adalah sarana permainan anak yang cocok untuk melatih ketangkasan dan tumbuhkembang anak. Di tempat ini juga tersedia peralatan olahraga yang bisa digunakan secara gratis.

Saat ini keberadaan Tebet Eco Park terus disempurnakan. Kawasan yang direncanakan untuk mengakomodir UKMK misalnya, dikebut agar cepat selesai. Demikian juga dengan penanaman rumput dan pohon-pohon lainnya. Juga fasilitas pendukung yang tengah dalam pengerjaan.

Meski belum selesai sepenuhnya, Tebet Eco Park sudah menjadi primadona warga Jakarta Selatan. Pada hari libur dan akhir pekan tempat ini penuh dengan pengunjung. Karena itu, kepada Majalah *Majelis* , Budi Mulyanto (57), warga Cawang Jakarta Timur, mengatakan, dirinya memilih mengunjungi tempat tersebut pada hari kerja. Meski keinginan untuk melihat langsung Tebet Eco Park sudah diimpikan sejak lama. ❑

MBO

Anak Agung Bagus Adhi Mahendra Putra, SH., MH.

Politisi Pilih Tanding

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

PEMILIHAN Umum 2024 masih sekitar dua tahun lagi, tapi konstalasi politik mulai rada menghangat. Belakangan ini para petinggi partai politik semakin gencar melakukan pertemuan untuk membangun koalisi. Lembaga-lembaga survei juga mulai gencar merilis siapa calon presiden paling mendapat dukungan rakyat (versi lembaga survei) yang layak maju sebagai calon Presiden dalam Pemilu 2022.

Meningkatnya suhu politik setiap menjelang Pemilu, tak terkecuali Pemilu 2024, memang sudah diprediksi oleh berbagai kalangan. Bahkan peristiwa apapun, dikerjakan oleh siapa pun, bisa saja dikait-kaitkan dengan politik. Anggota Badan Sosialisasai dari Fraksi Partai Golkar MPR RI, Anak Agung (AA) Bagus Adhi Mahendra Putra, SH,, MH., (52), mafhum terhadap perubahan suhu politik yang selalu terjadi setiap menjelang pesta demokrasi lima tahunan ini.

AA. Bagus Adhi Mahendra Putra menyatakan, bangsa Indonesia sudah memiliki pengalaman yang cukup dalam melaksanakan pemilihan Presiden dan anggota Legislatif. Juga para penyelenggara pemilihan umum, baik KPU, Bawaslu, maupun Kementerian Dalam Negeri tentunya sudah menyiapkan berbagai strategi pelaksanaan pemilihan umum. Antara lain dengan melakukan modernisasi data para pemilih pemilu.

"Pemilu merupakan salah satu wujud kontribusi masyarakat dalam pembangunan. Karena itu, pemilu tidak boleh menghadirkan ketegangan dan perpecahan seperti yang terjadi pada Pemilu 2019," kata Bagus Adhi Mahendra kepada Majalah *Majelis* MPR RI beberapa waktu lalu.

Agar perpecahan seperti pada Pemilu 2019 tidak terulang, menurut Bagus Adhi, semua pihak harus menahan diri dari melakukan politik identitas. Bukan berarti tidak boleh berkunjung ke pesantren, masjid, atau rumah ibadah yang lain untuk melakukan sosialisasi dan mencari dukungan, tapi jangan membuat isu agama menjadi bahan kampanye politik yang berpotensi menimbulkan konflik, serta perpecahan di kalangan pemeluk agama.

Apalagi pelaksanaan pemilu bertujuan untuk mewujudkan kemajuan bagi bangsa. Jadi, yang diutamakan adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan politik identitas menimbulkan dampak yang kontra produktif, bertolak belakang dari tujuan melaksanakan pemilu. Yaitu, perpecahan, saling serang, hujat-menghujat, fitnah hingga saling benci.

Budidaya Perikanan

Sebagai politisi, AA. Bagus Adhi Mahendra adalah sosok yang nyaris tak pernah diterpa isu miring. Rahasianya, karena Ia tak gampang hanyut dalam praktik-praktik bermasalah yang kerap dilakukan para oknum politisi. Bagus Adhi memilih jalan senyap, yang tidak menimbulkan percik-percik kegaduhan. Dan, tidak menimbulkan kecurigaan.

Menyangkut praktik politik uang yang hampir tak bisa dipisahkan dari dunia politik, pria kelahiran Badung, 14 Februari 1970, ini mengakui bahwa uang adalah sesuatu yang penting dalam politik. Tetapi uang bukanlah segala-galanya. Banyak masyarakat yang bisa dibeli hak suaranya, tetapi tidak seluruh pemilih mau menukarkan suaranya dengan sejumlah nominal.

Itu ia buktikan selama menjalani kontestasi dan memenangkan pileg selama dua periode, yaitu 2014-2019 dan 2019-2024. Sulung empat bersaudara pasangan I Gusti Ketut Adhiputra dan Ida Ayu Mahendri ini meretas jalan menuju Senayan dengan cara berbaur bersama masyarakat. Dan, pada momen kebersamaan tersebut, Bagus mengajarkan budidaya perikanan. Sehingga, masyarakat yang sebelumnya menganggur memiliki pekerjaan dan penghidupan.

"Saya tidak begitu silau kalau ada caleg datang membawa banyak uang. Saya percaya, dengan turun ke masyarakat dan memberikan ilmu bermanfaat akan jauh lebih dikenang dan melekat dihati rakyat. Dan, itu menjadi kepuasan tersendiri, terlebih jika mereka mau menceritakan perjalanan suksesnya," kata Bagus Adhi.

Apalagi, sejak lama alumni Magister Hukum Universitas Mahendratta ini dikenal dekat dengan masyarakat. Bahkan, sebelum turun gelanggang politik, Bagus Adhi menyertai ayahnya mendirikan dua kelompok tani di Kecamatan Petang, Kabupaten Badung, Bali. Yaitu, Lembu Sakti dan Lembu Ireng. Dan, dengan para petani serta peternak Bali, Bagus Adhi kemudian memiliki usaha penjualan sapi ke luar kota, termasuk Jakarta. Sekaligus mendorongnya untuk terjun ke kancah politik nasional.

Melihat perjalan singkat suami Made Suciati ini tak berlebihan jika Ia bisa menduduki jabatan sebagai wakil rakyat seperti sekarang ini, dan kedekatannya dengan masyarakat tetap terjaga. Karena, Bagus Adhi berkeyakinan, hanya dengan menjaga kedekatan bersama masyarakat tugasnya menampung dan memperjuangkan aspirasi bisa dilaksanakan.

"Kalau kita jauh dari masyarakat, bagaimana kita bisa mendengar keluh kesah, serta keinginan dari mereka. Jadi, sudah seharusnya anggota dewan itu selalu dekat dengan konsituennya. Tetap bersama mereka dalam semua kondisi serta keadaan," katanya.

Cucu Seorang Sedahan

Keikutsertaan AA. Bagus Adhi Mahendra Putra bersama Partai Golkar dan politik nasional adalah tulisan tangan yang sudah tersirat dalam hidupnya. Ini bisa dilihat dari silsilah keluarganya yang senantiasa berhimpitan dengan kekuasaan. Kakeknya adalah seorang Sedahan (yang mengurusi sawah masyarakat).

Kakeknya diangkat dan bertanggungjawab pada raja. Setiap hari sang kakek bepergian menunggang kuda putih berkeliling keluar masuk kampung. Sedangkan pamannya, I Gusti Ketut Arke, adalah Komandan Pasukan Kerajaan. Sang paman bernasib seperti Panglima Besar Soedirman, menderita penyakit paru dan harus ditandu.

Sementara ayahnya adalah aktivis yang juga organisatoris, menjabat sebagai sekretaris Sekber dan aktif di Tri Karya (MKGR, Kosgoro dan Soksi) Kabupaten Badung.

"Sejak kecil saya belajar berpolitik, ikut diskusi bersama ayah. Begitu remaja, usia 17 tahun pada 1987, saya terlibat dalam satgas, menjaga papan partai, juga jadi Sekretaris PC Golkar kecamatan. Lalu, Sekretaris DPD Golkar Kabupaten Badung, kemudian Wakil Sekretaris di provinsi, dan akhirnya pengurus pusat. Jadi, jabatan saya di Golkar diperoleh secara berjenjang, dari bawah," kata Bagus Adhi kembali.

Setelah cukup modal sosial, pengalaman dan mendapat kepercayaan di Golkar, pada tahun 2014 Bagus Adhi didapuk menjadi salah satu caleg partai berlambang beringin Bali. Seperti menjemput takdirnya, tidak banyak hambatan yang menghalaginya. Bagus Adhi sukses melangkah ke Senayan. Padahal, sejak lama Bali dikenal sebagai kandang PDI Perjuangan.

"Kita harus bersyukur dan percaya akan kebesaran Tuhan. Intinya, kita harus berusaha hadir dan memberi dampak positif bagi masyarakat. Belajar dari pohon, tatkala hidup bisa memberikan oksigen dan matinya tidak sia-sia. Karena, bisa memberikan kayu bakar dan pupuk bagi lingkungan sekitarnya," kata Bagus lagi.

Jualan Es

Keberhasilam Bagus Adhi meretas kehidupan di ranah politik menuai banyak pujian. Terlebih, karena kemenangannya pada kontestasi pileg banyak didukung oleh para pemilih yang merasakan kiprahnya di masyarakat, bukan semata money politic. Bagus juga tidak seperti peribahasa kacang lupa pada kulitnya. Ia tetap menjaga kedekatannya dengan konsituen, bukan hanya saat kampanye pemilu. Tetapi selama dua periode menjadi anggota legislatif kedekatannya dengan para pemilihnya tetap terjaga. Buktinya, setiap ada kesempatan ia selalu mampir untuk bertemu warganya. Apalagi saat reses hampir bisa dipastikan waktunya dia habiskan di dapilnya.

Ketekunannya menjalannya tugasnya sebagai wakil rakyat tak lepas dari kedisiplinan dan juga kerasnya pendidikan yang ia peroleh

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

semenjak kecil. Sejak kelas satu sekolah dasar (SD), setiap hari sebelum belajar, ia pergi ke pasar untuk menjual bunga. Itu dilakukan hingga kelas tiga SD. Setelah kelas tiga SD, pekerjaannya bertambah, sepulang sekolah dia mendapat tugas memunguti telor ayam negeri.

"Siang saya harus tidur, kalau membantah ayah saya akan murka, dan beliau tak segan memecut menggunakan ekor ikan pari. Lalu, sore harinya saya jualan es lilin. Hasil jualan es akan lebih besar jika dilakukan pada saat musim panen tiba," cerita Bagus lagi.

Saat Bagus tumbuh semakin besar, dia dilatih menembak oleh orangtuanya. Ia juga dibelikan senapan sendiri, merk Benyamin. Dengan senapan itu ia belajar menembak, membidik binatang buruan. Setiap aktifitas itu dikerjakan sembari berdagang es. Ia memegang senjata, sedang anak-anak yang mengikutinya membawakan terenis dan hasil binatang buruan. Saat jualan-nya habis, ia mandi di kali bersama anak-anak ,sementara binatang hasil buruannya dimasak ibunya, untuk dimakan bersama kawan-kawannya. Selain kegiatan-kegiatan tersebut, Bagus Adhi juga sempat ditugasi memelihara kambing Etawa, saat ia duduk di bangku SLTP.

"Di samping semua aktivitas tersebut, satu yang berkontribusi paling besar dalam karir politik saya adalah keikutsertaan di berbagai organisasi, sejak remaja hingga saat ini. Organisasi itulah yang membuat saya terbiasa dalam lingkungan politik, sebelum benar-benar terjun di ranah politik," tukasnya. ❑

MBO

Biodata

Anak Agung Bagus Adhi Mahendra Putra, SH., MH.

Tempat/Tgl Lahir : Badung / 14 Februari 1970

Riwayat Pendidikan

- SD , SD 3 Kerobokan, 1977 – 1983
- SMP , SMP Ngurah Rai Kerobokan, 1983 – 1986
- SMA , SMA PGRI 6, 1986 – 1989
- S1 Hukum Univ. Mahendradatta, 2005 – 2009
- S2 Magister Hukum, Univ, Mahendradatta, 2009 – 2011

Riwayat Organisasi

- Ketua Umum PPS Kerta Wisesa (2018 – sekarang)
- Ketua PP Bali Nusra DPP Partai Golkar (2015 – 2017)
- Ketua Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI) Prov. Bali (2014 – 2016)
- Wakil Bendahara DPP Partai Golkar (2014 – 2018)
- Ketua Bid. Dana & Prasarana KONI Prov. Bali (2012 – 2016)
- Ketua DEPIDAR XXI SOKSI Prov. Bali (2011 – 2019)
- Ketua KBPPP Resort Badung (2010 – 2015)
- Wakil Sekretaris DPD Partai Golkar Prov. Bali (2009 – 2014)
- Ketua Umum Yayasan JSSB Prov. Bali (2009 – 2019)
- Sekretaris PORDASI Bali (2004 – 2009)
- Sekretaris DPD Partai Golkar Kab. Badung (2004 – 2009)
- Pengurus Daerah FKPPI Prov. Bali (2004 – 2009)

Meneladani Pendiri Bangsa, Merawat Indonesia, Sekarang dan Selamanya

MEMANIFESTASIKAN nilai-nilai Pancasila ke dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Indonesia merupakan komitmen dan pekerjaan yang harus terus diusahakan dan dilakukan sepanjang waktu oleh semua pihak. Apalagi, di tengah kekhawatiran mengeringnya modal sosial berbangsa dengan maraknya informasi hoax yang disebarkan oleh para buzzer, yang dibiarkan padahal membahayakan persatuan bangsa, dan menguatkan pembelahan antarwarga, antarkelompok dan antarsuku dan agama. Maka kehadiran Pancasila sebagai 'the living staats fundamental norm" bangsa Indonesia tentu sangat dibutuhkan untuk membawa bangsa Indonesia ke arah yang dicitakan-citakan, sebagai negara demokrasi yang berdasarkan hukum menuju negara kesejahteraan (welfare state). Namun, sayangnya, apabila dilihat lebih seksama, beberapa nilai-nilai di dalam Pancasila seakan memudar dalam beberapa tahun belakangan tersebut, yakni di antaranya nilai persatuan Indonesia.

Memudarnya nilai Persatuan Indonesia bisa terjadi karena banyak faktor, bisa karena faktor ekonomi, sosial, globalisasi dan digitalisasi, tapi juga bisa karena politik pilkada atau pilpres. Misalnya, akibat Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014, di mana masyarakat Indonesia terbelah akibat hadirnya dua pasangan calon, akibat ketentuan Presidential Threshold (PT) 20% yang hadirkan hanya dua pasangan capres/cawapres. Sayangnya, kondisi tersebut bukan segera diatasi, tetapi bahkan terus berlanjut hingga saat ini, yang diperparah dengan munculnya dan dipeliharanya banyak buzzer yang demi kepentingan politik patron-nya rela menyebar hoax, kebencian, yang pecah belah masyarakat, organisasi massa maupun politik. Oleh karena itu, sebagai Bangsa dan Negara Indonesia yang sangat majemuk dan plural dari berbagai sisinya, kita tentu perlu berintrospeksi dan segera lakukan perbaikan diri, dengan antara lain melihat ke belakang bagaimana para pendiri bangsa memberikan teladan dalam mewujudkan dan merawat persatuan bangsa. Dan, melihat ke depan, untuk memaksimalkan potensi dan mengalahkan tantangan zaman.

Dari sejarah para Bapak Bangsa, termasuk dari komunitas Umat Islam, kita diwarisi keteladanan kongkret bagaimana mewujudkan dan merawat persatuan bangsa ketika 4 Bapak Bangsa, anggota BPUPK/PPKI, yaitu: Ki. Bagus Hadikusumo, KH. Wahid Hasyim, Mr. Kasman Singodimedjo dan Mr. Teuku Muhammad Hasan, yang dengan rela mengakomodasi menghapus tujuh kata dalam Piagam Jakarta agar Proklamasi Republik Indonesia tetap selamat, dan bangsa bersatu dalam kemerdekaannya. Kiprah para Bapak Bangsa di dalam Panitia Sembilan dan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK) ini tercatat dalam sejarah sebagai bentuk mengakomodasi aspirasi minoritas di Indonesia Timur. Para tokoh bangsa tersebut memiliki kepekaan dan kewaspadaan yang tinggi atas pentingnya menjaga persatuan bangsa. Sehingga, pertimbangan mereka dalam memutuskan Piagam Jakarta yang kemudian akan menjadi Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 dan dasar negara Pancasila tersebut tidak lagi berpatokan kepada latar belakang yang mereka miliki, melainkan berpedoman kepada kemaslahatan dan kepentingan yang lebih besar untuk menjaga persatuan dan keselamatan seluruh rakyat Indonesia. Pelajaran utama yang juga perlu dirujuk dari sejarah bangsa ini adalah bagaimana demokrasi di Indonesia mengedepankan musyawarah, yang bisa merawat perasaan dihormati dan diterima sebagai sesama anak bangsa di Republik Indonesia, hal mendasar untuk menguatkan keinginan untuk bersama dan bersatu, bukan sekedar "banyak-banyakan" suara sebagaimana di negara-negara yang cenderung liberal, dan cenderung mudah mencederai dan membelah rasa kebersamaan dan komitmen persatuan sebagai bangsa dan negara.

Selanjutnya, keteladanan lain yang penting dirujuk, adalah apa yang ditunjukan oleh Moh. Natsir, melalui Mosi Integral-nya yang menyelamatkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dari pecah belah bentuk Republik Indonesia Serikat (RIS). Buya Natsir yang berasal dari partai Islam, Masyumi, berhasil meyakinkan fraksi-fraksi lain, termasuk dari kalangan Partai Katolik atau Kristen bahkan Partai Komunis, di Parlemen RIS untuk menerima Mosi Integral tersebut

Oleh:
Dr. H. Hidayat Hur Wahid Lc.,MA.
Wakil Ketua MPR RI

dengan menyatakan, NKRI kembali berlaku. Padahal, apabila berhitung dari komposisi kursi, fraksi Masyumi di mana Buya Natsir bernaung jumlahnya sangat kecil, yakni 49 anggota dari total keseluruhan anggota 236. Namun, lagi-lagi kita dapat belajar bahwa persatuan bangsa lebih penting dan jauh bernilai dibanding "banyak-banyakan" kursi di parlemen, ataupun pendewaan egosentris kelompok maupun golongan.

Keteladanan atas langkah historik Buya Natsir ini tentunya akan lebih dapat diinternalisasi ke masyarakat Indonesia, apabila pemerintah juga memberikan aspresiasi yang tinggi, misalnya dengan menetapkan tanggal 3 April, saat mana Mosi Integral disampaikan sebagai Hari NKRI atau Hari Persatuan Bangsa. Momentum sejarah ini sangat penting, karena tanpa Mosi Integral tentu tidak akan pernah ada slogan "NKRI Harga Mati" sebagaimana yang kita dengar saat ini. Sehingga dengan ditetapkannya tanggal 3 April sebagai hari NKRI maka keteladanan sukses merawat dan menyelamatkan NKRI tersebut dapat terus diingat dan diresapi oleh seluruh masyarakat warga bangsa Indonesia pada setiap tahunnya.

Keteladanan lain adalah bagaimana yang dilakukan oleh Perdana Menteri Djuanda Kartawidjaja yang menghadirkan konsep negara kepulauan mengokohkan dan menguatkan NKRI dari sekat-sekat selat atau laut antarpulau. Konsep yang dikenal dengan Deklarasi Djuanda ini akhirnya diakui oleh dunia internasional (Perserikatan Bangsa-Bangsa), serta beberapa tahun kemudian diakomodasi pada United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982. Ini menunjukkan bahwa PM Djuanda yang merupakan kader dari Ormas Islam Muhammadiyah dapat berkontribusi bukan hanya menciptakan persatuan di Indonesia, tetapi juga bisa digunakan bagi negara-negara kepulauan lainnya, seperti Indonesia. Jasa Ir Djuanda itu diakui negara dengan menjadikan tanggal 13 Desember, saat mana pada 13 Desember 1957 dikumandangkan Deklarasi Djuanda, oleh Negara diakui sebagai Hari Nusantara.

Contoh-contoh keteladanan di atas penting terus disegarkan dalam ingatan kolektif Bangsa dan Negara, agar bisa menjadi cermin bagi kita semua dalam merawat persatuan bangsa. Keteladanan nan sukses tersebut merupakan buah dari ketulusan, keberanian, kecintaan dan kecerdasan dari para tokoh bangsa untuk membuat terobosan penguatan dan pelestarian kesatuan nasional, sehingga penting untuk disosialisasikan dan diwariskan terus kepada berbagai generasi masyarakat Indonesia. Apalagi, tantangan persatuan bangsa semakin besar ke depannya, seperti gerakan separatisme di Papua, adanya kesenjangan ekonomi yang sangat besar di kalangan masyarakat, hingga intervensi asing yang dapat berpotensi memecah belah bangsa dalam berbagai kasus.

Persoalan-persoalan yang berkaitan dengan isu persatuan bangsa itu tentu harus bisa segera diatasi dan ditangani dengan baik, agar NKRI dapat utuh dan bersatu, sehingga dapat diwariskan kepada generasi berikutnya, yakni generasi milenia, generasi x, dan generasi z saat mereka akan memperingati 100 tahun Indonesia Merdeka kelak. Oleh karena itu, dengan pengalaman dan keteladanan yang dipelajari dari para pendiri bangsa, maka sudah selayaknya generasi-generasi muda tersebut sangat penting dilibatkan untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat akan pentingnya persatuan bangsa, dan bagaimana masing-masing mereka bisa berperan untuk menyelamatkan, menguatkan, dan merawat persatuan Bangsa dan Negara.

Peran generasi muda, sebagaimana peran para pendiri bangsa dahulu, perlu dimaksimalkan agar mereka bisa menjadi bagian yang menyatukan bangsa Indonesia dan tidak menjadi korban propaganda era "post truth" di tengah globalisasi yang membelah bangsa dan melemahkan negara. Pasalnya, apabila hal ini tidak ditangani secara baik oleh semua pihak, maka generasi-generasi penerus tersebut yang akan sangat dirugikan dengan tidak lagi kokoh kuatnya persatuan bangsa, ketika benih-benih perpecahan makin tumbuh berkembang, dan begitu pula sebaliknya, merekalah yang paling diuntungkan, apabila persatuan bangsa dan negara yang merupakan kesepakatan Bapak Bangsa dan Pancasila, dapat diselamatkan, dikuatkan, dan diwariskan hingga peringatan 100 tahun Indonesia Merdeka dan seterusnya. ❑

Berpolitik Hingga Akhir Hayat

Enam dasawarsa, waktu bagi Sabam Sirait untuk mengabdi kepada bangsa dan negara lewat partai politik dan perwakilan daerah. Mampu bertahan dalam dunia politik sebab sejak sekolah dan kuliah suka beroganisasi. Fusi partai di masa Orde Baru justru membuat dirinya semakin bersinar dan popular. Buku dirinya sangat istimewa sebab Joko Widodo memberi kata pengantar.

PERJALANAN politik Sabam Sirait terbilang sangat panjang, enam dasawarsa. Ia sudah hadir dalam perjalanan itu sejak zaman Presiden Soekarno. Hal demikian diketahui dari buku yang mengupas biografi dirinya. Di sampul belakang buku yang berjudul *Sabam Sirait, Berpolitik Bersama 7 Presiden* itu tertulis sepak terjang pria asal Asahan, Sumatera Utara, itu dengan Presiden mulai dari Soekarno hingga Joko Widodo.

Pengalaman dirinya bersama dengan 7 Presiden menunjukkan ia seorang yang sabar, telaten, dan tekun dalam dunia yang penuh dengan tantangan itu. Meski sabar dalam meniti karier, namun watak dirinya dalam dunia itu sangat tegas, tanpa tedeng aling-aling. Misalnya, saat bertemu B. J. Habibie di tahun 1999, ia mengatakan terus terang bahwa Menteri Riset dan Teknologi di masa Presiden Soeharto itu tidak cocok di dunia politik, sehingga dia menyarankan agar dalam pemilihan presiden selanjutnya, di MPR, Habibie tak usah mencalonkan lagi.

Buku yang memiliki ketebalan xvi + 254 halaman itu sangat istimewa, sebab Presiden Joko Widodo memberi kata pengantar. Dalam uraian yang ada, pria yang akrab dipanggil Jokowi itu mengatakan banyak hal yang pantas diteladani dari Pak Sabam, terutama integritas dan konsistensi sikap dalam berpolitik. Lebih lanjut dikatakan, dalam pandangannya, keteladanan yang ditunjukkan Pak Sabam dalam menjalankan prinsip-prinsip politik yang baik dan lurus sangatlah berarti banyak. Pria yang pernah menjadi Walikota Solo dan Gubernur Jakarta itu mengaku beberapa kali dinasehati oleh Sabam Sirait.

Sabam Sirait mampu bertahan sebagai politisi sejak Soekarno hingga Joko Widodo, sebab sejak dirinya kuliah bahkan sebelumnya, memang orang yang suka berorganisasi. Saat kuliah di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, ia aktif di berbagai organisasi dan diskusi. Organisasi mahasiswa yang pernah ia gerakan adalah GMKI (Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia), KAMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia), dan PPMI (Perhimpunan-Perhimpunan Mahasiwa Indonesia). Dari aktif di banyak organisasi mahasiswa itulah yang membuat Sabam Sirait kenal, akrab, dan menjalin jaringan dengan rekan-rekannya yang ada di Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), serta gerakan mahasiswa lokal yakni Gerakan Mahasiswa Djakarta (GMD).

Sebagai sosok penganut Kristen dan pernah menjadi Ketua Umum GMKI Jakarta, menghantarkan dirinya masuk dalam Partai Kristen Indonesia (Parkindo). Dari sinilah dirinya mulai bergelut dalam dunia politik praktis. Ketika Presiden Soeharto menyederhanakan ratusan partai politik dalam aliran-aliran besar lewat fusi, membuat Parkindo bersama partai yang lain seperti PNI, Partai Katolik, Murba, dan IPKI, menjadi satu partai, yakni Partai Demokrasi Indonesia (PDI).

Fusi partai hingga terbentuknya PDI, rupanya menjadi berkah bagi Sabam Sirait. Sebab di partai berlambang kepala banteng itu, karier politiknya selain bersinar juga membuat dirinya sangat popular, bahkan bisa dikatakan mampu memberi warna tersendiri di partai yang identik dengan warna merah itu.

Bukti dirinya mampu memberi warna di PDI adalah dalam Kongres III PDI tahun 1986. Dalam kongres itu ia bersaing dengan beberapa tokoh partai lainnya, seperti Soerjadi, untuk merebut posisi ketua umum. Bila kongres diselenggarakan dengan *fair*, hal demikian bisa mengantarkan dirinya menjadi ketua umum. Ketidakfair-an rupanya dialaminya. Diungkapkan di halaman 16, seorang jenderal yang berpengaruh menelepon dirinya agar tidak meneruskan cita-citanya menjadi orang nomer satu di PDI. Pemerintah pada masanya, Soeharto, rupanya lebih memilih Soerjadi.

Menanggapi peristiwa hasil Kongres III PDI Tahun 1986, dalam buku yang bersampul foto dirinya itu, ia mengatakan, perjalanan hidup saya pernah benturan. Saya menggolongkan diri orang yang kalah, dan dikalahkan. Tapi, saya tidak akan berhenti mempertahankan prinsip dalam perjuangan demokrasi di negeri ini. Saya akan membuktikan bahwa hal itu mungkin.

Pahit dan getir yang ia rasakan di PDI tidak membuat ayah Maruarar Sirait itu keluar partai atau menjadi kutu loncat. Ia masih tetap loyal dengan PDI hingga PDI Perjuangan. Bukti keloyalan yang ada, terbukti dia sangat lama menjadi wakil rakyat dari Fraksi PDI dan PDI Perjuangan, dari tahun 1973 - 1982, 1992 – 1997, 1999 – 2004, dan 2005 – 2009.

Bagi Sabam Sirait, dunia politik adalah menjadi bagian dari hidupnya. Meski usia terbilang sudah tua, namun tidak mau tinggal diam di rumah bersama istri, anak, dan cucunya. Pria yang pernah menjadi anggota Dewan Pertimbangan Agung (DPA) itu tetap ingin berkiprah dalam dunia yang membesarkannya.

Selepas menjadi anggota DPR, dirinya maju dalam pemilu lewat jalur Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Dapil Jakarta. Hingga akhir hayatnya, dia masih tercatat sebagai anggota DPD RI. Terkait hal ini, di buku itu pada halaman 21 menjelaskan, memang sudah menjadi tekad Sabam Sirait untuk mengabdikan diri kepada bangsa dan negara hingga akhir hayatnya. ❑

AWG

MPR
RUMAH KEBANGSAAN
PENGAWAL IDEOLOGI PANCASILA
DAN KEDAULATAN RAKYAT

INI BARU
INDONESIA
DARI MPR RI UNTUK NKRI

MAJELIS

"Segera Unduh Aplikasinya!

DI PLAY STORE
http://bit.ly/bukudigitalmprri

MEDIA INFORMASI DAN KOMUNIKASI KONSTITUSI
MAJELIS

INI BARU
INDONESIA
DARI MPR RI UNTUK NKRI

Buku Digital MPR RI
SETJEN MPR RI